



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUKURAN UPAYA PENGUMPULAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT:  
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2002 – 2008**

**TESIS**

**DEDEN KURNIAWAN  
0606152522**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUKURAN UPAYA PENGUMPULAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT:  
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2000 – 2008**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi**

**DEDEN KURNIAWAN  
0606152522**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUKURAN UPAYA PENGUMPULAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA BARAT:  
ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2000 – 2008**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi**

**DEDEN KURNIAWAN  
0606152522**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
JAKARTA  
JANUARI 2011**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Januari 2011



(Deden Kurniawan)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deden Kurniawan

NPM : 0606152522

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Januari 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Deden Kurniawan  
NPM : 0606152522  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Pengukuran Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel Tahun 2000 – 2008

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc  
Penguji : Dr. Ir. Widyono Soetjipto  
Penguji : R.H. Achmadi, SE., M.Soc.Sc



Ditetapkan di : Jakarta

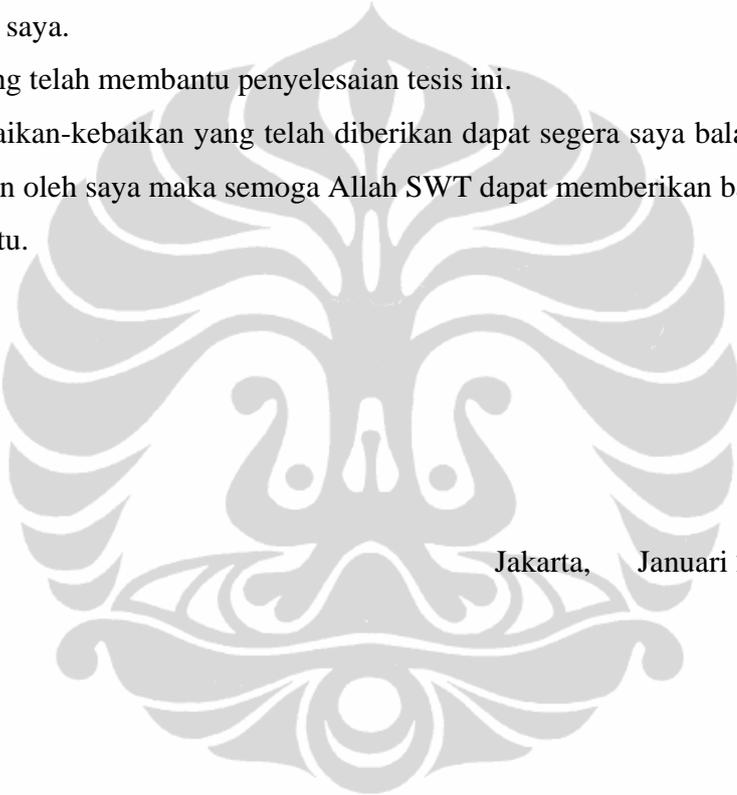
Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak saya tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Iman Rozani, S.E., M.Soc. Sc. yang telah memberikan arahan, kebijaksanaan dan masukan kepada saya.
2. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dapat segera saya balas dan jika tidak bisa terbalaskan oleh saya maka semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan itu.



Jakarta, Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deden Kurniawan  
NPM : 0606152522  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengukuran Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel Tahun 2000 – 2008**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2011

Yang menyatakan



(Deden Kurniawan)

## ABSTRAK

Nama : Deden Kurniawan  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Pengukuran Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah  
Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat: Analisis Data  
Panel Tahun 2000 - 2008

Tesis ini membahas estimasi pengukuran upaya pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel tahun 2000 – 2008. Penelitian ini membahas pengukuran kapasitas pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode regresi yang dinilai sama dengan nilai hasil regresinya (harapannya), sedangkan upaya PAD adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapannya tersebut. Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka interpretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 89,27 persen Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh persamaan dalam penelitian ini dengan kontribusi terbesar adalah dari sektor pertanian . Sedangkan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%.

Kata Kunci: Kapasitas PAD, Upaya PAD, Jawa Barat.

## ABSTRACT

Name : Kurniawan Deden  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : Measurement of Local Revenue Collection Efforts Government District in West Java: Panel Data Analysis Year 2000 - 2008

This thesis describes the measurement of estimated revenue collection efforts (PAD) district governments in West Java using panel data analysis of 2000 - 2008. This study discusses the measurement of revenue capacity by using regression methods assessed the same as the value of regression results (expectations), while the effort is the ratio between the actual revenue divided by the value of these expectations. By considering the model equation that has been generated, then the interpretation of the model accounted for about 89.27 percent capacity PAD District in West Java Province can be described by the equation in this study with the largest contribution is from the agricultural sector. While efforts PAD District in West Java Province has been largely more than 100%.

Keywords: Capacity PAD, PAD efforts, West Java.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Hipotesis Penelitian .....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.7 Metodologi Penelitian .....	9
1.8 Sistematika Penulisan .....	9
2. TINJAUAN LITERATUR .....	11
2.1 Arti Upaya PAD .....	11
2.2 Cara Mengukur Upaya PAD .....	13
2.2.1 Cara Representative Tax/PAD Ssystem .....	14
2.2.2 Cara Regresi .....	16
2.3 Pengaruh Otonomi dan Desentralisasi Daerah Terhadap Upaya Penggalian PAD: Tinjauan Literatur .....	29

2.4.		
3.	TINJAUAN OBJEK PENELITIAN .....	36
3.1.	Otonomi Daerah dan Penerimaan Daerah: Kondisi di Indonesia .....	36
3.1.1.	Otonomi Daerah Di Indonesia .....	36
3.2.1.	Penerimaan Daerah di Indonesia .....	40
3.2.	Otonomi Daerah, Penerimaan Daerah, Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	45
3.2..1.	Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Barat .....	45
3.2.2.	Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	47
3.2.3.	Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	57
4.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	64
4.1.	Analisis Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	64
4.1.1.	Model Analisis dan Pemilihan Variabel Yang Diuji.....	64
4.1.2.	Uji Ekonometrik Dalam Analisis Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	73
4.2.	Pengukuran Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	81
5.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	83
5.1.	Kesimpulan .....	83
5.2.	Saran .....	84
	DAFTAR PUSTAKA ..	87
	LAMPIRAN .....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Dana Transfer Yang Diterima Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2008 (Jutaan Rupiah) .....	6
Tabel 1.2.	PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2008 (Jutaan Rupiah) .....	7
Tabel 2.1	Total Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Penggunaan Listrik di Enam Daerah .....	15
Tabel 3.1.	Perbandingan Daerah Penerima Dana Desentralisasi dan Dekonsentrasi .....	45
Tabel 3.2	Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008 .....	47
Tabel 3.3.	Pangsa Industri Manufaktur di DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 1990, 2000 dan 2010 .....	51
Tabel 3.4	Perbandingan Dana Transfer Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008 .....	54
Tabel 3.5	Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008 .....	55
Tabel 3.6	Perbandingan Dana Transfer Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008 .....	56
Tabel 3.7	Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut .....	58
Tabel 3.8	Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut .....	59
Tabel 3.9	Peraturan Daerah tentang Penerimaan PAD Lainnya di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut .....	61
Tabel 3.10	Rekapitulasi Peraturan Pajak Daerah Yang Dibatalkan Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 2002 s.d. 2007 .....	62
Tabel 4.1	Data PDRB Propinsi Jawa Barat Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2000 – 2008 dalam Triliun Rupiah .....	68

Tabel 4.2	Data PDRB Propinsi Jawa Barat Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2000 – 2008 dalam Triliun Rupiah (Lanjutan) .....	69
Tabel 4.3.	Pajak Kabupaten/Kota dan PDRB Yang Mempengaruhinya .....	70
Tabel 4.4.	Retribusi Kabupaten/Kota dan PDRB Yang Mempengaruhinya .....	71
Tabel 4.5.	Sektor Usaha Penghasil PAD yang Terkait Dengan Sektor Pertanian ....	78
Tabel 4.6.	Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pengaruh Transfer Bersyarat .....	31
Gambar 2.2.	Pengaruh Transfer Tak Bersyarat .....	32
Gambar 3.1.	Konsentrasi Industri Manufaktur di Pulau Jawa .....	49
Gambar 3.2.	Konsentrasi Industri Manufactur di Pulau Jawa Berdasarkan Nilai Tambah .....	50



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasca jatuhnya pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari sentralistik kepada sebaliknya. Proses desentralisasi di bidang politik, administrasi pemerintahan dan fiskal bergulir cepat tidak lama setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Di lingkup kehidupan dunia, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menjalankan proses desentralisasi besar (*the big bang decentralisation*) di awal abad 21. Proses desentralisasi ini dimotori oleh banyak kekuatan politik, termasuk kekuatan politik regional (daerah).

Pada masa Orde Baru, walaupun Indonesia memiliki wilayah yang besar dengan banyak pulau dan etnis yang beragam, sistem politik, administrasi dan fiskal yang sangat terpusat. Kepala-kepala daerah, meski awalnya dipilih melalui proses pemilihan antar anggota parlemen, ditetapkan semata atas pertimbangan dan penilaian Presiden. Tata kelola (administrasi) pemerintahan secara dominant digariskan via Keputusan Presiden ataupun Keputusan Menteri, terutama Menteri Dalam Negeri. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain sebagian besar pembiayaannya berasal dari bantuan dan subsidi pemerintah pusat, arah alokasinya sebagian besar ditentukan oleh pusat. Melalui dana Inpres fiskal daerah langsung diarahkan alokasinya ke bidang-bidang yang dianggap penting oleh pemerintah pusat.

Sebagai gambaran tentang kondisi fiskal daerah ini, pada tahun fiskal 1996, pemerintah pusat mengumpulkan 94 persen dari pendapatan pemerintah secara umum (*general government*) dan sekitar 80 persen dari pengeluaran daerah dibiayai oleh transfer dari pusat, dalam bentuk bantuan dan subsidi. Sistem fiskal seperti ini amat memperlemah pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan terbaiknya. Pelayanan publik oleh pemerintah daerah tidak jarang tidak sejalan dengan preferensi masyarakatnya. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak berorientasi kepada preferensi masyarakat, tetapi preferensi yang dianggap penting oleh pemerintah pusat (terutama menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk mendukung tekad mewujudkan “kesatuan dan persatuan”, istilah atau moto yang

sangat diagungkan pada saat itu. Akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakatnya jauh lebih kecil daripada akuntabilitas ke pemerintah pusat. Ini semua membuat alokasi sumberdaya daerah (lokal) menjadi tidak efisien.

Akibatnya, kekecewaan masyarakat daerah terhadap pusat dari waktu ke waktu kian meningkat. Kekecewaan ini kemudian, pasca jatuhnya orde baru, memunculkan tuntutan akan pembagian kekuasaan yang lebih berimbang. Daerah tidak lagi menghendaki hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan juga sebagai aktor aktif penentu ke arah mana kehidupan bangsa menuju.

Sebenarnya, sejak masa orde baru masih kuat berkuasa kehendak daerah untuk serta dalam menentukan arah kehidupan bangsa via desentralisasi kewenangan telah tampak. Berbagai proposal baik dari para politisi daerah maupun pakar yang mengumandangkan perlunya desentralisasi telah dibuat dan diajukan –setidaknya sejak awal 1970-an (Delay et.al, 1995; Devas, 1997; Rohdehwold, 1995)<sup>1</sup>. Meski secara yuridis proposal itu sebagian ditampung via lahirnya UU No.5 Tahun 1974, namun pada kenyataannya apa yang tertuang di UU No. 5 Tahun 1974 itu tidak pernah diimplementasikan.

Karena itu, seiring dengan jatuhnya kepemimpinan Soeharto dan pergolakan politik pada tahun 1998, para politisi segera mengambil langkah besar, Desentralisasi di bidang politik, administrasi pemerintahan dan fiskal.segera dilakukan. Para politisi di tingkat pusat merespon penuh tuntutan daerah akan desentralisasi dan otonomi. Sidang parlemen (DPR) di bulan April 1999 menggulirkan dua undang-undang, yaitu Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999. Undang-undang yang pertama disebut dengan Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah, dan yang kedua disebut Undang-undang

---

<sup>1</sup> Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antardaerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini memuat butir-butir ketentuan mengenai kewenangan yang lebih besar bagi daerah baik di bidang politik, administrasi pemerintahan maupun fiskal. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa tanggal 1 Januari 2001 sebagai waktu efektif mulai dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.<sup>2</sup>

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting bagi negara besar seperti Indonesia. Para pendiri Negara Republik Indonesia telah menyadari akan pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah ini bagi kesatuan dan kemajuan bangsa. Para pendiri republik Indonesia paham bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai corak kehidupan ekonomi yang berbeda. Yang penting kemudian, untuk mengisi desentralisasi dan otonomi daerah ini, adalah para praktisi dan politisi daerah dengan sungguh hati berkemauan mengelola daerahnya secara baik. Di samping

---

<sup>2</sup> Undang-undang yang menjadi elemen utama dari desentralisasi adalah:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, propinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
- b. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.

Undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan administrasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 – dalam banyak hal melewati propinsi. Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan propinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Pergeseran konstitusional ini diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat) dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa block grant menjadi mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk pemeratakan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah Pusat juga akan berbagi penerimaan dari sumber daya alam — gas dari daratan (onshore), minyak dari daratan, kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain — dengan pemerintah daerah otonom.

suberdaya masyarakat daerah diupayakan mengarah pada kegiatan-kegiatan yang akan mensejahterakan rakyat daerah sendiri, melalui peraturan-peraturan daerah (yang dilahirkan melalui kesepakatan antara pemerintah dengan anggota parlemen daerah), juga keuangan pemerintah daerah harus dikelola sedemikian rupa, sehingga kesejahteraan masyarakat tadi makin terrealisasikan.

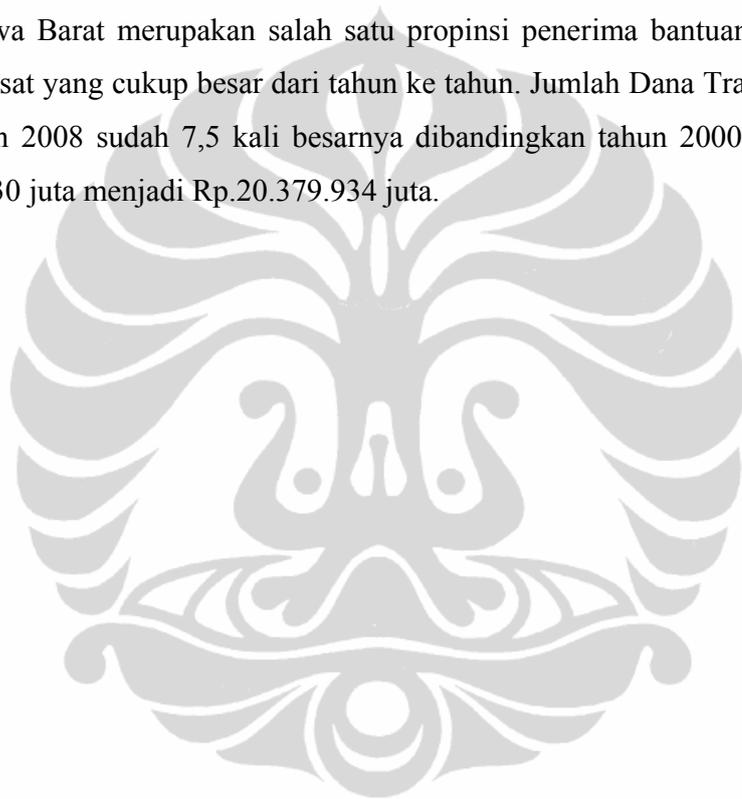
Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999, maupun undang-undang yang menggantikannya yakni Undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004, sama mengatakan bahwa di bidang fiskal, utamanya di bidang belanja, pemerintah-pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang ada padanya sesuai dengan prefrensinya, yang penting kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan alokasi tersebut. Di bidang penerimaan, untuk mendukung belanja tersebut, pemerintah-pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut sekitar 12 jenis pajak (7 jenis untuk pemerintah kabupaten/kota dan 5 jenis untuk pemerintah propinsi) dan lebih dari 20 jenis retribusi (yang kesemuanya digolongkan ke dalam tiga, yaitu: retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu) di samping jika kurang maka akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat (dalam bentuk bagi hasil, dana alokasi umum dan khusus).

Setelah kesemua undang-undang ini berjalan hampir satu dekade, total bantuan dana pemerintah pusat untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah ini mencapai hampir 30% anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat (APBN). Sekitar Rp 350 triliun dana APBN dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah dalam bentuk bagi hasil, DAU dan DAK (lihat RAPBN 2010). Dana ini cukup besar, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat di era orde baru, meski dalam ukuran rasio terhadap total APBN. Sejumlah daerah, utamanya yang mendapat bagian bagi hasil besar –khususnya daerah-daerah penghasil sumberdaya alam, terutama migas dan tembaga—bagai mendapat durian runtuh dari ketentuan Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 serta undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 ini.

Perolehan bantuan dana yang besar dari pemerintah pusat telah menguatirkan banyak pihak. Salah satu kekuatairan tersebut adalah, terutama daerah-daerah yang mendapat dana bantuan besar itu, akan tidak terdorong untuk meningkatkan perolehan PAD-nya. Logika sederhananya adalah: untuk apa bersusahpayah meningkatkan PAD

jika kebutuhan belanjanya sudah dapat ditutup oleh bantuan dari pemerintah pusat.<sup>3</sup> Logika seperti ini meski rasional namun tidak layak untuk dianut, sebab pertama, bukankah selama ini pemerintah-pemerintah daerah senantiasa tidak menginginkan ketergantungan (di bidang fiskal) yang amat besar kepada pemerintah pusat?. Kedua, dengan dianutnya logika tersebut berarti daerah tidak melaksanakan kewenangannya secara baik. Kewenangan yang luas, dengan dianutnya logika seperti ini, telah diiringi dengan upaya yang rendah untuk memikul kewenangan tersebut.

Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi penerima bantuan (transfer) dana pemerintah pusat yang cukup besar dari tahun ke tahun. Jumlah Dana Transfer yang diterima pada tahun 2008 sudah 7,5 kali besarnya dibandingkan tahun 2000 yaitu dari sebesar Rp.2.708.630 juta menjadi Rp.20.379.934 juta.



---

<sup>3</sup> Salah satu contoh yang mengatakan ini, misalnya: Nanga (2005). Dia mengatakan bahwa kebijakan pemberian dana transfer kepada Daerah dalam jumlah sangat besar justru akan menyebabkan munculnya kemalasan fiskal dikalangan pemerintah daerah untuk menggali PAD..

Tabel 1.1.  
Dana Transfer Yang Diterima Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat  
Tahun 2000 – 2008 (Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kab.Bandung	414,992	826,846	754,986	872,550	925,668	906,504	1,291,315	1,700,972	1,132,888
2	Kab.Bekasi	113,515	339,333	377,601	491,373	471,347	569,051	601,284	969,849	977,739
3	Kab.Bogor	189,689	560,267	622,495	640,705	804,367	784,152	990,037	1,182,448	1,336,033
4	Kab.Ciamis	143,946	325,986	390,280	483,168	487,697	468,792	804,759	901,417	1,014,825
5	Kab.Cianjur	125,187	326,686	374,557	434,964	465,081	499,675	781,717	930,333	1,000,784
6	Kab.Cirebon	124,444	324,133	359,559	475,780	456,893	503,833	753,258	801,519	875,787
7	Kab.Garut	159,344	397,202	435,635	520,662	531,622	618,423	925,947	1,084,710	1,176,756
8	Kab.Indramayu	114,478	265,058	328,994	420,794	438,380	500,838	734,829	864,528	865,651
9	Kab.Karawang	117,657	301,485	382,369	483,257	479,916	531,709	746,396	840,659	924,077
10	Kab.Kuningan	91,434	219,642	271,760	350,121	352,685	356,669	558,974	670,824	702,905
11	Kab.Majalengka	110,096	250,906	252,301	333,340	360,455	397,610	611,069	682,539	730,073
12	Kab.Purwakarta	66,340	161,156	205,761	225,684	266,681	264,705	401,530	465,783	507,422
13	Kab.Subang	102,180	263,771	305,106	404,208	418,596	425,826	649,618	789,013	835,630
14	Kab.Sukabumi	147,209	327,115	362,102	488,044	471,001	506,797	778,585	968,697	1,005,322
15	Kab.Sumedang	92,626	220,985	275,919	329,749	345,226	368,821	579,067	641,761	703,854
16	Kab.Tasikmalaya	165,782	405,511	368,461	447,612	436,414	448,732	743,356	871,108	912,657
17	KotaBandung	191,623	471,988	523,976	622,458	831,752	685,901	866,476	1,377,940	1,360,460
18	KotaBekasi	76,001	286,067	323,900	455,788	512,969	570,757	724,327	881,682	799,679
19	KotaBogor	66,786	182,033	214,647	295,064	276,615	289,110	390,618	457,401	520,207
20	KotaCirebon	47,393	120,493	166,184	454,011	190,616	187,851	362,592	380,267	436,898
21	KotaSukabumi	47,909	96,934	129,821	153,751	158,964	167,954	264,653	300,548	341,106
22	KotaDepok		149,758	217,788	337,705	321,323	340,252	428,046	629,660	593,140
23	KotaTasikmalaya			155,211	231,348	240,627	239,407	361,868	460,824	487,062
24	KotaCimahi			130,843	196,089	215,050	226,205	308,779	358,633	385,340
25	KotaBanjar					65,057	81,655	225,168	370,652	266,144
26	Kab.BandungBarat								-	487,494
	Jumlah	2.708.630	6.823.354	7.930.255	10.148.225	10.525.004	10.941.229	15.884.270	19.583.767	20.379.934

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sedangkan dilain pihak penerimaan PAD yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2008 tetap tidak berubah yaitu berkisar 12% sampai dengan 17% dibandingkan dengan besarnya Dana Transfer yang diterima.

Tabel 1.1.  
 PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat  
 Tahun 2000 – 2008 (Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kab. Bandung	50,367	78,717	82,546	99,761	109,582	108,322	137,533	147,631	144,138
2	Kab. Bekasi	22,587	52,505	106,088	100,753	219,115	150,018	172,660	196,320	249,064
3	Kab. Bogor	56,185	100,681	123,310	148,922	166,260	199,425	230,104	265,371	311,982
4	Kab. Ciamis	7,744	12,782	17,253	27,857	32,368	25,588	36,208	54,712	46,847
5	Kab. Cianjur	10,190	17,397	26,149	31,688	38,691	48,192	60,174	69,278	77,906
6	Kab. Cirebon	8,816	20,091	29,365	45,165	48,221	63,035	92,349	100,693	101,513
7	Kab. Garut	9,019	20,178	30,368	34,702	40,546	50,323	62,953	76,880	83,306
8	Kab. Indramayu	7,840	15,526	33,436	34,038	25,072	40,247	51,148	47,705	56,771
9	Kab. Karawang	24,902	48,672	62,317	67,664	69,476	83,437	112,760	121,415	131,785
10	Kab. Kuningan	5,626	12,095	16,497	20,511	25,314	31,149	35,733	43,508	42,825
11	Kab. Majalengka	6,774	13,191	23,395	23,867	25,304	32,270	50,043	46,021	45,670
12	Kab. Purwakarta	15,588	28,815	38,902	24,568	39,807	40,550	51,781	50,324	59,429
13	Kab. Subang	9,665	23,898	30,569	36,767	38,713	45,794	58,782	55,691	28,521
14	Kab. Sukabumi	12,253	23,992	32,903	32,228	29,805	40,633	53,645	66,799	87,402
15	Kab. Sumedang	16,152	28,241	38,507	41,752	50,119	58,787	63,455	69,607	81,634
16	Kab. Tasikmalaya	12,665	25,740	14,671	18,659	20,599	22,715	35,441	34,726	48,978
17	Kota Bandung	75,449	123,984	183,955	213,029	222,910	386,265	253,883	287,250	314,627
18	Kota Bekasi	31,095	52,177	73,219	85,883	97,578	126,067	145,731	171,045	189,493
19	Kota Bogor	14,647	26,787	31,174	41,454	50,644	66,707	69,300	79,643	97,767
20	Kota Cirebon	13,448	23,022	29,085	45,170	32,859	43,138	56,406	57,002	67,684
21	Kota Sukabumi	8,124	13,235	22,589	26,348	26,950	36,578	43,564	50,567	65,263
22	Kota Depok		27,942	34,502	42,581	54,467	66,879	67,218	86,346	112,763
23	Kota Tasikmalaya			21,301	26,394	30,778	38,582	37,357	58,605	60,822
24	Kota Cimahi			22,713	30,160	39,333	48,243	50,326	55,851	64,965
25	Kota Banjar					5,982	13,238	18,542	23,616	23,636
26	Kab. Bandung Barat								-	30,467
	Jumlah	419,138	789,668	1,124,813	1,299,922	1,540,493	1,866,184	2,047,094	2,316,604	2,625,258

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Di atas (bagian latar belakang) telah dikemukakan bahwa ada kekuatiran dari sejumlah pihak (pakar) bahwa penerimaan dana transfer (pemerintah pusat) yang besar oleh pemerintah daerah akan dapat mengakibatkan pemerintah-pemerintah daerah malas untuk menggali dengan baik sumber penerimaan daerahnya (PAD) sendiri; dengan kata lain, pemerintah-pemerintah daerah yang menerima transfer yang besar akan kurang berupaya untuk menggali sumber penerimaannya sendiri. Pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Propinsi Jawa Barat, secara keseluruhan, merupakan penerima dana transfer pemerintah pusat cukup besar.

Berdasarkan pada kenyataan ini maka pertanyaan yang dirasa penting menarik untuk ditemukan jawabannya pada tesis ini adalah: apakah benar bahwa kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat telah berupaya kurang dalam menggali (mengumpulkan) pendapatan asli daerahnya setelah otonomi dan desentralisasi daerah ini efektif dijalankan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud memeriksa tingkat upaya pengumpulan PAD (Pendapatan Asli Daerah) oleh pemerintah-pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya pemeriksaan ini digunakan untuk menguji hipotesis seperti yang dikemukakan di sub-bab 1.4

## **1.4 Hipotesis Penelitian.**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: karena kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat pada umumnya menerima transfer dana pemerintah pusat yang cukup besar maka pada umumnya pula (sebagian besar) kabupaten/kota ini akan berupaya kurang dalam menggali PAD-nya ketimbang yang semestinya (kapasitasnya).

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Seperti di katakan di atas bahwa alasan utama dilakukannya kajian atas upaya PAD di kabupaten-kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat adalah karena secara keseluruhan Kabupaten-kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Barat ini telah menerima

transfer dana dari Pemerintah Pusat yang cukup besar. Selain daripada itu, mengingat Propinsi Jawa Barat ini lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, maka tentu kapasitas PAD-nya tidaklah kecil. Apakah kapasitas PAD yang cukup besar ini telah didiupayakan digali dengan baik?, inilah yang menjadi pertanyaan menarik untuk dikaji.. Dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk tahun penelitian dipilih tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 karena pada saat pada kurun waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk mengukur upaya dan kapasitas pajak karena otonomi telah berjalan selama sembilan tahun yang dianggap dapat mewakili kondisi yang sebenarnya.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan, sejumlah rekomendasi baik kepada Pemerintah Pusat maupun kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dapat diajukan. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat terutama adalah dalam hal mempertimbangkan pemberian bantuan (transfer) kepada kabupaten-kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Rekomendasi kepada kabupaten-kabupaten dan kota adalah dalam hal mengupayakan penggalian PAD agar sama dengan kapasitasnya.

### **1.7. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode regresi multivariabel. Metode ini telah cukup banyak digunakan, di antaranya oleh: Tuan Minh Le (2008), Blanca Moreno-Dodson & Jeep Rojchaichaningthorn (2008), dan *Richard M. Bird, Jorge Martinez-Vazquez, Benno Torgler* (2004).

### **1.8. Sistematika Penulisan**

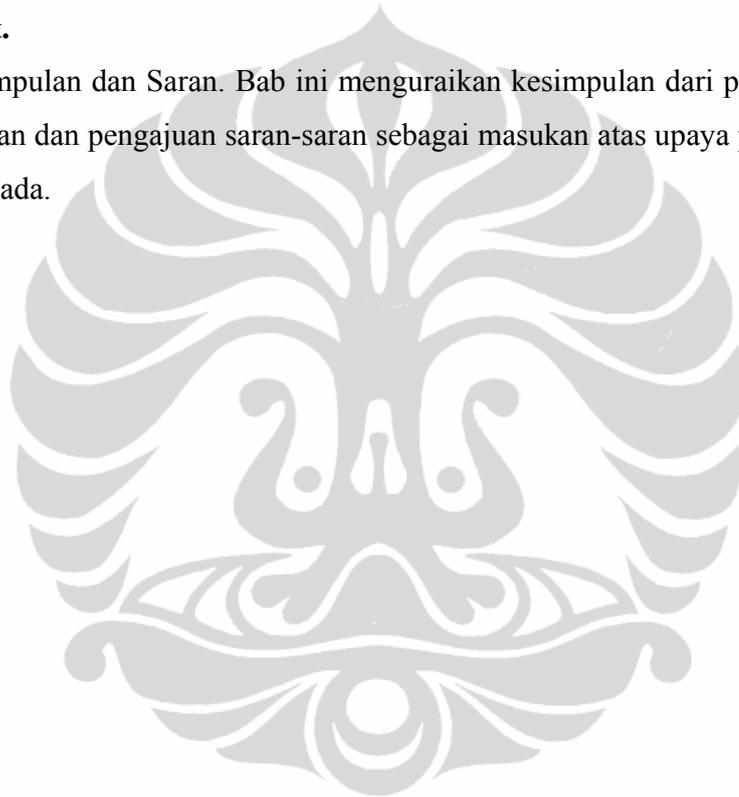
Bab 1 Pendahuluan. Bab ini menguraikan Latar Belakang, Sistematika Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 Arti dan Pengukuran Upaya PAD: Tinjauan Literatur. Bab ini menguraikan arti upaya PAD, cara mengukur kapasitas dan upaya PAD, dan tinjauan literatur atas penelitian sebelumnya.

Bab 3 Otonomi Daerah di Indonesia dan Transfer Dana Pusat Ke Daerah Di Seluruh Indonesia Khususnya Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. Bab ini menguraikan otonomi daerah di Indonesia, transfer dana pusat ke daerah di seluruh Indonesia, dan PAD dan Dana Transfer ke Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

Bab 3 Kapasitas dan Upaya PAD Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat 2000 - 2008. Bab ini menguraikan model analisis dan uji ekonometrika atas kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat serta Pengukuran Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan analisis permasalahan dan pengajuan saran-saran sebagai masukan atas upaya pemecahan permasalahan yang ada.



## BAB 2

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 Arti Upaya PAD

Dalam banyak literatur, utamanya jurnal ilmiah keuangan negara, yang kerap dikaji para pakar –ketika mereka memperbincangkan keuangan pemerintah-- adalah upaya pajak (*tax effort*). Memang, pada umumnya pungutan pajak mendominasi pungutan pemerintah yang berasal dari dalam negeri (atau untuk kasus pemerintah daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri/PAD). Sehingga meski ada pungutan lain yang bukan pajak, membicarakan pungutan pajak berarti membicarakan porsi besar pungutan pemerintah. Bertolak dari sini, pada hakekatnya, mengartikan upaya PAD, untuk kasus pemerintah daerah, adalah analog dengan mengartikan upaya pajak itu. Dengan kata lain, cara untuk mengukur upaya PAD dapat secara sama dilakukan seperti para pakar itu mengukur upaya pajak.

Upaya pajak, menurut para pakar tersebut, menurut Bahl (1971:580) Upaya pajak adalah rasio penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak dan dapat didefinisikan sebagai keleluasaan (lingkup) kapasitas pajak yang digunakan sedangkan menurut Prest (1978:21) bahwa kapasitas pajak dapat diukur dengan pendekatan rasio pajak terhadap GNP seperti apa yang diperkirakan dengan menggunakan persamaan regresi, sedangkan upaya pajak adalah indeks yang diperoleh dengan membagi antara rasio pajak aktual terhadap GNP dengan rasio yang diperkirakan, sehingga upaya pajak adalah ukuran yang menunjuk seberapa besar instansi pajak telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dibanding dengan kemampuannya (*tax capacity*). Kemampuan memungut pajak ini sendiri adalah ukuran yang menunjuk besarnya perolehan pajak yang semestinya dapat diraih oleh instansi pajak bila ia memanfaatkan seluruh potensinya. Dengan kata lain, kemampuan memungut pajak (*tax capacity*) adalah jumlah maksimum penerimaan pajak yang semestinya dapat ia kumpulkan, sudah tentu pemungutannya dilandasi undang-undang yang berlaku dan dengan sistem yang telah diatur oleh undang-undang—dengan memanfaatkan/mempekerjakan SDM, sarana dan prasarana yang ada secara maksimal (namun dalam batasan waktu kerja normal). Bila penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh instansi pajak ini lebih rendah dari kemampuannya yang disebut

terakhir ini, maka dikatakan bahwa upaya instansi pajak dalam memungut/mengumpulkan pajak itu kurang. Dengan ini, upaya pajak mesti lebih ditingkatkan lagi di waktu berikutnya.

Dengan demikian, untuk mengetahui kapasitas dan upaya pajak hal pertama yang perlu diketahui adalah menilai besarnya kemampuan kerja dari SDM, sarana dan prasarana yang ada/dimiliki instansi pajak. Setelah pengetahuan ini diperoleh maka perhitungan kapasitas dan upaya pajak mudah dilakukan.

Kemampuan memungut pajak atau kapasitas pajak tidaklah sama dengan potensi pajak (*potency of tax revenue*). Potensi pajak lebih menunjuk pada jumlah penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh instansi pajak dengan berpijak pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Memang sebaiknya seluruh potensi pajak dapat dipungut oleh potensi pajak, atau kapasitas pajak sama dengan potensi pajak. Namun, dalam banyak hal, karena keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana seringkali kapasitas pajak ini di bawah potensinya. Jadi bila hubungan antara kapasitas pajak dengan potensi pajak ini dinyatakan dalam sebuah persamaan matematik, persamaannya adalah:

$$(CAPTAX)_t = \alpha (POTTAX)_t$$

Di mana:

$(CAPTAX)_t$  : Kapasitas Pajak (*Tax Capacity*) pada tahun  $t$ ;

$(POTTAX)_t$  : Potensi Pajak (*Potency*) pada tahun  $t$ ;

$\alpha$  : sebuah kostanta yang besarnya di antara 0 sampai dengan 1

$\alpha$  sama dengan nol berarti seluruh potensi pajak tidak dapat dipungut oleh instansi pajak, sedang  $\alpha$  sama dengan satu berarti seluruh potensi pajak dapat dipungut oleh instansi pajak. Besarnya  $\alpha$  ini ditentukan oleh kemampuan kerja SDM, sarana dan prasarana yang ada atau dimiliki instansi pajak.

Dari sini, maka upaya pajak dapat dirumuskan:

$$(TAXEFF) t = (RETAXREV) t / CAPATAX) t$$

Di mana:

(TAXEFF) t : Upaya pajak (*Tax Effort*) pada tahun t

(RETAXREV)t : Realisasi Penerimaan pajak (*Realized tax revenue*) pada tahun t

Potensi pajak itu sendiri, seperti dikatakan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$(POTTAX)t = (\sum_i \sum_j r_j B_j)$$

Di mana:

$r_j$  : Tarif Pajak j (*Rate of j th Tax*);

$B_j$  : Nilai Basis Pajak j (*Value of jth Tax*)

Analog dengan semua uraian di atas, maka upaya PAD adalah ukuran yang menunjukkan sampai seberapa besar usaha instansi pajak pemerintah daerah dalam memungut pajak dibandingkan dengan kapasitasnya. Kapasitas PAD adalah jumlah maksimum PAD yang dapat dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemampuan SDM, sarana dan prasarana yang dimilikinya, dan pemungutannya tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku serta dengan waktu kerja normal. Potensi PAD adalah jumlah maksimum PAD yang dapat –lebih tepatnya boleh- dikumpulkan oleh pemerintah daerah didasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2.2. Cara Mengukur Upaya PAD

Mengukur kapasitas dan upaya pajak, dan dengan demikian juga PAD, dengan terlebih dulu melakukan perhitungan terhadap kemampuan kerja SDM, sarana dan prasarana cukup sulit dilakukan. Meski cara ini merupakan cara terbaik, namun karena sulitnya maka sejumlah pakar telah menempuh cara lain. Cara lain (alternatif) ini adalah dengan menggunakan standar tertentu. Standar tersebut adalah rata-rata dari sejumlah pemerintah acuan. Namun rata-rata yang dimaksud bukanlah rata-rata hitung biasa, melainkan rata-rata yang menggunakan indikator tertentu, yang dianggap setidaknya pemerintah-pemerintah daerah mesti memenuhi indikator tersebut. Setidaknya ada dua

cara perhitungan kapasitas dan upaya pajak (atau PAD) melalui cara alternatif ini, yaitu: yang pertama, Sistem Pajak atau PAD yang Representatif (*Representative Tax or PAD System*), dan yang kedua, cara regresi.

### 2.2.1 Cara Representative Tax/PAD Ssystem

Cara ini digunakan di Amerika Serikat oleh Komite Hubungan Antar Pemerintah Pusat dengan Daerah (*American Intergovernmental Relation Committee, di singkat ACIR*) Di Amerika Serikat komite ini berfungsi seperti Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Indonesia. Tugas utama komite ini adalah melakukan kajian-kajian tentang hubungan fiskal pemerintah pusat dengan daerah serta memberi masukan-masukan kepada pemerintah pusat perihal bagaimana semestinya hubungan fiskal tersebut dilaksanakan..

Cara representative tax system, sering disingkat RTS, menilai bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat menerapkan tarif pemungutan pajak, secara efektif, sama dengan rata-rata tarif pungutan pajak itu untuk seluruh daerah acuan (daerah yang diperbandingkan) Dengan kata lain, rata-rata tarif efektif pajak inilah yang menjadi indikator dalam perhitungan kapasitas dan upaya pajak. Dalam uraian sederhana cara ini dapat dipaparkan seperti berikut: misalkan ada 5 daerah acuan, yaitu: A, B, C, D dan E; dann kita ingin menghitung kapasitas serta upaya pajak daerah F. Pajak yang akan kita hitung kapasitas dan upayanya ini misalkan pajak penerangan jalan umum, yang pengenaan pajaknya didasarkan pada nilai penggunaan listrik (rekening listrik) para pelanggannya. Misalkan pula bahwa setiap pelanggan listrik, di semua daerah, berada dalam kelas penggunaan listrik yang sama menurut struktur tarif penggunaan listrik. Jadi kalau struktur tarif itu, misalkan: Rp 250,-/watt untuk penggunaan 0 sampai dengan 350 watt; Rp 400,-/watt untuk penggunaan 351 sampai dengan 500 watt; Rp 600,- untuk penggunaan 501 sampai dengan 750 watt dan seterusnya. Katakan dalam contoh kita ini, para pelanggan itu semuanya berada dalam kelas penggunaan 501 sampai dengan 750 watt, jadi semua pelanggan berada dalam kelas struktur tarif yang sama. Dan jika penerimaan pajak penerangan jalan ini untuk daerah yang ke  $i$  adalah  $R_i$ , dan nilai penggunaan listrik adalah  $NCE_i$  seperti terlihat pada tabel 2.1 maka langkah pertama untuk menghitung kapasitas pajak masing-masing daerah adalah menghitung tarif efektif masing-masing, yaitu  $R_i/NCE_i$ ; kemudian menghitung tarif efektif rata-rata untuk semua

daerah, yaitu:  $\Sigma Ri / \Sigma NCEi$ ; dan untuk menghitung kapasitas pajaknya adalah dengan mengalikan rata-rata tarif efektif tersebut dengan nilai penggunaan listriknya (NCEi).

Upaya (pungutan)pajak penerangan jalan di masing-masing daerah, sudah tentu, seperti telah diuraikan terdahulu adalah rasio atau persentase realisasi penerimaan pajaknya, untuk masing-masing daerah, terhadap kapasitasnya (lihat contoh di tabel 2.1).

**Tabel 2.1**  
**Total Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Nilai Penggunaan Listrik di Enam Daerah**

<u>Daerah</u>	<u>Ri</u> (Milyar Rp)	<u>NCEi</u> (Juta Rp)	<u>TEi</u>	<u>CAPi</u>	<u>Efi</u>
<u>A</u>	<u>Ra</u>	<u>NCEa</u>	<u>Ra/NCEa</u>	<u>RTE . NCEa</u>	<u>Ra/CAPa</u>
<u>B</u>	<u>Rb</u>	<u>NCEb</u>	<u>Rb/NCEb</u>	<u>RTE. NCEb</u>	<u>Rb/CAPb</u>
<u>C</u>	<u>Rc</u>	<u>NCEc</u>	<u>Rc/NCEc</u>	<u>RTE . NCEc</u>	<u>Rc/CAPc</u>
<u>D</u>	<u>Rd</u>	<u>NCEd</u>	<u>Rd/NCEd</u>	<u>RTE. NCEd</u>	<u>Rd/CAPd</u>
<u>E</u>	<u>Re</u>	<u>NCEe</u>	<u>Re/NCEe</u>	<u>RTE. NCEe</u>	<u>Re/CAPe</u>
<u>F</u>	<u>Rf</u>	<u>NCEf</u>	<u>Rf/NCEf</u>	<u>RTE. NCEf</u>	<u>Rf/CAPf</u>
<u>Rata-rata Tarif Efektif (RTE)</u>			<u><math>\Sigma Ri / \Sigma NCEi</math></u>		

Keterangan:

- Ri : Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Daerah i;
- NCEi : Nilai Penggunaan Listrik para pelanggan di daerah i
- Tei : Besarnya Tarif Effektiv Pajak Penerangan Jalan di Daerah i;
- Capi : Kapasitas Punguan Pajak penerangan jalan di Daerah i;
- Efi : Upaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Daerah i.

Menggunakan metode ini, meski dari sisi perhitungannya amat mudah, namun cukup sulit dalam penerapan (prakteknya). Kesulitan utama cara ini adalah mendapatkan informasi/data tentang nilai basis pajaknya. Meski cara ini menyarankan dalam ketiadaan data tentang nilai basis pajak itu peneliti dapat menggunakan sesuatu yang dapat mewakili (*represent*) nilai basis pajak itu, tetap saja memilih sesuatu yang mewakili nilai basis pajak tersebut tidaklah mudah. Kesulitan menjadi kian bertambah ketika setia jenis pajak memiliki struktur tarif (tarifnya berstruktur).

### 2.2.2. Cara Regresi

Cara yang disebut terakhir ini mungkin merupakan cara yang termudah bagi akademisi. Para akademisi yang berlatar belakang ilmu ekonomi –termasuk ilmu sosial lainnya—cukup paham dengan ilmu statistik inferens, karenanya tidak sulit menggunakan cara ini. Kemudahan cara ini, lebih-lebih lagi, dengan telah menyebarkan alat hitung canggih personal komputer (PC).

Dalam perhitungan kapasitas dan upaya pajak menggunakan regresi umumnya variabel tergantungnya adalah rasio pajak terhadap GDP atau GNP (dalam kasus studi upaya pajak nasional), atau PDRB (dalam kasus studi upaya pajak pemerintah daerah), sedangkan variabel-variabel bebasnya adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kemudahan (pemerintah) dalam memungut pajak (*tax handle*). Jadi persamaan umum regresinya adalah:

$$(T/Y)_{it} = f(\text{variables of tax handle}_{it}, (\text{error term})_{it})$$

Di mana:

(T)<sub>it</sub> : Total penerimaan Pajak pemerintah i pada tahun t;

(Y)<sub>it</sub> : GDP atau GNP atau GDRP Negara atau Daerah i pada tahun t

Variabel-variabel *tax handle* misalnya: pendapatan per kapita, sumbangan sektor industri terhadap GDP atau GNP atau GDRP, sumbangan sektor pertanian GDP atau GNP atau GDRP, tingkat keterbukaan ekonomi, dan sebagainya. *Error term* menunjukkan jauhnya nilai realisasi penerimaan pajak pemerintah atau daerah i terhadap nilai harapan (regresinya). Semakin besar nilai error dianggap semakin kecil kemauan politik untuk mendukung keberhasilan menggali pungutan pajak tersebut.

Akan halnya rasio (T/Y)<sub>it</sub> yang digunakan sebagai variabel tergantungan (*dependend*) tidak lain karena, banyak analis keuangan publik secara gampang membandingkan rasio ini (*tax ratio*) sebagai petunjuk apakah upaya pemungutan pajak di suatu negara atau daerah lebih tinggi atau rendah dibandingkan dengan negara atau daerah lain. Misalnya, pada tahun 2009 yang lalu rasio penerimaan pajak pemerintah Indonesia adalah 13%, sedang Singapura 16,5% dan Malaysia 15%. Atas dasar angka ini, banyak analis –termasuk anggota DPR-RI, menilai bahwa upaya pajak pemerintah

Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Padahal kesimpulan seperti ini bisa menyesatkan, karena penilaian ini tidak mempertimbangkan tentang sulitnya memungut pajak di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Memungut dan mengumpulkan penerimaan pajak di Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan dengan di Singapura dan Malaysia, karena misalnya: pertama, wilayah Indonesia jauh lebih luas daripada Malaysia dan Singapura; kedua, penduduk Indonesia relatif terpencar-pencar dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia; ketiga, tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia; keempat, bagian penduduk yang bekerja di sektor pertanian – yang umumnya merupakan sektor informal dan dipedesaan—jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Singapura dan Malaysia; dan sebagainya. Jadi, merupakan upaya perbandingan yang tidak *fair* bila analisis hanya membandingkan besarnya rasio pajak saja untuk mengatakan apakah upaya pemerintah Indonesia lebih tinggi atau lebih rendah daripada lainnya. Upaya yang lebih *fair* dalam perbandingan itu adalah dengan juga dengan mempertimbangkan kemudahan memungut pajaknya (*tax handle*).

Dalam makalah yang disampaikan oleh Dr Robert A Simanjuntak, Kapasitas Fiskal dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya yang diekspresikan dalam wujud kebutuhan fiskal tersebut, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Sedangkan Estimasi Kapasitas Fiskal dilakukan dengan Sebagaimana halnya dengan kebutuhan fiskal, ada banyak cara untuk mengukur kapasitas fiskal. Di sebagian negara-negara maju, kapasitas fiskal diperkirakan dengan menggunakan basis pajak-pajak utama dan tingkat tarif pajak standar (rata-rata). Metoda ini mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dari penerimaan yang dapat dihimpun seandainya daerah tersebut memajaki semua basis pajak standarnya dengan upaya pajak (*tax effort*) yang standar pula. Bentuk umum dari formulanya adalah:

$$C_i = \sum_j B_{ij} * t_j$$

dimana  $C_i$  adalah kapasitas pajak (tax capacity) daerah  $i$ ,  $B_{ij}$  adalah basis pajak ke- $j$  daerah  $i$ , dan  $t_j$  adalah standar (misalnya: efektif rata-rata nasional) tingkat tarif pajak dari basis pajak ke- $j$ . Adalah penting untuk memakai tingkat pajak standar (nasional) ketimbang tingkat pajak efektif daerah yang bersangkutan, untuk menghindari terjadinya “hukuman” terhadap daerah yang memiliki upaya pajak (tax effort) tinggi dan merangsang (encourage) daerah yang tax effortnya rendah. Dengan kata lain, apabila tingkat pajak efektif suatu daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional, transfer yang diterimanya tidak menjadi berkurang; dan bila tingkat pajak efektif daerah lebih rendah dari rata-rata nasional, transfer yang diperolehnya tidak menjadi bertambah.

Dengan metode regresi ini maka kapasitas pajak suatu negara atau pemerintah daerah dinilai sama dengan nilai hasil regresi (harapannya), sedangkan upaya pajaknya adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapan tersebut. Berikut ini adalah persamaan-persamaan yang pernah dilakukan oleh sejumlah pakar untuk menghitung kapasitas dan upaya pajak di sejumlah negara

1. Penelitian Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichanthorn pada tahun 2008.

Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichanthorn secara khusus menjelaskan bahwa kondisi suatu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tingkat ketergantungan menurut usia yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menekan kapasitas pajak negara yang bersangkutan.

$$Y_{it} = f(GDP_{it}, POP_{it}, TRADE_{it}, AGR_{it}, CORR_{it}, BUREAU_{it}).$$

Penelitian mengenai estimasi kapasitas pajak lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh John. D. Wong pada tahun 2004. Penelitian tersebut berfokus pada pengukuran kapasitas pajak yang bersifat regional pada suatu negara, bukan kapasitas pajak antar negara, seperti yang dilakukan oleh Tuan Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichanthorn. Penelitian yang dilakukan John. D. Wong menyangkut dampak fiskal dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap kapasitas penerimaan daerah dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berhubungan sebagai sumber ekonomi, khususnya pada *property tax*

*capacity* lokal. Menurut John. D. Wong, kapasitas pajak didefinisikan sebagai berikut:

$$\text{Tax Capacity} = \text{Actual Tax Base} \times \text{Average Tax Rate.}$$

2. Penelitian yang dilakukan oleh *Richard M. Bird, Jorge Martinez-Vazquez, Benno Torgler* *Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability*,

Untuk menguji apakah pemerintah mengukur Kapasitas Pajak digunakan persamaan dasar sebagai berikut:

$$TE_i = \alpha + \beta_1 Y_i + \beta_2 POP_i + \beta_3 XMI_i + \beta_4 NAGR_i + \beta_5 GOVQ_i + REGION_i + \varepsilon_i$$

dimana Indeks Upaya Pajak menunjukkan tingkat negara upaya pajak diukur ebagai penerimaan pajak sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB),  $Y_i$ , GDP per kapita (diukur dalam Dollar Amerika Serikat),  $POP_i$  tingkat populasi pertumbuhan, rasio ekspor plus impor XMI terhadap PDB, pangsa PDB non Nagri dan pertanian  $GOVQ_i$  merupakan indikator akuntabilitas dan korupsi.  $REGION_i$  adalah variabel dummy yang membedakan antara lain Amerika Latin dan negara-negara berkembang atau transisi.  $\varepsilon_i$  menunjukkan istilah kesalahan. Model ini diestimasi dengan menggunakan data cross-section dengan nilai rata-rata untuk tahun 1990-1999. Data untuk variabel dependen dan semua variabel kontrol berasal dari World Development Indicators (WDI) untuk tahun 2003.

Secara empiris dilakukan dengan memeriksa peran dari variabel-variabel sisi penawaran Upaya Pajak. Per kapita GDP adalah proxy untuk tingkat pembangunan suatu negara. Sebuah tingkat yang lebih tinggi pembangunan berjalan bersama-sama dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk membayar dan mengumpulkan pajak, serta permintaan yang relatif lebih tinggi untuk barang pendapatan masyarakat elastis dan jasa (Chelliah 1971, Bahl 1971). usaha pada umumnya, dengan harapan terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan tingkat pajak.

Pada bagian empiris dengan memeriksa peran dilakukan dengan menguji secara lietaratur dari variabel-variabel sisi penawaran upaya pajak. Variabel penjelas yang digunakan dalam model didalam literatur upaya pajak. PDB per

kapita adalah proxy untuk tingkat perkembangan suatu negara. Yang lebih tinggi tingkat pembangunan berjalan bersama-sama dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk membayar dan mengumpulkan pajak, serta permintaan yang relatif lebih tinggi untuk barang-barang pendapatan masyarakat elastis dan jasa (Chelliah 1971, Bahl 1971). Secara umum, diharapkan hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan tingkat upaya pajak.

Karakteristik demografi juga dapat menjadi faktor penting dalam usaha pajak. Bahl (2003, hal 13) menunjukkan, di negara-negara dengan populasi yang tumbuh maka sistem pajak dapat tertinggal dalam menangkap wajib pajak baru. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk negatif berkaitan dengan tingkat upaya pajak.

Variabel penjelas yang paling tradisional dalam literatur upaya pajak adalah mereka mengendalikan struktur ekonomi suatu negara. Variabel ini mencerminkan gagasan bahwa ketersediaan 'pajak menangani' seharusnya mempengaruhi tingkat upaya pajak. Sebagai contoh, pajak perdagangan sering menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di negara-negara kurang berkembang karena mereka lebih mudah untuk mengumpulkan dari pajak penghasilan. Kami mengukur ketersediaan pajak ini ditangani oleh keterbukaan, yang didefinisikan sebagai jumlah ekspor dan impor sebagai bagian dari GDP. Rasio pajak diharapkan akan positif berkaitan dengan derajat keterbukaan ekonomi. Komposisi sektoral dari produk domestik juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk pajak. Ukuran tradisional sinyal kesulitan untuk output pajak dalam negeri adalah bagian dari pertanian dalam GDP. Beberapa berpendapat bahwa sektor pertanian tidak jauh lebih sulit untuk pajak (Bahl 2003), tetapi kepentingan yang lebih besar relatif dalam perekonomian suatu negara yang lebih rendah harus menghabiskan kegiatan pemerintahan dan pelayanan, karena banyak kegiatan sektor publik kota berbasis (Tanzi 1992). Selain itu, untuk alasan politik beberapa negara dibebaskan dari pajak bagian besar kegiatan pertanian.

Sebuah kontribusi sektor non-pertanian yang lebih tinggi dalam PDB sehingga harus menghasilkan rasio pajak yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini terdapat kecenderungan bahwa koefisien estimasi untuk variabel-variabel penjelas

yang sejalan dengan prediksi dan sebagian besar bertepatan dengan temuan sebelumnya dalam literatur. Tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih cepat menyebabkan rasio pajak yang lebih rendah. Sebuah saham yang lebih tinggi dari sektor non-pertanian berkorelasi dengan upaya pajak yang lebih tinggi. Koefisien untuk GDP per kapita tidak memiliki tanda diprediksi, tetapi hasilnya sesuai dengan penelitian sebelumnya. Namun, keterbukaan ekonomi tidak terkait dalam hasil kami dengan pajak yang lebih tinggi menarik, dengan mengamati bahwa Amerika Latin yang memiliki rasio pajak yang lebih rendah secara statistik signifikan dibandingkan negara berkembang lainnya.

Model upaya dasar yang telah mengabaikan peran faktor permintaan dalam menjelaskan kinerja pendapatan relatif. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2003) menggunakan kumpulan data untuk mengukur suara dan akuntabilitas dan lembaga (hasil). Suara variabel dan indeks akuntabilitas termasuk di dalamnya beberapa indikator yang mengukur berbagai aspek dari proses politik, kebebasan sipil dan hak politik.

Variabel yang mengukur sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemerintah. Indeks ini juga mencakup tiga indikator yang mengukur kemerdekaan media sebagai proxy pemantauan wewenang dan menahan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Korupsi mengukur variabel persepsi korupsi menggunakan definisi konvensional korupsi yaitu pelaksanaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Indeks ini dikembangkan dari berbagai sumber meliputi aspek yang berbeda yang berkisar dari frekuensi 'Pembayaran tambahan untuk menyelesaikan sesuatu' terhadap dampak korupsi terhadap lingkungan bisnis (Kaufmann et al 2003, Hal. 8). Kaufmann et al. (2003) menekankan bahwa 'kehadiran korupsi sering merupakan manifestasi dari kurangnya penghormatan baik dari koruptor (biasanya seorang warga sipil) dan rusak (biasanya seorang pejabat publik) untuk aturan yang mengatur interaksi mereka, dan karenanya merupakan kegagalan pemerintahan menurut definisi kita '(hal. 8).

Karena korelasi tinggi (0,57) antara Korupsi dan variabel suara dan akuntabilitas, kami menggunakan dua set indeks di estimasi alternatif dalam

persamaan 2 dan 3. Dalam persamaan 4 kami menyertakan kedua variabel dalam spesifikasi yang sama. Relatif Peran yang dimainkan oleh faktor permintaan demikian pula halnya dengan faktor penawaran diselidiki dengan estimasi koefisien regresi beta atau standar. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor penentu sisi permintaan ini sangat relevan dalam menjelaskan kinerja pajak dalam transisi dan negara-negara berkembang. Kedua variabel secara statistik signifikan selalu menunjukkan koefisien beta yang relatif tinggi, sebanding atau bahkan lebih tinggi daripada faktor penawaran tradisional. Dengan demikian, hasil ini sangat empiris menunjukkan bahwa korupsi dan suara dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam penentuan tingkat upaya pajak negara-negara berkembang dan transisi. Peran bersama dimainkan oleh faktor-faktor ini permintaan dapat diteliti menggunakan Wald-test untuk pembatasan koefisien untuk menguji signifikansi bersama.

Hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa faktor permintaan memainkan peran penting dalam penentuan kinerja pajak negara. Meskipun faktor penawaran konvensional terus memainkan peran yang kuat dan signifikan di seluruh estimasi, faktor permintaan jelas materi. Hasil ini memberikan dukungan kepada hipotesis bahwa kesediaan masyarakat untuk pajak sendiri tergantung pada persepsi bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang jujur dan responsif dan bahwa ada lingkungan sektor yang adil dan diprediksi publik. Hasilnya adalah bahwa negara-negara Amerika Latin menunjukkan kinerja pajak konsisten lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan transisi. Ini lagi menyediakan dukungan statistik untuk argumen-argumen yang dikembangkan dalam bagian sebelumnya dari kertas yang menjelaskan mengapa negara-negara Amerika Latin mengalami kesulitan untuk meningkatkan upaya pajak.

Sebuah masalah yang jelas dengan pendekatan di atas adalah bahwa dua variabel permintaan kita mungkin endogen. Misalnya, lembaga-lembaga yang lebih baik dapat mengakibatkan kinerja pajak lebih baik, tapi pada gilirannya, kinerja pajak miskin dapat mengurangi kemungkinan membangun atau mempertahankan berfungsi dengan baik lembaga-lembaga di negara berkembang. Penelitian Alesina et al. (2003) dan La Porta et al. (1999) menyarankan faktor-

faktor seperti etnis, bahasa dan fractionalization agama atau asal hukum. Kedua negara studi yang fractionalization yang mengarah pada ketidakstabilan politik, rendahnya kualitas lembaga, yang didesain dengan buruk kebijakan ekonomi dan kinerja ekonomi mengecewakan. Sebagai instrumen, kita mengambil indeks yang mencakup etnis, bahasa dan agama fractionalization (rata-rata nilai) berdasarkan dkk Alesina. (2003) kumpulan data. Sebagai instrumen kedua kita mempertimbangkan asal-usul hukum negara (hukum asal dummy bahasa Inggris umum) dengan menggunakan La Porta et al. (1999) kumpulan data. Ide di balik menggunakan hukum sebagai instrumen asal adalah kenyataan bahwa sistem hukum diperoleh berabad-abad yang lalu sebagai bagian dari sistem politik. La Porta et al. (1999) menekankan bahwa hukum umum Inggris mulai berkembang di abad ke-17 karena maksud membatasi kekuasaan negara / berdaulat dan karenanya juga kemungkinan korupsi, menekankan, misalnya, kuat aspek-aspek seperti hak milik. Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen yang efektif dalam menjelaskan faktor permintaan.

Para regresi tahap pertama menunjukkan sebagian besar instrumen statistik signifikan pada tingkat 5% atau 1. F-tes untuk instrumen pengecualian diatur dalam regresi tahap pertama secara statistik signifikan dalam kasus pertama pada tingkat 1%. Dengan menggunakan korelasi kanonik LR Anderson menguji apakah persamaan tersebut diidentifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis nol dapat ditolak menunjukkan bahwa model diidentifikasi dan instrumen yang relevan. Uji Anderson-Rubin menunjukkan bahwa variabel endogen bersama-sama secara statistik signifikan.

Pada pengujian atas hubungan antara kualitas tata pemerintahan dan usaha pajak di negara berpenghasilan tinggi dengan menggunakan definisi Bank Dunia (lihat <http://www.worldbank.org/>.) dalam kurun waktu 1998 dan 2000 (panel tidak seimbang).

Hasilnya adalah penentu sisi permintaan sangat relevan dalam menjelaskan kinerja pajak di negara-negara berpenghasilan tinggi. Kedua variabel, kontrol korupsi dan suara dan akuntabilitas secara statistik signifikan dalam dua regresi pertama menunjukkan koefisien beta tinggi dan laporan Wald-

test bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak. Menariknya, suara dan akuntabilitas memiliki dampak yang lebih kuat terhadap kinerja pajak dari korupsi. Ini juga terlihat dalam regresi terakhir ketika kedua faktor termasuk bersama dalam spesifikasi. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan peran kuat dari suara dan akuntabilitas di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebagai contoh, Torgler dan Schneider (2007) menemukan dengan data Swiss yang penghindaran pajak dan ekonomi bayangan lebih rendah dalam kanton dengan tingkat yang lebih tinggi dari kontrol politik langsung. Torgler (2005) menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi demokrasi langsung dalam yurisdiksi mengarah ke peningkatan kesediaan untuk membayar pajak. Feld dan Frey (2002) juga mengamati bahwa perbedaan perlakuan terhadap pembayar pajak oleh otoritas pajak adalah kunci, berdasarkan hasil empiris mereka menggunakan juga data dari Swiss. Selanjutnya, Alm dan Torgler (2006) pajak moral menganalisis di Amerika Serikat dan di Eropa. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan tingkat yang lebih tinggi demokrasi memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak. Singkatnya, temuan kami menunjukkan bahwa faktor pemerintahan jelas materi. Hasil ini memberikan dukungan kepada hipotesis bahwa kesediaan masyarakat untuk pajak sendiri tergantung pada lembaga-lembaga pemerintahan yang baik. Hasil ini terus untuk mengembangkan serta negara-negara maju.

Kesimpulan mendasar dari penelitian ini adalah bahwa keadaan yang legitimate dan responsif kemungkinan merupakan prasyarat penting bagi tingkat yang lebih memadai upaya pajak di negara-negara berkembang dan juga negara-negara berpenghasilan tinggi.

Hasil ini memiliki implikasi kebijakan tertentu yang kuat bagi negara-negara berkembang. Sedangkan pada pandangan pertama memberikan nasihat tersebut kepada negara-negara miskin berusaha untuk meningkatkan rasio pajak mereka mungkin tidak tampak lebih membantu selain mengatakan kepada mereka untuk menemukan minyak, hal ini diduga lebih layak bagi orang untuk memperbaiki institusi mereka mengatur daripada mengatur ulang karunia alam. Selain itu, lembaga-lembaga peningkatan seperti suara atau meningkatkan

akuntabilitas dan mengurangi korupsi tidak mungkin memakan waktu lebih lama dan tidak akan selalu lebih sulit daripada mengubah kesempatan untuk menangani pajak dan struktur ekonomi, seperti pangsa relatif sektor non-pertanian dalam perekonomian atau berat impor dan ekspor dalam PDB.

Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa negara-negara berpenghasilan tinggi juga dapat meningkatkan kinerja pajak mereka melalui perbaikan struktur tata kelola mereka. Secara khusus, peningkatan suara dan akuntabilitas akan mengarah pada upaya pajak yang lebih tinggi. Kontribusi yang paling penting dari makalah ini adalah untuk memperluas model konvensional dari upaya pajak dengan menunjukkan bahwa tidak hanya menyediakan materi faktor, tetapi faktor permintaan yang umum untuk semua negara juga hal yang cukup signifikan dalam menentukan upaya pajak. Tentu saja, untuk memahami kinerja satu negara perlu memperhatikan faktor-faktor yang khusus untuk negara tersebut.

### 3. Penelitian M. Nagy Eltony Measuring Tax Effort in Arab Countries

Penelitian sebelumnya dalam mengukur kapasitas fiskal dengan menggunakan sampel negara penerimaan pajak terhadap PDB pada variabel penjelas yang berfungsi sebagai proxy untuk dasar pengenaan pajak mungkin dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pendekatan regresi telah diterapkan pada contoh negara berkembang dan negara industri Tanzi (1981, 1987; & 1992); Leuthold (1991), Tait dan Eichengreen (1978); Chelliah et al (1975) dan Bahl (1971. ). Dalam penelitian ini, Rasio pajak diperoleh dari regresi tersebut dan dianggap sebagai ukuran kapasitas kena pajak dan koefisien regresi dapat diartikan sebagai tingkat bunga efektif rata-rata. Rasio pajak yang diprediksi kemudian dihitung dan digunakan sebagai indeks dari upaya pajak. Sebagian besar, dalam pendekatan ini, upaya pajak didefinisikan sebagai rasio penerimaan pajak untuk beberapa ukuran kapasitas kena pajak, misalnya PDB, sehingga asumsi bahwa dasar pengenaan pajak dan variabel penjelas lainnya mencerminkan perbedaan hanya dalam kapasitas kena pajak (Tanzi, 1992 ).

Selain itu, dalam studi sebelumnya, faktor penentu utama dari kontribusi pajak di PDB adalah nilai tambah per sektor usaha, keseluruhan tingkat

pengembangan industri, dan pentingnya perdagangan internasional dalam perekonomian. Nilai tambah per sektor usaha kemungkinan pengaruh penting pada kontribusi pajak karena beberapa sektor ekonomi lebih cocok untuk perpajakan dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Untuk beberapa negara Arab, pangsa pertanian dalam perekonomian dapat menjadi faktor penting dalam kapasitas kena pajak karena petani kecil diketahui sulit untuk pajak dan sektor pertanian, pada umumnya, tidak menghasilkan pendapatan pajak yang besar. Di sisi lain, kontribusi pertambangan mungkin penting sebagai sektor yang bisa menghasilkan penghasilan kena pajak yang besar. Namun, di negara-negara Arab, ekstraksi minyak oleh perusahaan milik negara adalah umum, sehingga membatasi koleksi potensi pendapatan dari sumber ini. Selain itu, pangsa manufaktur mungkin juga penting sebagai perusahaan manufaktur biasanya lebih mudah untuk pajak dari pertanian sejak pemilik usaha biasanya menyimpan buku-buku yang lebih baik dan mengikuti praktek-praktek akuntansi yang lebih baik dan manufaktur dapat menghasilkan pendapatan kena pajak besar jika produksi efisien.

Selain itu, variable lainnya berupa pendapatan per kapita biasanya dianggap sebagai proxy terbaik untuk keseluruhan tingkat pembangunan dan struktur ekonomi. Faktor ini mungkin memiliki kekuatan sebagai penjelas dari kontribusi sektoral, meskipun faktor-faktor ini biasanya terkait satu sama lain, karena pangsa jasa dan industri meningkat sesuai dengan perkembangan dan pendapatan per kapita. Pada penelitian ini yang menjadi masalah adalah perbedaan mata uang. Dalam analisis lintas negara haruslah dikonversikan ke mata uang bersama, seperti dolar AS. Apabila kurs tidak mencerminkan paritas daya beli, lalu perbandingan berdasarkan mata uang bersama, meskipun jika ada beberapa skema sistematis di negara-negara maka hal ini mungkin tidak bias hasilnya. Satu kemungkinan, bagaimanapun, adalah untuk mengubah besaran nominal ke mata uang bersama menggunakan daya beli dikoreksi nilai tukar.

Berikutnya adalah variable pangsa perdagangan internasional dalam perekonomian sebagai ukuran keterbukaan ekonomi. Beberapa fitur perdagangan internasional membuatnya lebih cocok untuk perpajakan dari kegiatan domestik.

Di kebanyakan negara Arab, sektor perdagangan internasional biasanya adalah sektor yang paling menghasilkan uang dari ekonomi dan telah memperoleh pentingnya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi impor dan ekspor kontribusi bisa menjadi faktor penting dalam kontribusi pajak. Sejumlah penelitian telah mencoba untuk menilai pentingnya fitur struktural. Chelliah et al. (1975) terkait pangsa pajak dalam PDB untuk berbagai kombinasi variabel penjelas, dengan menggunakan sampel 47 negara rata-rata selama periode 1969-1971. Mereka memperoleh paling cocok menggunakan kontribusi pertanian, pangsa pertambangan, dan rasio ekspor dalam PDB sebagai variabel penjelas. Mereka menemukan pertambangan yang positif berkaitan dengan berbagai pajak sementara pertanian adalah negatif terkait dan rasio ekspor tidak signifikan. Memperbarui sebuah karya sebelumnya, Tait dan Gratz (1979) menggunakan sampel yang sama dari 47 negara-negara berkembang dengan data rata-rata selama periode 1972-1976. Hasilnya menunjukkan bahwa. Spesifikasinya telah sesuai, baik menggunakan pendapatan per kapita, pangsa pertambangan, atau bagian ekspor non-minyak dalam PDB sebagai variabel penjelas atau pendapatan non-ekspor per kapita dan porsi ekspor dalam PDB sebagai variabel penjelas. Mereka tidak menemukan kontribusi pertanian menjadi signifikan. mengukur mereka dari indeks pajak usaha juga menghasilkan hasil yang sama untuk studi sebelumnya.

Tanzi (1987) dengan menggunakan sampel 86 negara-negara berkembang, bagaimana bagian dari pendapatan pajak di PDB adalah berkaitan dengan logaritma dari pendapatan per kapita. Dia menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua. Dalam studi berikutnya, Tanzi (1992) diperpanjang analisisnya untuk memasukkan sampel 83 negara-negara berkembang selama periode 1978-1988. Ia menemukan bahwa hubungan antara kontribusi pajak dan pendapatan per kapita melemah. Artinya, hipotesis bahwa faktor lain, seperti ketidakstabilan ekonomi makro, kebutuhan untuk pembayaran hutang dan perubahan struktur ekonomi, telah menjadi faktor penentu lebih penting. Dia memperkirakan spesifikasi alternatif yang terkait pangsa pajak dalam PDB dengan pangsa pertanian dalam PDB, pangsa impor dalam PDB, pangsa utang

luar negeri dalam PDB, dan pendapatan per kapita. Hasil-Nya menunjukkan bahwa pangsa pertanian dalam PDB sangat berbanding terbalik dengan pangsa pajak dan daya penjelasannya lebih besar dari pendapatan per kapita. Ia juga menemukan bahwa pangsa impor dan berbagi hutang penentu penting dari kontribusi pajak.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor penentu upaya pajak di negara-negara Arab. Ini mempekerjakan dikumpulkan time series dan data cross-sectional negara untuk 16 negara-negara Arab untuk jangka waktu 1994-2000. Satu keuntungan dari menggunakan cakupan yang luas dari negara-negara Arab adalah bahwa sampel terdiri dari negara-negara yang cenderung memiliki karakteristik beberapa ekonomi yang sama, meskipun di antara negara-negara Arab, ada kesamaan politik, ekonomi, dan sosial banyak. Pemilihan sampel sebagian dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperoleh kumpulan data dimana variabel dapat diukur secara relatif akurat, dapat diandalkan dan konsisten. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan rasio terhadap PDB. PDB termasuk pendapatan lokal yang terakumulasi untuk non-penduduk dan tidak termasuk pendapatan yang diperoleh dari luar negeri oleh penduduk, karena pendapatan daerah yang diperoleh untuk non-penduduk biasanya dikenakan pajak sedangkan kiriman uang dari luar negeri biasanya tidak. Selain itu, penelitian ini menggunakan lintas negara, time-series data set, sehingga mengambil keuntungan dari variabel penjelas yang berbeda-beda baik oleh unit observasi (negeri) dan waktu.

Dalam penelitian ini digunakan error component model, yang memungkinkan penerimaan negara terpisah, diperkirakan menggunakan waktu dikumpulkan-series dan data lintas negara. Model ini juga dikenal sebagai model efek tetap. Alasan untuk memilih model fixed effect adalah bahwa untuk membuat kesimpulan tergantung pada efek yang ada di sampel (Hsiao, 1986); Greene, 1993; dan Baltagi, 1996). Artinya, berfokus penelitian ini adalah pada himpunan negara-negara Arab dan kesimpulannya terbatas pada perilaku negara-negara Arab. Selanjutnya, mengikuti studi empiris sebelumnya, spesifikasi fungsi usaha pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Tax}_{it} = A_i + B_1 \text{YP}_{it} + B_2 \text{Import}_{it} + B_3 \text{Export}_{it} + B_3 \text{Mining}_{it} \\ + B_4 \text{Manu}_{it} + B_5 \text{Agri}_{it} + B_6 \text{Odebt}_{it} + u_{it}$$

Where ( *u* ) is the error term , ( *i* ) denotes the country and ( *t* ) denotes the time.

Hasil penelitian untuk mengungkapkan perbandingan Upaya Pajak di negara-negara Arab untuk mengungkapkan apakah sebuah negara Arab dibatasi dalam pengumpulan pendapatan dengan kapasitas rendah untuk menghasilkan pendapatan atau untuk menggunakan kapasitas pajak yang tersedia untuk membiayai pengeluaran publik. Sehingga dalam Penelitian ini harus berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil-hasil dan implikasi kebijakan di Negara-negara Arab, sebagai model tidak mengambil laporan lengkap faktor negara tertentu seperti sistem politik, sikap terhadap pemerintah; kualitas administrasi pajak, bea cukai, dan lembaga lainnya pemerintah; guncangan harga komoditas, dll hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor-faktor ini sangat signifikan di semua persamaan estimasi dan mungkin ini sebagian menjelaskan penolakan Hausman uji spesifikasi efek random.

Selain itu, hasil menunjukkan bahwa faktor penentu utama dari Upaya Pajak di PDB untuk negara-negara Arab adalah pendapatan per kapita, pangsa pertanian dalam PDB dan bagian pertambangan di PDB. Variabel-variabel ini secara statistik signifikan dan memiliki tanda-tanda yang diharapkan. Variabel lain yang juga penting adalah faktor penentu saham ekspor dan impor dan di negara-negara non-minyak hanya Arab, utang luar negeri yang beredar ditemukan signifikan dan positif terkait dengan pajak.

### **2.3. Pengaruh Otonomi dan Desentralisasi Daerah Terhadap Upaya Penggalan PAD: Tinjauan Literatur**

Otonomi dan desentralisasi berpengaruh terhadap upaya penggalan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Pengaruh ini akibatnya adanya transfer dari Pusat ke daerah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Tujuan

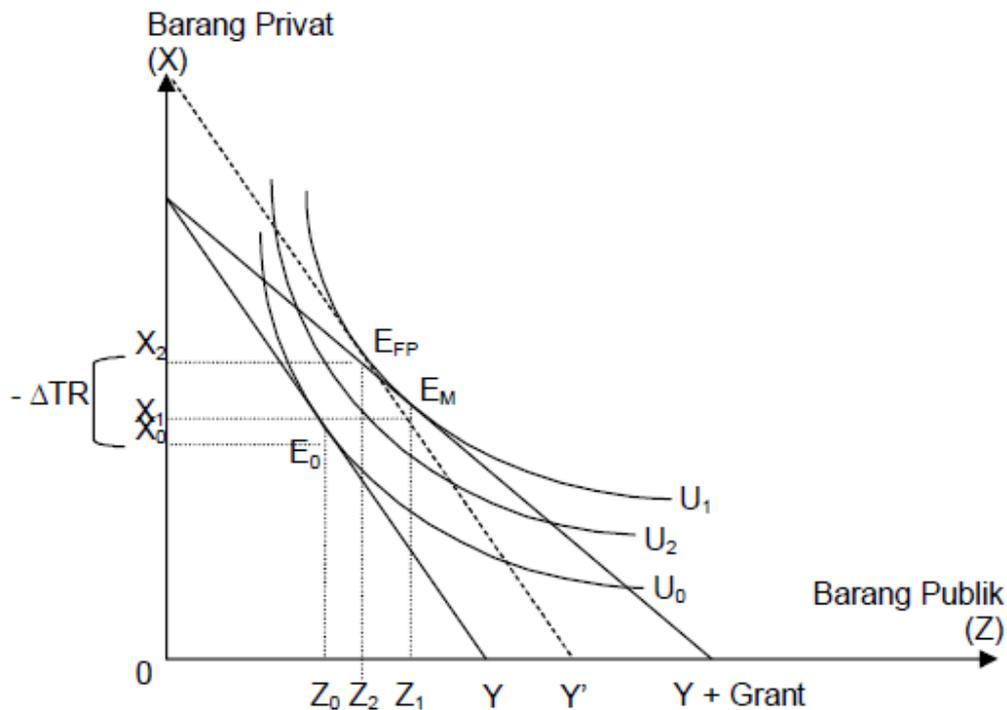
utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 1999).

Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak local secara lebih optimal (Oates, 1999).

Kondisi tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Perimbangan antara transfer dan PAD yang timpang ini juga masih terjadi pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di sisi lain, UU No. 34/2000 telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dominannya peran transfer relative terhadap PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi (*governance*) terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya (Mello dan Barenstrein, 2001). Ini berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri daripada uang “hadiah” yang diterima dari pusat.

Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Wilde (1968) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi. Analisis Wilde dapat diringkas ke dalam Gambar 1 yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik. Layaknya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi seperti ditunjukkan oleh kurva indiferensi ( $U_0, U_1, U_2$ ) dengan kendala anggaran (garis  $Y$  dan  $Y+G$  (*grant*)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas dengan kendala pendapatannya.

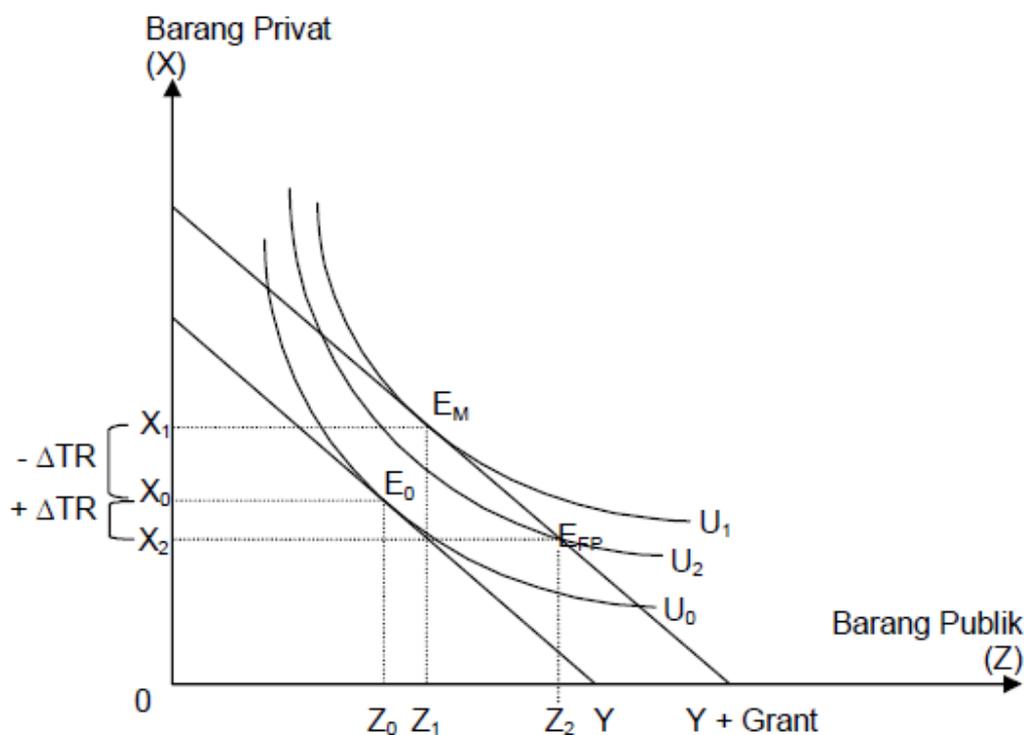


Gambar 2.1.  
Pengaruh Transfer Bersyarat

Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1, bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. Konsekuensinya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari yang semula  $Z_0$  menjadi sebesar  $Z_1$ .

Pengaruh tranfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar  $X_1$ . Setelah penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar  $X_2$ . Dengan demikian,

kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.



Gambar 2.2.  
Pengaruh Transfer Tak Bersyarat

Dalam kasus bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*), transfer sebesar  $G$  memberikan kenaikan garis anggaran dari  $Y$  ke  $Y+G$  pada Gambar 2.2. Mengikuti Bradford dan Oates (1971a, 1971b), Borcharding dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan asumsi tersebut, transfer yang bersifat umum (*lump-sum*) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik  $E_0$  ke  $E_M$ . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar  $Z_1$  dan  $X_1$ .

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar  $-\Delta TR$ , sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Oleh karena itu,

analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, banyak ekonom yang mengamati pemunculan anomali (Gramlich, 1977; Courant, Gramlich, dan Rubinfeld, 1979). Para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik EFP (bukannya pada EM) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah ( $+\Delta TR$ ) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari  $Z_1$  menjadi  $Z_2$ ). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut di dalam banyak literatur disebut sebagai *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Anomali tersebut memicu diskusi yang instensif di antara ahli ekonomi. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran, yaitu model birokratik (*bureaucratic model*) dan ilusi fiskal (*fiscal illusion model*). Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya. Aliran pemikiran birokratik diawali oleh Niskanen (1968). Dalam pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan publik. Ia mengasumsikan birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Dengan asumsi ini, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata sama dengan harganya. Pada posisi biaya marginal lebih tinggi daripada harganya, kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak. Dengan demikian,

transfer akan menurunkan harga barang publik sehingga memicu birokrat untuk membelanjakan lebih banyak anggaran.

Secara implisit, model birokratik menegaskan *flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer daripada menaikkan pajak. McGuire (1973) mengistilahkan hal ini sebagai ketamakan politisi (*a greedy politicians model*). Grossman (1990) melukiskannya sebagai perilaku politisi dengan cakrawala pandang yang menyempit (*myopic behavior*). Dengan demikian, *flypaper effect* terjadi karena superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer. Informasi lebih yang dimiliki birokrat memungkinkannya memberikan pengeluaran yang berlebih.

Implikasi yang penting dari model birokratik ini adalah bahwa desentralisasi fiskal bisa membantu dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian (Tiebout, 1956). Hal ini memberikan implikasi bahwa efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oates (1979) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah.

Lebih jauh, ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini (Schawallie, 1989). Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan jangka panjang. Turnbull (1992) menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan kesalahan persepsi tersebut. Menurut Turnbull, ketidakpastian tingkat harga barang publik akan menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu pengeluaran yang berlebih.

Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi fiskal dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas yang diminta sebagai cerminan dari kenaikan pendapatannya. Becker (1996) dan Bailey dan Connolly (1998) mengidentifikasi beberapa isu yang selalu muncul dalam pembahasan mengenai *flypaper effect*. Salah satu isu yang penting adalah respon yang tidak simetri terhadap perubahan transfer. Teori perilaku konsumen di atas menjelaskan bahwa respon terhadap perubahan transfer seharusnya indifferen. Hal ini berarti bahwa pengaruh perubahan transfer pada perilaku fiskal pemerintah daerah akan sama terlepas apakah sumbangan tersebut diperoleh melalui runtutan kenaikan atau melalui serangkaian kenaikan lalu dikurangi secara gradual. Gramlich (1977) menyatakan dalam kasus keuangan daerah ada respon yang tidak simetri terhadap perubahan besaran transfer. Ia menjelaskan bahwa transfer diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer mulai meningkat. Setelah transfer dikurangi, mereka melakukan lobi untuk mempertahankan keuntungannya melalui kenaikan pajak. Oates (1994) mengemukakan karena alasan politis pengeluaran pemerintah daerah bisa jadi tidak sensitive terhadap penurunan transfer yang menunjukkan *flypaper effect* terjadi dalam satu arah.

## BAB 3

### TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

#### 3.1. Otonomi Daerah dan Penerimaan Daerah: Kondisi di Indonesia

##### 3.1.1. Otonomi Daerah Di Indonesia

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup> Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain, untuk

1. mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*);
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
3. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
4. tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan
5. mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (*taxing power*).

Saat ini otonomi daerah di Indonesia baru dapat dikatakan berhasil menyelesaikan tahapan desentralisasi teritorial. Indonesia relatif berhasil menjalankan proses desentralisasi pada pemerintah kabupaten dan kota. Wajah Indonesia saat ini adalah wajah negara yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sejak tahun

---

<sup>4</sup> Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1999 sampai dengan 2009, jumlah daerah otonom berkembang dari semula 26 propinsi, 223 kabupaten dan 58 kota menjadi 33 propinsi, 386 kabupaten, dan 91 kota. Jadi, dalam 10 tahun ini terjadi pemekaran 10 propinsi, 163 kabupaten, dan 33 kota. Sejalan dengan pengalihan kekuasaan politik, desentralisasi administrasi telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah. Pengalihan kewenangan itu dibiayai oleh dana perimbangan, yang ditransfer dari pusat ke daerah dalam beberapa skema. Pada tahapan ini proses desentralisasi di Indonesia adalah desentralisasi di sisi pengeluaran pemerintah, yang dibiayai dana perimbangan. Sedangkan kebijakan pengeluaran dalam APBD hak sepenuhnya pemerintah daerah. Data APBN 2008 menunjukkan, ternyata 65 persen dari total anggaran diberikan kepada daerah, 35 persen di antaranya transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana otonomi khusus. Sebanyak 30 persen lainnya adalah kegiatan pemerintah pusat yang dilakukan di daerah. Dengan hanya 35 persen APBN bagi belanja pemerintah pusat untuk keperluannya sendiri, keberhasilan aktivitas pembangunan dari perputaran 65 persen APBN di daerah menjadi sangat menentukan.

Secara teoritis, Desentralisasi teritorial, khususnya otonomi, berkonsekuensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah. Seperti dikatakan oleh B.C. Smith bahwa *it is obvious that the exercise of governmental powers at the subnational level entails expenditure by subnational governments.*<sup>5</sup> Bagir Manan, dalam kaitannya dengan pembiayaan pemerintahan daerah di era otonomi menyatakan bahwa hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna membelanjai diri sendiri.<sup>6</sup> Begitu pula dengan Pheni Chalid yang berpendapat bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan pemerintahan berarti beban pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan daerah.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa, pemerintahan daerah harus memiliki sumber keuangan sendiri untuk dapat menyelenggarakan rumah tangganya secara mandiri.

---

<sup>5</sup> B.C. Smith, *Decentralization The Territorial Dimension of The State*, Gerge Allen Unwin, London, 1985, hlm. 99.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara...., op.cit.*, hlm. 204.

<sup>7</sup> Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005, hlm vii

Oleh karena itu, desentralisasi ekonomi adalah tahapan berikut dari proses desentralisasi yang harus dilalui oleh Indonesia. Pada tahapan ini daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Karena konsekuensi desentralisasi pada pembiayaan urusan pemerintahan daerah pada hakikatnya adalah desentralisasi di bidang keuangan atau desentralisasi fiskal. Bahcrul Elmi mengatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.<sup>8</sup> Namun demikian, ada yang mengartikan desentralisasi fiskal lebih luas dari sekedar pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan. Dalam perspektif ilmu ekonomi, desentralisasi fiskal diartikan dalam ukuran-ukuran keuangan seperti *expenditure* (pengeluaran/belanja) atau *revenue* (penerimaan/pendapatan).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2002, hlm 26. 33

<sup>9</sup> Dalam interpretasi ekonomi (Stoker, 1991: 238-242, mengenai *public choice theory*), desentralisasi merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan publik. Menurut perspektif ini, individu-individu diasumsikan akan memilih tempat tinggalnya dengan membandingkan berbagai paket pelayanan dan pajak yang ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. Individu yang rasional akan memilih tempat tinggal yang akan memberikan pilihan paket yang terbaik. Manfaat yang bisa dipetik dari *local government* dalam perspektif ini meliputi :

- a. adanya daya tanggap publik terhadap preferensi individual (*public responsiveness to individual preferences*). Barang dan pelayanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, tidak seperti swasta, akan dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan, sehingga konsumsi oleh satu penduduk tidak akan mengurangi jatah penduduk yang lain. Pemerintah daerah juga akan menjamin keterjangkauan biaya penyediaan barang dan pelayanan publik, yang apabila diberikan oleh swasta akan menjadi tidak efektif Selain itu, *local government* juga memberikan cara agar preferensi penduduk dapat dikomunikasikan melalui pemilihan dan prosedur politik lainnya.
- b. *Local government* memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik (*the demand for public goods*). 'Demand' dalam preferensi pasar swasta lebih mudah diketahui melalui kemauan untuk membayar, akan tetapi dalam politik, ia sulit diidentifikasi karena relasi yang rumit antara barang, harga, pajak, pemilihan dan preferensi politik, partisipasi, dan kepemimpinan. Desentralisasi mampu mengurangi persoalan ini dengan meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan publik.
- c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik (*the supply of public goods*). Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik diselenggarakan tersentralisasi. Semakin besar organisasinya maka semakin besar pula kecenderungannya untuk memberikan pelayanan. Semakin monopolistik pemerintah maka semakin kecil insentif dan inovatifnya. Berdasar pada teori, yurisdiksi terfragmentasi akan lebih memberikan kepuasan kepada konsumen daripada

Pengertian desentralisasi fiskal yang tidak hanya pada aspek penerimaan, namun juga pada aspek pengeluaran, berhubungan dengan adanya kewenangan daerah atas sumber-sumber penerimaan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran/ belanja sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Roy Bahl yang mengatakan, bahwa *"as a working definition, fiscal decentralization as "the empowerment of people by fiscal empowerment of their local government"* (pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal dari pemerintah daerahnya).<sup>121</sup> Artinya, efisiensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem desentralisasi, hanya memungkinkan jika terdapat kebebasan berotonomi, karena otonomilah ujung tombak usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Bahcrul Elmi, bahwa : "...salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk otonomi, penerimaan otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses mengintensifkan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan otonomi. Pola dan ukuran dalam desentralisasi fiskal akan mencerminkan derajat otonomi yang dimiliki daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Bird (1986), bahwa: *"...a decentralization measure is the autonomy or power of decision making of regional government. In this context, a fiscal decentralization measure should be able to quantify the amount of independent decision - making power (or discretion) in the provision of public services at different level of government"*.

Otonomi Daerah telah melahirkan berbagai peraturan daerah yang diperkirakan akan memunculkan konflik antar daerah dan pusat. Karena setelah desentralisasi digulirkan oleh Pemerintah, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD. Pada dasarnya selain untuk meningkatkan PAD, Perda dibuat untuk menertibkan dan memperlancar aktivitas di daerahnya, tetapi pada prakteknya berbagai Perda dan kebijakan tersebut menciptakan ekonomi biaya tinggi yang menghambat perkembangan

---

kewenangan yang terkonsolidasi. Desentralisasi akan memberikan peluang antar yurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanannya.

ekonomi di daerah tersebut. Akhirnya situasi ini akan mengganggu iklim usaha dan memperlemah daya saing usaha di Indonesia.

Saat ini kemandirian keuangan daerah di era otonomi belum dapat tercapai karena fakta yang ada menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan asli daerah (PAD) kabupaten/kota hanya menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5%-10%. Selebihnya, keseluruhan anggaran di tutup oleh dana transfer pusat ke daerah sehingga mencapai 100% sehingga dengan jumlah dana Transfer yang besar ini menyebabkan daerah kurang dalam menggali potensi yang ada pada daerahnya sendiri.

### **3.2.1. Penerimaan Daerah di Indonesia**

Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah.<sup>10</sup> Alokasi dana transfer ke daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu dari Rp81,1 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp253,3 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp293,6 triliun pada tahun 2008, atau tumbuh rata-rata sebesar 20,2 persen per tahun.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Secara umum, sumber penerimaan/ pendapatan daerah (*revenue sources of local governments*) secara umum terdiri dari pendapatan asli daerah (*local own revenue*), transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah (*intergovernmental fiscal transfers*) dan pinjaman daerah (*local borrowing*).

<sup>11</sup> Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya percepatan penyaluran dana transfer ke daerah dan mendorong pelaksanaan atau realisasi belanja pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah. Hal ini perlu dilakukan karena keterlambatan penetapan Perda APBD dikhawatirkan akan mengakibatkan penumpukkan dana yang belum terpakai, sehingga cenderung ditempatkan ke dalam bentuk investasi jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui bank pembangunan daerah (BPD). Percepatan penetapan APBD dan realisasi belanja daerah harus dibarengi dengan kualitas belanja daerah, yang dapat dilakukan antara lain melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja, penganggaran dalam kerangka penganggaran jangka menengah, dan sistem pelaporan yang akuntabel, sebagaimana telah diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah. Percepatan penyaluran dana transfer ke daerah, percepatan realisasi belanja daerah, dan peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah tersebut harus diimbangi juga dengan pemerataannya dan tingkat kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, nomenklatur pendanaan desentralisasi dalam APBN juga mengalami perubahan. Sejak tahun 2001—2007, dalam postur APBN nomenklatur untuk pendanaan desentralisasi telah mengalami penyesuaian beberapa kali. Anggaran yang didaerahkan disesuaikan menjadi belanja daerah, dan terakhir sampai dengan tahun 2007 disesuaikan menjadi belanja ke daerah. Mulai tahun 2008 nomenklatur tersebut berubah menjadi transfer ke daerah yang selanjutnya ditetapkan pengaturannya dalam Bagan Akun Standar.

Pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah baru mencakup dana perimbangan. Sejak tahun 2002, alokasi transfer ke daerah juga mencakup dana otonomi khusus untuk Propinsi Papua sebagai pelaksanaan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, dan Dana Penyeimbang (Dana Penyesuaian), yang dialokasikan kepada daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2008, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, mulai tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 setara 1 persen dari pagu DAU nasional. Setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal, perkembangan alokasi transfer ke daerah dari tahun 2001—2008 secara nominal terus meningkat, dari Rp81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp253,3 triliun (6,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp293,6 triliun (6,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 20,2 persen per tahun.

Dalam kurun waktu 2001—2008, dana perimbangan, yang merupakan komponen terbesar dari transfer ke daerah, yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp244,0 triliun (6,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp279,6 triliun (6,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 19,3 persen per tahun.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, baik dari

penerimaan pajak maupun penerimaan sumber daya alam. Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak yang dibagikan ke daerah meliputi Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPND), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang dibagikan ke daerah meliputi SDA minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sejak tahun 2006, DBH SDA kehutanan juga mencakup DBH dana reboisasi, yang merupakan pengalihan dari dana alokasi khusus dana reboisasi (DAK DR). Sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagikan, realisasi DBH (termasuk pengalihan DAK DR ke dalam DBH SDA Kehutanan) menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp20,7 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp62,9 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp78,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 21,0 persen per tahun.

Daerah kabupaten/kota yang menerima DBH pajak tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta, dengan proporsi penerimaan DBH pajak terhadap keseluruhan DBH pajak pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing mencapai 21,78 persen dan 21,63 persen. Sementara itu, kabupaten/kota yang memperoleh DBH pajak terendah terdapat di Propinsi Gorontalo, dengan proporsi penerimaan DBH pajak terhadap keseluruhan DBH pajak pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing sama sebesar 0,31 persen. Untuk tahun 2007 dan 2008, daerah kabupaten/ kota yang menerima DBH SDA tertinggi terdapat di propinsi Kalimantan Timur, dengan proporsi penerimaan DBH SDA terhadap keseluruhan DBH SDA, masing-masing sebesar 97,44 persen dan 38,93 persen, sedangkan daerah kabupaten/kota yang menerima DBH SDA paling rendah terdapat di Propinsi DI Yogyakarta, dengan proporsi penerimaan DBH SDA terhadap keseluruhan DBH SDA pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing sama sebesar 0,01 persen.

Selain DBH, peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun juga terjadi pada DAU, terkait dengan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap penerimaan dalam negeri (PDN) neto, dari 25 persen dalam periode 2001-2003, menjadi 25,5 persen dalam periode tahun 2004-2005, dan kemudian menjadi 26 persen dalam periode tahun 2006-2008. Sejalan dengan peningkatan rasio DAU terhadap PDN neto tersebut, maka dalam

rentang waktu 2001- 2008, realisasi DAU meningkat dari Rp60,3 triliun (3,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001, menjadi Rp 64,8 triliun (4,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp 79,5 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 16,9 persen per tahun. Pada tahun 2008, wilayah propinsi (termasuk kabupaten/kota) yang menerima DAU tertinggi adalah propinsi Jawa Timur, dengan alokasi sekitar 11,44 persen dari total DAU.<sup>12</sup>

Dalam dua tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal (2001—2002), DAK hanya dialokasikan untuk dana reboisasi (DR), yang merupakan bagian 40 persen dari total penerimaan DR. Sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, sejak tahun 2006 DAK DR yang sebelumnya merupakan bagian dari DAK dikelompokkan ke dalam DBH SDA Kehutanan. Pada tahun 2004, DAK non-DR dialokasikan untuk infrastruktur air bersih serta bidang kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2005 terdapat penambahan bidang, yaitu pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2006, bidang yang didanai melalui DAK ditambah bidang lingkungan hidup. Bahkan, pada tahun 2008, bertambah dua bidang, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan kehutanan. Untuk menunjukkan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK, daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendamping dalam APBD, paling sedikit 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterima. Sejalan dengan penambahan bidang yang dibiayai dengan DAK, realisasi DAK terus meningkat, dari Rp2,7 triliun (0,1 persen terhadap PDB) dalam tahun 2003, menjadi Rp16,2 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp21,2 triliun (0,5 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh sebesar 50,8 persen per tahun. Daerah yang menerima DAK juga terus bertambah dari tahun ke tahun, dari 416 kabupaten/kota di 29 propinsi pada tahun 2003, menjadi 434 kabupaten/kota di 33 propinsi pada tahun 2008.

---

<sup>12</sup> Pengalokasikan DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Secara historis sejak tahun 2001 hingga tahun 2005, formula DAU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu alokasi minimum (AM) dan alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal (KF). AM dihitung berdasarkan komponen *lumpsum* dan proporsional belanja pegawai. Sejak diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004, yang efektif berlaku sejak tahun 2006, komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Pola hubungan antara dana desentralisasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup kuat. Korelasi antara alokasi dana desentralisasi per kapita dengan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan per kapita adalah 0,52 di tahun 2006 dan 0,63 di tahun 2007. Hal ini berarti bahwa pola alokasi dana desentralisasi mempunyai kecenderungan yang relatif sama dengan pola alokasi dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana instansi vertikal, sehingga daerah yang telah mendapatkan dana desentralisasi cukup tinggi juga mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tinggi.

Wilayah Jawa dan Bali mendapatkan alokasi dana desentralisasi dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan per kapita paling rendah dalam dua tahun terakhir, tetapi tingkat kemiskinannya juga rendah yaitu rata-rata sebesar 12,9 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir cukup tinggi, yaitu mencapai rata-rata 8,7 persen. Sebaliknya, wilayah Papua dan Maluku yang mempunyai alokasi dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan per kapita yang tertinggi juga masih mempunyai rata-rata tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 29,0 persen, sedangkan pertumbuhannya cukup rendah yaitu hanya mencapai 2,5 persen. Hal ini berarti bahwa pola belanja di wilayah Jawa dan Bali mempunyai *multiplier effect* terhadap perbaikan indikator kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Papua dan Maluku.

Tabel 3.1.  
Perbandingan Daerah Penerima Dana Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Wilayah	Total dana di daerah/ kapita (Rp.juta/jiwa) Rata-rata 2006-2007	Tingkat Kemiskinan (%) Rata-rata 2006-2007	Pertumbuhan Ekonomi (%) Rata-rata 2006-2007
Sumatera	2,31	15,5%	7,7%
Jawa – Bali	1,42	12,9%	8,7%
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara	2,75	18,1%	8,9%
Papua dan Maluku	5,33	29,1%	2,5%

Sumber: Nota Keuangan Tahun 2008.

### **3.2. Otonomi Daerah, Penerimaan Daerah, Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.**

#### **3.2..1. Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Barat**

Letak geografis Propinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Propinsi Banten di barat. tergolong strategis karena aksesibilitas ke Ibukota Republik Indonesia, Jakarta tergolong baik dari segi komunikasi, dan lancar dari segi transportasi. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan terdiri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom. Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I

Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Propinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Sehingga dapat dikatakan, pada saat ini, yang berhasil dilakukan oleh Propinsi Jawa Barat dari otonomi daerah barulah pada sebatas selesainya tahapan desentralisasi teritorial, jauh dari harapan bahwa otonomi akan membawa kemandirian daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah.

### **3.2.2. Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat**

Sebagaimana dikemukakan oleh Masdiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yang menyebutkan bahwa dana transfer ke daerah dominan sekali, terutama untuk kabupaten/kota sebagai akibat dari rendahnya PAD yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota yaitu paling banyak hanya 5-10%. Kondisi ini juga tergambar pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota yang PAD nya menyumbang lebih dari 10% dari Total Penerimaan Daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Cimahi.

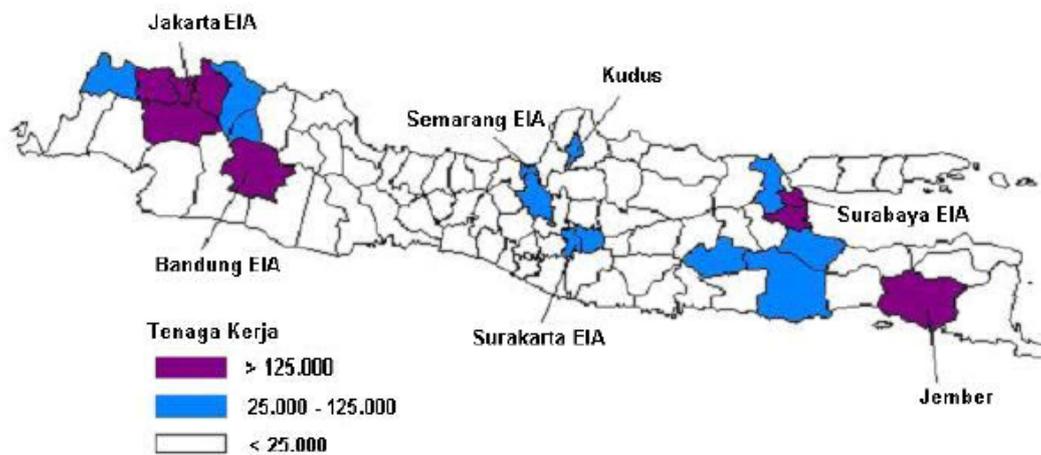
Tabel 3.2  
Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008

No.	Kabupaten/Kota	2000 (%)	2001 (%)	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
1	Kab. Bandung	10.68	8.59	8.85	9.65	9.83	9.02	8.62	7.97	8.70
2	Kab. Bekasi	14.85	11.91	16.18	16.32	27.23	17.43	19.17	16.83	17.81
3	Kab. Bogor	21.97	14.38	13.07	17.61	16.77	18.34	17.04	16.34	16.75
4	Kab. Ciamis	4.98	3.24	3.71	4.82	5.88	4.59	3.47	5.20	4.03
5	Kab. Cianjur	7.50	4.52	5.82	6.08	6.85	7.93	6.73	6.49	6.50
6	Kab. Cirebon	6.61	5.47	6.37	8.58	8.29	10.18	9.94	9.93	9.08
7	Kab. Garut	5.34	4.43	6.04	5.82	6.23	7.17	6.00	6.39	6.11
8	Kab. Indramayu	6.41	5.21	8.16	6.95	5.04	6.50	6.03	4.93	5.48
9	Kab. Karawang	16.69	12.63	12.68	11.48	11.15	11.30	11.59	11.23	11.74
10	Kab. Kuningan	5.65	4.74	5.19	5.35	6.46	7.04	5.60	5.67	5.08
11	Kab. Majalengka	5.76	4.73	7.15	6.07	5.84	6.78	7.14	5.78	5.22
12	Kab. Purwakarta	18.61	14.18	14.19	8.42	11.37	11.43	10.33	8.91	9.40
13	Kab. Subang	8.60	7.66	8.12	7.89	7.87	8.97	7.79	6.18	3.06
14	Kab. Sukabumi	7.29	6.08	7.20	6.10	5.22	7.00	5.98	6.04	7.15
15	Kab. Sumedang	14.44	10.20	10.86	9.97	10.80	11.94	9.24	8.80	9.23
16	Kab. Tasikmalaya	6.95	5.56	3.31	3.85	4.00	4.32	4.13	3.63	4.72
17	Kota Bandung	27.66	15.87	21.80	22.15	19.92	34.39	18.16	17.04	15.58
18	Kota Bekasi	24.21	13.81	15.61	15.86	15.25	17.21	16.31	15.41	14.98
19	Kota Bogor	17.22	11.51	10.77	12.12	13.17	15.83	12.93	12.57	13.62
20	Kota Cirebon	20.71	14.21	13.50	8.58	13.31	16.00	13.46	11.30	12.19
21	Kota Sukabumi	13.75	10.72	12.39	13.00	12.75	15.63	12.69	14.40	14.58
22	Kota Depok		12.02	10.24	10.93	11.79	13.02	11.22	11.26	12.75
23	Kota Tasikmalaya			11.43	9.58	10.17	11.92	8.64	10.56	9.91
24	Kota Cimahi			14.26	12.50	14.73	16.41	13.34	12.53	12.95
25	Kota Banjar					6.56	9.74	6.95	5.99	7.40
26	Kab. Bandung Barat									5.42

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada Tabel 3.2. di atas, data menunjukkan bahwa pada tahun 2008, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan PAD lebih tinggi dari 15% yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi. Keempat daerah ini adalah sentra ekonomi bagi propinsi Jawa Barat dan memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya serta menjadi sentra bagi industri. Namun demikian di Propinsi Jawa Barat, pada tahun 2008, juga masih terdapat kabupaten yang perolehan PAD nya di bawah 5% yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari ketiga kabupaten ini, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya terletak di wilayah selatan Jawa Barat yang faktanya adalah daerah yang memiliki daerah yang luas dengan sebagian besar masyarakatnya bersandar pada sektor pertanian serta tidak memiliki infrastruktur sebaik wilayah lain di bagian utara Propinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Subang, kondisi ini kemungkinan besar akibat dari yang terfokus pada sektor pertanian saja.

Kondisi yang menunjukkan tingginya PAD di wilayah pantai utara Jawa Barat ini terkait erat dengan keadaan kabupaten/kota di wilayah tersebut sebagai pusat industri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2000) pada studinya menemukan bahwa pusat konsentrasi industri manufaktur Indonesia berlokasi di pulau Jawa dengan konsentrasi yang membentuk pola dua kutub (*bipolar pattern*). Pola konsentrasi yang ditemukan oleh Kuncoro memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hill, yaitu di ujung barat pulau Jawa yang meliputi Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) dan Bandung. Sedangkan di ujung timur pulau Jawa berpusat di kawasan Surabaya.



Gambar 3.1.

## Konsentrasi Industri Manufaktur di Pulau Jawa

Sumber: BPS (diolah oleh Kuncoro 2002: 64)

Perkembangan konsentrasi industri di kutub barat pulau Jawa yang meliputi *Greater* Jakarta dan Bandung, maka akan terlihat beberapa fenomena yang cukup menarik untuk diamati lebih lanjut. *Pertama*, dewasa ini terdapat kecenderungan perkembangan aktifitas industri manufaktur di kota-kota inti (*core region*) dalam hal ini Metropolitan Jakarta dan Bandung terlihat menurun. Sementara itu di kota-kota pinggiran (*fringe region*) seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Botabek) aktifitas industri manufaktur justru semakin meningkat.



Gambar 2

Konsentrasi Industri Manufactur di Pulau Jawa Berdasarkan Nilai Tambah

Sumber: BPS (diolah oleh Kuncoro 2002: 64)

Data berikut ini menyajikan dari sudut pangsa tenaga kerja, nilai tambah maupun jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah ini selama tiga dekade terakhir.

Tabel 3.3.  
Pangsa Industri Manufaktur di DKI Jakarta dan Jawa Barat  
Tahun 1990, 2000 dan 2010

Daerah	Tenaga Kerja			Nilai Tambah			Jumlah Perusahaan		
	1990	2000	2009	1990	2000	2009	1990	2000	2009
<b>DKI JAKARTA</b>									
1. Jakarta Selatan	4.53	2.65	0.77	3.01	2.56	0.50	6.32	4.04	1.32
2. Jakarta Timur	15.33	8.91	5.25	20.57	14.72	8.56	7.94	6.58	5.19
3. Jakarta Pusat	4.23	2.05	0.34	3.64	1.34	0.22	5.95	3.97	1.45
4. Jakarta Barat	9.92	6.11	3.33	7.52	3.60	2.37	14.09	11.49	6.86
5. Jakarta Utara	12.80	11.52	10.28	21.44	16.17	12.87	9.15	11.88	10.91
Core Region (1-5)	46.81	31.24	19.96	56.19	38.39	24.52	43.44	37.98	25.72
6. Bogor	8.67	11.35	10.35	11.53	8.87	8.87	5.08	7.90	8.48
7. Tangerang	5.37	5.37	20.26	5.81	12.00	16.02	4.51	11.74	15.90
8. Bekasi	3.02	5.25	11.00	2.96	5.78	22.12	1.92	4.31	9.21
9. Serang	1.63	1.91	3.25	4.42	16.63	6.34	0.71	0.76	2.72
10. Karawang	0.59	0.80	4.17	0.66	0.92	4.94	0.44	0.95	2.39
Fringe Region (6-10)	19.28	37.07	49.04	25.37	44.20	58.28	12.64	25.65	38.70
<b>KOTA BANDUNG</b>									
11. Kota Bandung	9.85	6.32	5.96	4.22	3.23	2.93	12.04	6.95	6.87
Core Region (11)	9.85	6.32	5.96	4.22	3.23	2.93	12.04	6.95	6.87
12. Kab. Bandung	15.61	16.53	15.17	5.42	7.48	5.42	17.15	13.81	10.20
13. Purwakarta	1.72	0.97	2.29	0.54	1.81	2.97	1.68	1.37	2.10
Fringe Region (12-13)	17.33	17.50	17.47	5.96	9.29	8.39	18.83	15.18	12.30
14. Kab./Kota Lainnya	6.74	7.87	7.57	8.26	4.88	5.88	13.05	14.24	16.21
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Diolah dari data jumlah tenaga kerja, nilai tambah dan perusahaan tahun 1990 – 2010 berdasarkan Survei Industri Manufaktur Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik.

*Kedua*, terdapat fenomena pengelompokan (aglomerasi) industri yang cenderung membentuk suatu koridor pembangunan diantara wilayah metropolitan Jakarta dengan metropolitan Bandung. Secara fenomenal dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa urban di sepanjang koridor-koridor tersebut. Sedangkan secara geografis konsentrasi industri terlihat tersebar di sepanjang koridor Jakarta – Bandung, sehingga wilayah perkotaan di Jabotabek dan Metropolitan Bandung hampir menyatu atau membentuk suatu jaringan kota (*network cities*) (Laquian, 1998: 1; Kuncoro, 2000: 185).

Berdasarkan kenyataan tersebut maka hal ini sejalan dengan dugaan awal bahwa sektor industri memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan PAD dan kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena dari fakta yang ada menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah di atas 10%, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Cimahi, adalah daerah-daerah industri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah di bawah 5%, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang dan Kabupaten Tasikmalaya, adalah daerah perekonomiannya didominasi oleh bidang pertanian.

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2008, memiliki nilai yang berfluktuasi. Fluktuasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya Sisa Lebih Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang diakui sebagai penerimaan pada tahun berikutnya. Bukan dari peningkatan penerimaan daerah dari PAD maupun pendapatan lainnya. Secara nasional pada 2007, SILPA mencapai Rp 45 triliun, dan mengalami kenaikan menjadi Rp 51,4 triliun pada 2009. Hal ini menunjukkan kurangnya penyerapan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Walaupun idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah adalah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada penerapannya DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran

rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai Pemda, sedangkan penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi yang lain dapat memperburuk ketimpangan antardaerah. Peningkatan penerimaan daerah akan memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis, Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan (investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat. Pada sisi yang lain kondisi endowment factors setiap daerah yang berbeda berdampak terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, dan berpotensi memperparah ketimpangan antardaerah dan wilayah. Terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke daerah core, serta tidak berjalannya mekanisme trickle down effect akan berdampak meningkatkan ketimpangan antardaerah (Myrdal, 1957, dan Hirschman, 1958). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, investasi, konsumsi, dan mekanisme transfer dana PKPD dan non PKPD terjadi dalam hubungan simultan (Dartanto, dan Brodjonegoro, 2005). Kondisi-kondisi inilah yang terjadi di kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Efek negatif berupa migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal ke daerah core, serta tidak berjalannya mekanisme trickle down effect, bahwa terdapat kabupaten/kota dengan rasio Dana Transfer yang besar tetap tidak dapat menaikkan rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.

Data menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan rasio Dana Transfer terhadap Total Penerimaan Daerah yang cukup tinggi (di atas 80%) dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 tidak dapat meningkatkan PAD nya secara signifikan. Sebagai contoh di Kabupaten Ciamis besarnya Rasio Dana Transfer terhadap Total

Penerimaan Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 sebesar 92,63%, 82,72%, 83,94%, 83,60%, 88,61%, 84,13%, 77,08%, 85,62% dan 87,29% menyebabkan Kabupaten Ciamis tidak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dan besarnya Dana Transfer ini dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin memperparah ketimpangan dengan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Tabel 3.4  
Perbandingan Dana Transfer Terhadap Total Penerimaan Daerah  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008

No.	Kabupaten/Kota	2000 (%)	2001 (%)	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
1	Kab. Bandung	87.98	90.28	80.96	84.37	83.04	75.45	80.93	91.86	68.36
2	Kab. Bekasi	74.65	77.00	57.58	79.57	58.58	66.12	66.76	83.17	69.92
3	Kab. Bogor	74.16	80.02	65.96	75.76	81.11	72.13	73.30	72.79	71.73
4	Kab. Ciamis	92.63	82.72	83.94	83.60	88.61	84.13	77.08	85.62	87.29
5	Kab. Cianjur	92.12	84.79	83.41	83.47	82.31	82.25	87.40	87.21	83.49
6	Kab. Cirebon	93.36	88.28	77.99	90.39	78.56	81.37	81.11	79.02	78.31
7	Kab. Garut	94.29	87.17	86.69	87.27	81.66	88.13	88.26	90.19	86.26
8	Kab. Indramayu	93.59	88.97	80.30	85.90	88.14	80.85	86.58	89.34	83.49
9	Kab. Karawang	78.87	78.26	77.80	81.97	77.04	71.98	76.70	77.78	82.35
10	Kab. Kuningan	91.88	86.07	85.47	91.27	89.98	80.56	87.67	87.48	83.44
11	Kab. Majalengka	93.59	89.95	77.16	84.77	83.20	83.49	87.15	85.66	83.53
12	Kab. Purwakarta	79.20	79.31	75.07	77.39	76.16	74.62	80.11	82.51	80.24
13	Kab. Subang	90.92	84.54	81.04	86.69	85.07	83.45	86.05	87.54	89.58
14	Kab. Sukabumi	87.60	82.90	79.28	92.39	82.54	87.35	86.79	87.56	82.26
15	Kab. Sumedang	82.82	79.81	77.83	78.75	74.41	74.90	84.29	81.13	79.58
16	Kab. Tasikmalaya	90.95	87.54	83.06	92.32	84.67	85.26	86.70	91.03	87.93
17	Kota Bandung	70.25	60.41	62.09	64.73	74.35	61.07	61.99	81.75	67.39
18	Kota Bekasi	59.16	75.69	69.06	84.14	80.18	77.93	81.09	79.45	63.24
19	Kota Bogor	78.53	78.19	74.15	86.27	71.95	68.60	72.87	72.21	72.44
20	Kota Cirebon	72.97	74.37	77.12	86.25	77.19	69.65	86.54	75.39	78.70
21	Kota Sukabumi	81.11	78.53	71.21	75.89	75.19	71.79	77.10	85.59	76.19
22	Kota Depok		64.40	64.62	86.68	69.57	66.22	71.43	82.12	67.04
23	Kota Tasikmalaya			83.29	83.99	79.52	73.95	83.67	83.03	79.35
24	Kota Cimahi			82.14	81.27	80.55	76.96	81.87	80.46	76.82
25	Kota Banjar					71.37	60.07	84.44	94.01	83.30
26	Kab. Bandung Barat									86.74

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 3.5  
Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kab. Bandung	10.68%	8.59%	8.85%	9.65%	9.83%	9.02%	8.62%	7.97%	8.70%
2	Kab. Bekasi	14.85%	11.91%	16.18%	16.32%	27.23%	17.43%	19.17%	16.83%	17.81%
3	Kab. Bogor	21.97%	14.38%	13.07%	17.61%	16.77%	18.34%	17.04%	16.34%	16.75%
4	Kab. Ciamis	4.98%	3.24%	3.71%	4.82%	5.88%	4.59%	3.47%	5.20%	4.03%
5	Kab. Cianjur	7.50%	4.52%	5.82%	6.08%	6.85%	7.93%	6.73%	6.49%	6.50%
6	Kab. Cirebon	6.61%	5.47%	6.37%	8.58%	8.29%	10.18%	9.94%	9.93%	9.08%
7	Kab. Garut	5.34%	4.43%	6.04%	5.82%	6.23%	7.17%	6.00%	6.39%	6.11%
8	Kab. Indramayu	6.41%	5.21%	8.16%	6.95%	5.04%	6.50%	6.03%	4.93%	5.48%
9	Kab. Karawang	16.69%	12.63%	12.68%	11.48%	11.15%	11.30%	11.59%	11.23%	11.74%
10	Kab. Kuningan	5.65%	4.74%	5.19%	5.35%	6.46%	7.04%	5.60%	5.67%	5.08%
11	Kab. Majalengka	5.76%	4.73%	7.15%	6.07%	5.84%	6.78%	7.14%	5.78%	5.22%
12	Kab. Purwakarta	18.61%	14.18%	14.19%	8.42%	11.37%	11.43%	10.33%	8.91%	9.40%
13	Kab. Subang	8.60%	7.66%	8.12%	7.89%	7.87%	8.97%	7.79%	6.18%	3.06%
14	Kab. Sukabumi	7.29%	6.08%	7.20%	6.10%	5.22%	7.00%	5.98%	6.04%	7.15%
15	Kab. Sumedang	14.44%	10.20%	10.86%	9.97%	10.80%	11.94%	9.24%	8.80%	9.23%
16	Kab. Tasikmalaya	6.95%	5.56%	3.31%	3.85%	4.00%	4.32%	4.13%	3.63%	4.72%
17	Kota Bandung	27.66%	15.87%	21.80%	22.15%	19.92%	34.39%	18.16%	17.04%	15.58%
18	Kota Bekasi	24.21%	13.81%	15.61%	15.86%	15.25%	17.21%	16.31%	15.41%	14.98%
19	Kota Bogor	17.22%	11.51%	10.77%	12.12%	13.17%	15.83%	12.93%	12.57%	13.62%
20	Kota Cirebon	20.71%	14.21%	13.50%	8.58%	13.31%	16.00%	13.46%	11.30%	12.19%
21	Kota Sukabumi	13.75%	10.72%	12.39%	13.00%	12.75%	15.63%	12.69%	14.40%	14.58%
22	Kota Depok		12.02%	10.24%	10.93%	11.79%	13.02%	11.22%	11.26%	12.75%
23	Kota Tasikmalaya			11.43%	9.58%	10.17%	11.92%	8.64%	10.56%	9.91%
24	Kota Cimahi			14.26%	12.50%	14.73%	16.41%	13.34%	12.53%	12.95%
25	Kota Banjar					6.56%	9.74%	6.95%	5.99%	7.40%
26	Kab. Bandung Barat									5.42%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data rasio Dana Transfer terhadap Total Penerimaan Daerah inilah maka akan dilakukan analisis secara ekonometrik terhadap yang cukup tinggi (di atas 80%) dalam kurun waktu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 tidak dapat meningkatkan PAD nya secara signifikan. Sebagai contoh di Kabupaten Ciamis besarnya Rasio Dana Transfer terhadap Total Penerimaan Daerah dari tahun 2000 sampai dengan

tahun 2008 sebesar 92,63%, 82,72%, 83,94%, 83,60%, 88,61%, 84,13%, 77,08%, 85,62% dan 87,29% menyebabkan Kabupaten Ciamis tidak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dan besarnya Dana Transfer ini dikelola dengan baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin memperparah ketimpangan dengan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Tabel 3.6  
Perbandingan Dana Transfer Terhadap PAD  
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 s.d. 2008

No.	Kabupaten/Kota	2000 (%)	2001 (%)	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
1	Kab. Bandung	823.93	1050.40	914.62	874.64	844.73	836.86	938.92	1152.18	785.97
2	Kab. Bekasi	502.58	646.28	355.93	487.70	215.11	379.32	348.25	494.01	392.57
3	Kab. Bogor	337.62	556.48	504.82	430.23	483.80	393.21	430.26	445.58	428.24
4	Kab. Ciamis	1858.83	2550.45	2262.10	1734.46	1506.72	1832.05	2222.60	1647.57	2166.23
5	Kab. Cianjur	1228.48	1877.79	1432.39	1372.65	1202.03	1036.84	1299.08	1342.90	1284.61
6	Kab. Cirebon	1411.49	1613.35	1224.43	1053.42	947.49	799.29	815.67	796.00	862.74
7	Kab. Garut	1766.76	1968.47	1434.53	1500.38	1311.16	1228.90	1470.86	1410.91	1412.56
8	Kab. Indramayu	1460.19	1707.17	983.96	1236.26	1748.49	1244.41	1436.69	1812.25	1524.82
9	Kab. Karawang	472.49	619.42	613.59	714.20	690.76	637.26	661.93	692.39	701.20
10	Kab. Kuningan	1625.12	1815.97	1647.34	1706.98	1393.24	1145.05	1564.32	1541.84	1641.34
11	Kab. Majalengka	1625.22	1902.16	1078.45	1396.64	1424.52	1232.13	1221.09	1483.12	1598.58
12	Kab. Purwakarta	425.57	559.27	528.92	918.61	669.93	652.79	775.44	925.56	853.83
13	Kab. Subang	1057.22	1103.74	998.09	1099.39	1081.27	929.87	1105.12	1416.78	2929.88
14	Kab. Sukabumi	1201.39	1363.44	1100.51	1514.37	1580.28	1247.25	1451.36	1450.16	1150.22
15	Kab. Sumedang	573.46	782.49	716.54	789.77	688.81	627.39	912.56	921.98	862.21
16	Kab. Tasikmalaya	1308.98	1575.42	2511.51	2398.88	2118.63	1975.47	2097.47	2508.55	1863.39
17	Kota Bandung	253.98	380.68	284.84	292.19	373.13	177.57	341.29	479.70	432.40
18	Kota Bekasi	244.41	548.26	442.37	530.71	525.70	452.74	497.03	515.47	422.01
19	Kota Bogor	455.96	679.55	688.55	711.78	546.19	433.40	563.66	574.32	532.09
20	Kota Cirebon	352.42	523.37	571.38	1005.12	580.11	435.47	642.83	667.11	645.50
21	Kota Sukabumi	589.69	732.43	574.72	583.55	589.85	459.17	607.50	594.35	522.66
22	Kota Depok		535.96	631.24	793.08	589.94	508.76	636.80	729.23	526.01
23	Kota Tasikmalaya			728.65	876.53	781.81	620.51	968.67	786.32	800.80
24	Kota Cimahi			576.08	650.15	546.75	468.89	613.56	642.12	593.15
25	Kota Banjar					1087.55	616.82	1214.37	1569.50	1125.99
26	Kab. Bandung Barat									1600.09

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

### 3.2.3. Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat

Semenjak otonomi daerah dilaksanakan, upaya pengumpulan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, semua kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang ada kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan ini terutama untuk memperoleh PAD dengan menerbitkan Peraturan Daerah - Perda yang bertujuan untuk mengatur PAD dengan memberdayakan semua potensi yang ada. Namun pada kenyataannya Perda, sebagaimana juga dengan yang terjadi dengan di daerah lain di Indonesia, Perda tersebut malah bukannya menambah atau meningkatkan PAD namun malah menimbulkan masalah dari penerbitan Perda itu sendiri. Karena penerbitannya tidak sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang disahkan oleh DPR. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan PAD bukan berdasarkan hanya pada otonomi daerah beserta Perda tetapi yang dibutuhkan adalah kecerdikan, kreatifitas dan kecermatan dari Kepala daerah dan para pimpinan lainnya dalam menggali dan mengatur setiap potensi sosial ekonomi serta sumber daya yang ada dalam memenuhi PAD.

Perda yang mengatur PAD tersebut hanya berfokus pada dua hal, pajak daerah dan retribusi daerah. Karena sebenarnya PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kondisi ini tercermin pula pada Perda yang terkait dengan PAD Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat. Berikut ini akan disajikan Perda yang terkait dengan PAD di tiga Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut. Pemilihan tiga kabupaten ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi tiga wilayah di Jawa Barat, yaitu Pantai Utara, Priangan dan

Pantai Selatan yang pada kenyataannya daerah tersebut kondisi perekonomiannya sangat berbeda.

Tabel 3.7  
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di  
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Kab. Ciamis	Kab. Cirebon	Kab. Garut
Pajak Hotel dan Restauran	Perda No. 5, 1999	Perda No. 6, 1998	Perda No. 5, 1999
Pajak Hiburan	Perda No. 6, 1999	Perda No. 7, 1998	Perda No. 6, 1999
Pajak Reklame	Perda No. 4, 1999	Perda No. 8, 1998	Perda No. 4, 1999
Pajak Penerangan Jalan	Perda No. 19, 2001	Perda No. 9, 1998	Perda No. 19, 2001
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C	Perda No. 2, 1998	Perda No. 1, 1998	Perda No. 2, 1998
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan		Perda No. 2, 1998. Pada RAPBD TA 2001 tidak dianggarkan lagi, kewenangannya diserahkan kembali ke propinsi, namun masih ada realisasi penerimaan.	

Sumber: Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

**Tabel 3.8**  
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di  
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

Peraturan Daerah Tentang Retribusi	Kab. Ciamis	Kab. Cirebon	Kab. Garut
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Perda No. 2, 1994	Perda No. 20, 1997	Perda No. 8, 1989
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Perda No. 2, 2000	Perda No. 17, 1997	Perda No. 9, 1999
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil	Perda No. 11, 2001	Perda No. 18, 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 pungutan: - Retribusi penggantian biaya cetak KTP, dan - Retribusi Akta Catatan Sipil	Perda No. 12, 2001
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Perda No. 13, 1999	Perda No. 13, 1996	Perda No. 10, 1999
Retribusi Pasar	Perda No. 12, 1999	Perda No. 10, 1996	Perda No. 8, 1999
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Perda No. 7, 2001	Perda No. 19, 2000, pelimpahan kewenangan dari propinsi.	Perda No. 4, 2001
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda No. 23, 2001	Perda No. 19, 1993; Perda No. 5, 1989; Perda No. 9, 1995; SK Bupati No.028/SK/142.Um/86	Perda No. 3, 2000
Retribusi Pelelangan Ikan	Perda No. 8, 2001		
Retribusi Terminal Bis dan non Bis	Perda No. 7, 1991		Perda No. 1, 2000
Retribusi Tempat Penginapan/Pensanggrahan/Villa	Akta Perjanjian Notaris No. 3, 1989		
Retribusi Penyedotan Kakus	Perda No. 3, 2000	Perda No. 17, 1997	Perda No. 5, 2000
Retribusi Rumah Potong Hewan	Perda No. 8, 1995	Perda No. 22, 1983	Perda No. 2, 2000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata	Perda No. 21, 2001	Perda No. 3, 1993	Perda No. 11, 2001
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda No. 6, 1996	SK Bupati No.187, 1986	
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	Perda No. 22, 2000	Perda No. 15, 1993	Perda No. 7, 1999
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda No. 26, 2001	Perda No. 3, 2000	Perda No. 6, 1987
Retribusi Izin Gangguan	Perda No. 20, 2000	Perda No. 4, 2000	Perda No. 15, 2001
Retribusi Izin Trayek	Perda No. 18, 2001	Perda No. 14, 1989	Perda No. 5, 2001
Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi	Perda No. 12, 2001		Perda No. 17, 2001

Retribusi Izin Usaha Angkutan Dinas Perhubungan	Perda No. 16, 2001		
Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang	Perda No. 17, 2001		
Retribusi Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya	Perda No.20, 2001		
Retribusi Izin Usaha Jasa Traktor	Perda No. 22, 2001		
Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame dalam Wilayah Kab. Ciamis	Perda No. 19, 2001		
Retribusi. Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan	Perda No. 10, 2001		
Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan	Perda No. 9, 2001		
Retribusi Pengendalian dan Izin Usaha Limbah Cair	Perda No. 5, 2001		
Retribusi Terminal		Perda No. 4, 1991	
Retribusi Izin Lokasi (BPN)		Perda No. 2, 2000, dipungut sejak TA 2000	
Retribusi Tempat Khusus Parkir		Dicabut, sejak TA 2001 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi	
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat			t.a.d.
Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik			Perda No. 9, 2001
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah			Perda No. 14, 2001
Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Kontruksi			Perda No. 16, 2001

Sumber: Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

**Tabel 3.9**  
Peraturan Daerah tentang Penerimaan PAD Lainnya di  
Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Lainnya	Kab. Ciamis	Kab. Cirebon	Kab. Garut
Pelayanan Dokumen Lelang	Perda No. 24, 2001		
Pertambangan Umum di Kab. Ciamis	Perda No. 13, 2001		
Sumbangan Pihak Ketiga		Perda No. 7, 1987	

Sumber: Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat terlalu sibuk mengurus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena sebagaimana diketahui bahwa atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu telah ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang. Kewenangan terbatas dari daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kewenangannya kepada daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 *jo* UU No. 34 Tahun 2000 sangat terbatas. Pajak daerah dalam UU No. 18 Tahun 1997 *jo* UU No. 34 Tahun 2000 lebih menekankan pada keseragaman antar daerah, dalam bentuk kewenangan memungut pajak tertentu (*positive list*) yang basis pajaknya/objeknya telah ditetapkan dalam undang-undang walaupun daerah dapat menetapkan jenis pajak daerah lain berdasarkan kriteria yang ditetapkan UU tersebut, namun sangat sulit ditemukan jenis pajak daerah baru. Praktiknya, hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak berkontribusi signifikan terhadap PAD, terutama kepada kabupaten/kota. Bahkan hasil yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah lebih kecil dari pada biaya pemungutannya dan sebagian besar akibat dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi sehingga merusak iklim investasi. Hal-hal di atas mencerminkan masih rendahnya tingkat otonomi pendapatan dari daerah.

Tabel 3.10  
Rekapitulasi Peraturan Pajak Daerah Yang Dibatalkan  
Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 2002 s.d. 2007

No	Nomor Perda	Tentang	Kabupaten/Kota	Tahun Dibatalkan	Sektor
1	25 tahun 2002	Pajak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Kab. Indramayu	2002	ESDM
2	05 tahun 2002	Ketenagalistrikan	Kab. Indramayu	2002	ESDM
3	13 Tahun 2004	Izin Usaha Pertambangan	Kab. Tasikmalaya	2004	ESDM
4	11 Tahun 2001	Tera dan Tera Alat Ukur	Kab. Karawang	2001	Perdagangan
5	26 Tahun 2003	Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Industri	Kota Cimahi	2003	Perdagangan
6	10 Tahun 2001	Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan	Kab. Ciamis	2001	Kehutanan
7	9 Tahun 2001	Pelayanan Pengelola Kayu	Kab. Garut	2001	Kehutanan

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat ini seolah lupa untuk mendirikan dan memberdayakan BUMD sebagai salah satu pilar PAD. Saat ini hampir seragam di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, BUMD yang dimiliki hanya pada bidang usaha pengelolaan air minum (PDAM), pengelolaan pasar, pengelolaan sampah. Demikian pula dengan pendapatan lain-lain yang seolah tidak diperhatikan karena sebenarnya potensi ini besar seperti dengan penjualan aset-aset daerah yang tidak produktif dapat dikelola dengan manajemen aset yang baik.

Secara umum, pencapaian penerimaan PAD pada Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dalam 8 (delapan) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2008 masih pada kondisi yang kurang baik. Hal ini dinyatakan dengan fakta bahwa PAD walaupun pada sebagian kabupaten/kota mengalami peningkatan rasio jika dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah namun sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada taraf yang mengkhawatirkan.

Pada tahun 2008 hanya 10 dari 26 kabupaten/kota yang memiliki rasio PAD terhadap Total Penerimaan Pajak di atas 10% yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Cimahi. Sedangkan secara rata-rata untuk setiap tahunnya antara tahun 2000 sampai dengan 2008, rasio PAD terhadap Total Penerimaan Pajak adalah sebesar 11,76%.

Dari segi jumlah Rupiah dari PAD, terdapat kabupaten/kota yang PAD nya sudah mengalami peningkatan lebih dari 3 (dua) kalinya pada tahun 2008 dibandingkan penerimaan di tahun 2000, yaitu di Kabupaten Bekasi sebesar 4,67 kali dari Rp.22.586 juta menjadi Rp.105.513 juta, Kabupaten Cirebon sebesar 3,41 kali dari Rp.8.816 juta menjadi Rp.30.061 juta, Kota Bogor sebesar 5,37 kali dari Rp.14.647 juta menjadi Rp.78.715 juta, dan Kota Cirebon sebesar 3,42 kali dari sebesar Rp.13.447 juta menjadi Rp.45.988 juta. Namun demikian, di kabupaten/kota di Jawa Barat terdapat juga daerah dengan jumlah PAD yang pada tahun 2008 lebih kecil dibandingkan tahun 2000 yaitu di Kabupaten Ciamis sebesar 0,89%, Kabupaten Garut sebesar 0,87%, Kabupaten Majalengka sebesar 0,71%, dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,80%

Kondisi rendahnya kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa, sebagai wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia, Propinsi Jawa Barat juga menghadapi persoalan yang signifikan dalam hal tingkat otonomi dan kecukupan pendapatan (*revenue autonomy and adequacy*) untuk mendapatkan PAD.

## BAB 4

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat

##### 4.1.1. Model Analisis dan Pemilihan Variabel Yang Diuji

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dilakukan melalui pengujian beberapa variabel yang dianggap memberikan pengaruh bagi kapasitas pajak tersebut. Variabel-variabel yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Kapasitas PAD dengan melakukan modifikasi dengan mengganti sekaligus menambah variabel-variabel baru yang dianggap berpengaruh terhadap Kapasitas PAD di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 bahwa dalam mengukur Kapasitas PAD:

$$(PAD/Y)_{it} = f(\text{variables of tax handle}_{it}, (\text{error term})_{it})$$

Di mana:

(T)<sub>it</sub> : Total penerimaan PAD Kabupaten/Kota i pada tahun t;

(Y)<sub>it</sub> : GDP atau GNP atau GDRP Negara atau Daerah i pada tahun t

Variabel-variabel tax handle misalnya: pendapatan per kapita, sumbangan sektor industri terhadap GDP atau GDRP, sumbangan sektor pertanian GDP atau GDRP, tingkat keterbukaan ekonomi, dan sebagainya. *Error term* menunjukkan jauhnya nilai realisasi penerimaan pajak pemerintah atau daerah i terhadap nilai harapan (regresinya). Semakin besar nilai error dianggap semakin kecil kemauan politik untuk mendukung keberhasilan menggali pungutan pajak tersebut.

Pemilihan variabel ini mengikuti model yang telah ada sebelumnya berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Minh Le, Blanca Moreno-Dodson dan Jeep Rojchaichanthorn pada tahun 2008

$$Y_{it} = f(GDP_{it}, POP_{it}, TRADE_{it}, AGR_{it}, CORR_{it}, BUREAU_{it}).$$

Dimana semua variabel yaitu GDP, jumlah penduduk, peranan sektor perdagangan terhadap GNP, peranan sektor pertanian terhadap GNP, tingkat korupsi dan kelembagaan yang ada berpengaruh positif terhadap Kapasitas Pajak.

Modifikasi atas model ini dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dengan mengingat bahwa yang akan dihitung adalah Kapasitas PAD bukan Kapasitas Pajak. Dimana Kapasitas Pajak terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian dari usaha daerah, dan pendapatan lainnya yang diakui sebagai PAD hal ini berbeda dengan karakteristik pajak secara umum yang memungut pajak dari konsumsi atau keuntungan yang diperoleh dari usaha. Dalam banyak literatur, utamanya jurnal ilmiah keuangan negara, yang kerap dikaji para pakar –ketika mereka memperbincangkan keuangan pemerintah-- adalah upaya pajak (*tax effort*). Memang, pada umumnya pungutan pajak mendominasi pungutan pemerintah yang berasal dari dalam negeri (atau untuk kasus pemerintah daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri/PAD). Sehingga meski ada pungutan lain yang bukan pajak, membicarakan pungutan pajak berarti membicarakan porsi besar pungutan pemerintah. Bertolak dari sini, pada hakekatnya, mengartikan upaya PAD, untuk kasus pemerintah daerah, adalah analog dengan mengartikan upaya pajak itu. Dengan kata lain, cara untuk mengukur upaya PAD dapat secara sama dilakukan seperti para pakar itu mengukur upaya pajak.

Variabel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah rasio dari PDRB sektor Industri Pengolahan ditambah dengan PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dibagi dengan jumlah PDRB dari seluruh sektor usaha secara keseluruhan. Hal ini dilakukan karena peningkatan PAD sebenarnya merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah kabupaten/kota lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Sektor industri pengolahan sangat menentukan besarnya PAD karena kemudahan dalam pengumpulannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebenarnya merupakan eksese/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadajtmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif

terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas  $\geq 1$  (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut.

Sektor Pedagangan, Hotel dan Restoran adalah memiliki potensi yang besar untuk digali oleh Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat yang besarnya berada pada posisi kedua PDRB Provinsi Jawa Barat setelah sektor industri pengolahan. Sektor Pedagangan, Hotel dan Restoran ini memenuhi kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dikemukakan oleh Teresa Ter-Minassian (1997).<sup>13</sup> Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “*mobile*”. Pajak daerah yang sangat “*mobile*” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “*mobile*” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “*mobile*” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

---

<sup>13</sup> Ter-Minassian, Teresa, “Fiscal Federalism In Theory and Practice”, International Monetary Fund, Washington, 1997.

4. Pajak daerah seharusnya “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

**Tabel 4.1**  
Data PDRB Propinsi Jawa Barat Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun  
2000 – 2008 dalam Triliun Rupiah

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. PERTANIAN	31.26	33.31	36.00	37.73	41.08	46.43	52.59	62.89	67.85
a. Tanaman Bahan Makanan	23.67	25.33	26.44	27.05	28.21	32.21	36.75	45.56	47.23
b. Tanaman Perkebunan	1.56	1.84	2.13	2.27	2.81	3.67	3.64	3.90	4.34
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3.99	3.83	4.51	4.93	5.78	6.17	7.64	8.07	9.85
d. Kehutanan	0.59	0.78	0.70	0.76	0.98	0.64	0.71	0.89	0.91
e. Perikanan	1.44	1.54	2.21	2.72	3.29	3.74	3.85	4.47	5.52
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	9.08	8.34	7.28	8.06	9.23	11.95	12.93	12.62	14.32
a. Minyak dan Gas Bumi	8.49	7.65	6.55	7.23	8.41	11.11	11.83	11.35	12.84
b. Pertambangan Bukan Migas	0.20	0.23	0.23	0.27	0.22	0.23	0.32	0.34	0.40
c. Penggalian	0.38	0.46	0.50	0.56	0.60	0.61	0.78	0.93	1.08
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	82.98	94.71	105.50	120.65	128.74	173.07	214.24	236.63	270.55
a. Industri Migas	2.48	2.84	3.98	4.14	4.97	7.44	13.11	13.43	17.11
1. Pengilangan Minyak Bumi	2.48	2.84	3.98	4.14	4.97	7.44	13.11	13.43	17.11
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Bukan Migas	80.49	91.87	101.53	116.52	123.77	165.63	201.14	223.20	253.44
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	9.99	11.75	12.49	14.03	16.07	18.36	20.93	24.01	26.35
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	18.98	23.58	25.54	27.71	28.68	45.69	60.05	63.55	64.04
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	1.35	1.64	1.92	1.74	1.87	2.16	2.52	2.66	2.70
4. Kertas dan Barang Cetak	2.54	2.64	2.85	3.29	3.41	3.53	4.05	4.28	4.21
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	10.07	11.29	12.53	13.13	14.33	17.10	20.25	23.30	20.73
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	1.90	2.43	2.57	2.74	2.78	3.72	4.21	4.79	5.50
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.86	0.96	0.98	0.97	1.39	1.42	1.60	1.60	1.51
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	33.30	35.74	40.14	50.03	51.69	70.52	83.67	94.86	124.18
9. Barang lainnya	1.50	1.84	2.50	2.87	3.55	3.12	3.86	4.15	4.20
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4.24	5.45	6.48	8.49	9.69	11.26	14.19	15.41	16.91
a. Listrik	3.64	4.69	5.51	7.52	8.56	10.06	12.80	13.89	14.72
b. Gas Kota	0.32	0.43	0.50	0.57	0.67	0.73	0.90	0.97	1.59
c. Air Bersih	0.27	0.33	0.47	0.41	0.47	0.46	0.49	0.55	0.61
5. KONSTRUKSI	5.25	5.88	6.54	7.13	8.48	11.45	14.35	15.91	19.44
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	38.50	41.08	44.46	50.36	57.57	74.28	90.02	100.69	115.14
a. Perdagangan Besar & Eceran	32.28	34.02	37.00	41.90	47.54	62.83	77.31	87.09	99.49
b. Hotel	0.66	0.86	0.86	1.00	1.15	1.63	1.75	2.00	2.44
c. Restoran	5.57	6.20	6.60	7.46	8.88	9.82	10.96	11.60	13.20
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7.47	8.87	10.85	13.61	16.08	20.71	27.83	30.79	36.40
a. Pengangkutan	5.84	6.83	8.39	10.58	12.28	17.32	23.81	25.81	31.27
1. Angkutan Jalan Rel	0.29	0.33	0.41	0.43	0.44	0.46	0.44	0.39	0.41
2. Angkutan Jalan Raya	4.65	5.49	6.72	8.66	10.13	14.87	21.09	22.99	28.33
3. Angkutan Laut	0.30	0.30	0.34	0.39	0.45	0.40	0.43	0.42	0.23
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.18	0.25	0.40	0.53	0.51	0.60	0.74	0.92	1.13
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.41	0.45	0.50	0.57	0.75	0.99	1.11	1.09	1.16
b. Komunikasi	1.63	2.04	2.46	3.03	3.80	3.39	4.02	4.98	5.13
1. Pos dan Telekomunikasi	1.63	2.04	2.46	3.03	3.80	3.39	4.02	4.98	5.13
2. Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 4.1**  
Data PDRB Propinsi Jawa Barat Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun  
2000 – 2008 dalam Triliun Rupiah (Lanjutan)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	5.35	6.32	7.11	7.97	9.10	11.79	12.75	15.25	17.23
a. Bank	0.94	1.36	1.50	1.54	1.78	3.48	3.45	5.36	6.67
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.46	0.52	0.61	0.71	0.81	1.14	1.79	2.37	2.75
c. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Real Estat	2.82	3.12	3.54	4.09	4.51	5.44	5.73	5.55	5.74
e. Jasa Perusahaan	1.13	1.32	1.45	1.62	2.00	1.73	1.79	1.97	2.07
9. JASA-JASA	11.81	14.57	17.24	21.71	25.73	28.30	34.28	36.03	44.44
a. Pemerintahan Umum	7.04	9.38	11.16	14.03	17.58	19.14	21.89	22.53	29.51
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	4.37	5.81	6.92	8.70	10.90	11.87	13.57	13.97	18.30
2. Jasa Pemerintah lainnya	2.68	3.56	4.24	5.33	6.68	7.27	8.32	8.56	11.21
b. Swasta	4.77	5.19	6.08	7.68	8.15	9.16	12.39	13.49	14.93
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	0.84	0.92	1.22	1.42	1.46	1.73	1.95	2.34	2.71
2. Jasa Hiburan & Rekreasi	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25	0.27	0.32
3. Jasa Perorangan & Rumahtangga	3.82	4.14	4.71	6.09	6.49	7.21	10.19	10.89	11.90
PDRB	195.94	218.53	241.47	275.72	305.70	389.24	473.19	526.22	602.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Selain dari hal sebagaimana tersebut di atas, mengenai alasan pemilihan variabel sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, jasa dan restoran dalam penelitian ini adalah dari penelusuran dan penelaahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya adalah bahwa objek pajak dan retribusi daerah sebagian besar adalah yang terkait dengan aktivitas ekonomi dari kedua sektor ini.

TABEL 4.2.  
PAJAK KABUPATEN/KOTA DAN PDRB YANG MEMPENGARUHINYA

No	Pajak	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Hotel						X			
2	Restoran						X			
3	Hiburan						X			
4	Reklame			X			X		X	X
5	Penerangan Jalan			X						
6	Galian C		X							
7	Parkir						X			

Keterangan:

- I. Pertanian
- II. Pertambangan dan Penggalian
- III. Industri Pengolahan
- IV. Listrik Gas dan Air Bersih
- V. Konstruksi
- VI. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- VII. Pengangkutan dan Komunikasi
- VIII. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- IX. Jasa-jasa

Sumber: Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

TABEL 4.2.  
RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA DAN PDRB YANG MEMPENGARUHINYA

No	Retribusi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	Pelayanan Jasa Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pelayanan Kesehatan									X
3	Penggantian Biaya KTP/Catatan Sipil									X
4	Pelayanan Pemakaman									X
5	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum						X	X		
6	Pelayanan Pasar						X			
7	Pengujian Kendaraan Bermotor							X		
8	Pemeriksaan Alat Pemadam			X			X			
9	Penggantian Cetak Peta									X
10	Pengujian Kapal Perikanan	X								
11	Pemakaian Kekayaan Daerah									X
12	Pasar Grosir/Pertokoan						X			
13	Tempat Pelelangan						X			
14	Terminal							X		
15	Tempat Usaha Parkir						X			
16	Tempat Penginapan/Villa						X			
17	Penyedotan Kakus									X
18	Rumah Potong Hewan	X								
19	Pelayanan Pelabuhan Kapal							X		
20	Tempat Rekreasi & Sarana Olahraga						X			
21	Penyebrangan di Atas Air							X		
22	Pengelolaan Limbah Cair									X
23	Penjualan Produksi Usaha Daerah									X
24	Ijin Mendirikan Bangunan					X				
25	Ijin Tempat Jualan Beralkohol						X			
26	Ijin Gangguan	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Ijin Trayek							X		

Keterangan:

I. Pertanian

II. Pertambangan dan Penggalian

III. Industri Pengolahan

IV. Listrik Gas dan Air Bersih

V. Konstruksi

VI. Perdagangan, Hotel dan Restoran

VII. Pengangkutan dan Komunikasi

VIII. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

IX. Jasa-jasa

Sumber: Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan per kapita dijadikan sebagai variabel penelitian ini karena peningkatan pendapatan per kapita pada peningkatan konsumsi akan barang dan jasa

yang pada akhirnya akan bermuara peningkatan penerimaan PAD. Pendapatan per kapita dipilih menjadi variabel dalam penelitian ini karena menunjukkan besarnya Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Kemampuan daya beli yang pada akhirnya dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian berjalan lebih cepat dan akan menggerakkan sektor-sektor usaha untuk memenuhi permintaan tersebut.

Variabel berikutnya adalah Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Walaupun idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002). Secara umum dana PKPD terdiri dari bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*spesific grant*) (Davey, 1998). Penggunaan DAU, DBHP dan DBH SDA (*block grants*) diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Pada awal penerapannya DAU banyak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin terutama untuk belanja pegawai sebagai dampak pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai pemda (Isdijoso, dan Wibowo, 2002). Sedangkan penggunaan DAK (*spesific grants*) telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menyediakan 10% dana pendamping. Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*). Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Di samping itu tujuan pemberian DAK adalah untuk mengurangi *inter-jurisdictional spillovers*, dan meningkatkan penyediaan barang publik di daerah (Mahi, 2002).

Dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan maka peranan DAK sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional, misalnya DAK untuk bantuan keluarga miskin. Karena diyakini bahwa Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana transfer pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada sisi yang lain dapat memperburuk ketimpangan antardaerah. Peningkatan penerimaan daerah akan

memberikan keleluasaan untuk mendesain kebijakan yang dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran daerah untuk investasi akan meningkatkan kapital stok daerah dan memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap konsumsi dan tabungan (investasi) masyarakat sehingga akan memperbesar basis pajak daerah. Dampak selanjutnya yaitu terjadi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah akan meningkat.

#### **4.1.2. Uji Ekonometrik Dalam Analisis Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat**

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah Variabel sektor pertanian terhadap PDRB, Variabel sektor industri terhadap PDRB, Variabel sektor dagang terhadap PRDB, Variabel kepadatan penduduk, Variabel Dana Tranfer Pusat ke daerah, dan Variabel pendapatan per kapita.

Berdasarkan pengujian estimasi menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (OLS – Ordinary Least Square) dengan analisis regresi pada data panel pada persamaan:

$$(I) \quad \ln T/Y = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2\ln(\text{trb}) + a_3d(\ln(\text{kapita}))$$

$$(II) \quad \ln T = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2\ln(\text{trb}) + a_3d(\ln(\text{kapita}))$$

$$(III) \quad \ln PAD/Y = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2\ln(\text{trb}) + a_3d(\ln(\text{kapita}))$$

$$(IV) \quad \ln PAD = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2\ln(\text{trb}) + a_3d(\ln(\text{kapita}))$$

$$(V) \quad \ln T = a_0 + a_1\text{pertanian} + a_2\text{industri} + a_3\text{dagang} + a_4\ln(\text{density}) + a_5\ln(\text{trb}) + a_6\ln(\text{kapita}) + a_7\ln(\text{pad\_sebelumnya})$$

$$(VI) \quad \ln T/Y = a_0 + a_1\text{pertanian} + a_2\text{industri} + a_3\text{dagang} + a_4\ln(\text{density}) + a_5\ln(\text{trb}) + a_6\ln(\text{kapita}) + a_7\ln(\text{pad\_sebelumnya})$$

$$(VII) \quad \ln PAD/Y = a_0 + a_1\text{pertanian} + a_2\text{industri} + a_3\text{dagang} + a_4\ln(\text{density}) + a_5\ln(\text{trb}) + a_6\ln(\text{kapita}) + a_7\ln(\text{pad\_sebelumnya})$$

$$(VIII) \ln PAD = a_0 + a_1 \text{pertanian} + a_2 \text{industri} + a_3 \text{dagang} + a_4 \ln(\text{density}) + a_5 \ln(\text{trb}) + a_6 \ln(\text{kapita}) + a_7 \ln(\text{pad\_sebelumnya})$$

dimana:

1. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari usaha daerah dan Pendapatan lainnya yang sah.
2. Pertanian adalah PDRB sektor pertanian
3. Industri adalah PDRB sektor industri
4. Dagang adalah PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran
5. Density adalah kepadatan penduduk per kabupaten/kota
6. Kapita adalah pendapatan per kapita
7. Transfer Receipt Balance adalah dana transfer dari pemerintah pusat
8. Gabindang adalah penjumlahan dari PDRB Industri dan Perdagangan

Dengan hipotesis variabel-variabel tersebut berpengaruh positif pada Kapasitas Pajak Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, maka dihasilkan model persamaan yang terbaik setelah dilakukan pengujian adalah sebagai berikut:

$$\ln(PAD) = a_0 + a_1 \text{pertanian} + a_2 \text{industri} + a_3 \text{dagang} + a_4 \ln(\text{density}) + a_5 \ln(\text{trb}) + a_6 \ln(\text{kapita}) + a_7 \ln(\text{pad\_sebelumnya})$$

Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kapasitas PAD} = 0.004691 \text{ pertanian} + 0.009074 \text{ industri} + 0.005983 \text{ dagang} + 0.101296 \ln(\text{density}) + 0.245917 \ln(\text{trb}) + 0.508339 \ln(\text{kapita}) + 0.598607 \ln(\text{pad\_sebelumnya}) - 1.89520$$

Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan Uji Stasioner dengan menggunakan Levin lin chu test. Uji stasioner ini dilakukan agar tidak terjadi tindakan yang meregresikan variable yang tidak stasioner akan menghasilkan regresi yang spuorious atau bias.

Pada pengujian data panel tersebut, asumsi-asumsi harus dipenuhi agar menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian lanjutan terhadap hasil akhir persamaan dengan pengujian multicollinearity, serial correlations dan heterocedastisity menunjukkan hasil yang BLUE.

Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa hasil pengujian ini dengan tingkat keyakinan 95%, Semua variable berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PAD. Yang tidak signifikan adalah kontribusi sektor dagang dan perubahan dari pertumbuhan pendapatan per kapita, dengan perincian sebagai berikut:

1. pertanian memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector pertanian sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,004 % pada PAD
2. Industri memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector industri sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,009 % pada PAD
3. Kepadatan memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap pertumbuhan kepadatan 1% akan menyebabkan pertumbuhan 0,1 % pada PAD
4. TRB memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN TRB sebesar 1persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,25 % pada PAD
5. pertumbuhan PAD sebelumnya turut memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN PAD sebelumnya sebesar 1 persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,6 % pada PAD saat ini, hal ini dilakukan untuk menanggulangi autokorelasi yang terjadi antar periode.
6. Adjusted R-squared = 0,94 menunjukkan seberapa besar variable independent kita memberikan kontribusi untuk menjelaskan variasi dari nilai pertumbuhan PAD adalah 94%.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh konstanta yang bernilai negatif. Artinya jika nilai  $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a_5 = a_6 = 0$ , akan diperoleh  $PAD = - 1.89520$ . Nilai ini adalah tidak mustahil karena bila variabel PAD adalah jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pemungutan dari aktivitas ekonomi dan faktor non ekonomi atau

dengan kata lain PAD tersebut tidak dengan serta merta ada tanpa adanya aktivitas ekonomi dan faktor non ekonomi. Kondisi ini telah sesuai dengan teori statistik karena hasil telah memastikan bahwa asumsi-asumsi regresi sudah terpenuhi sehingga model regresi dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Asumsi regresi linier klasik tersebut antara lain adalah: model regresi dispesifikasikan dengan benar, data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinieritas antar peubah bebas, dan tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan secara ekonomi, kondisi ini telah sesuai karena tidak mungkin ada PAD tanpa adanya kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Sehingga, konstanta yang negatif ini tidak menjadi masalah. Secara teoritis nilai konstanta yang negatif bukan menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa persamaannya salah (Rietveld dan Sunaryanto, 1994).

Dari hasil pengujian ini sektor pertanian cukup signifikan terhadap PAD. Berdasarkan Tabel 4.2. dan Tabel 4.3. memang diketahui dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Propinsi Jawa Barat yang dikenakan secara langsung dapat dikenakan PAD dari sektor pertanian adalah Retribusi Pelayanan Jasa Umum, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Rumah Potong Hewan. Namun demikian sebenarnya sektor pertanian akan mendorong PAD dari sektor usaha lainnya, karena:

#### 1. Potensi Ekonomi Sektor Pertanian Terhadap Kapasitas PAD

Untuk melihat potensi ekonomi maupun kapasitas PAD yang dihasilkan oleh sektor pertanian haruslah melihat efeknya yang diberikan sektor pertanian bagi sektor usaha lainnya. Gambaran kekuatan ekonomi pertanian ini dikemukakan oleh Lynn, 2003 dimana dalam studi mengenai Indonesia, menghitung rasio  $P_a/P_i$ , dan laju pertumbuhan pendapatan daerah bruto (PDB) pertanian. Apabila nilai tukar petani adalah 0,78 selama tiga periode, dan pertumbuhan 0,9 persen per tahun. Ketika nilai tukar petani meningkat menjadi 0,83 dan 1,06, pertumbuhan pertanian meningkat menjadi 4,3 persen dan kemudian menjadi 8,3 persen (Lynn, 2003).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nilai tukar petani (sectoral terms of trade) untuk pertanian adalah rasio harga barang pertanian ( $P_a$ ) dan harga barang industri ( $P_i$ ). Kenaikan nilai tukar petani (NTP) berarti harga pangan naik lebih cepat daripada barang industri. Petani dapat membeli lebih banyak keperluan mereka pada hasil yang sama dan mendorong petani untuk

Dalam kasus ini, sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap penghimpunan PAD karena kegiatan pertanian sangat bermacam-macam. Kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- i. Persiapan pengadaan alat kerja, tenaga kerja, bibit, pupuk dan hal lain yang dibutuhkan.
- ii. Persiapan tanah.
- iii. Penanaman, penyiangan.
- iv. Penyemprotan pestisida.
- v. Pengusiran burung dan binatang dari sawah.
- vi. Pengambilan hasil panen.
- vii. Penyimpanan hasil panen.
- viii. Penjualan hasil panen.
- ix. Perawatan peralatan.

Artinya disini adalah pada sektor pertanian memang sedikit sekali PAD yang dapat dikontribusikan tetapi mendorong PAD pada sektor usaha lainnya.

---

meningkatkan hasil mereka (Lynn, 2003). Nilai tukar petani (NTP) juga dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP semakin tinggi daya beli petani. Peningkatan nilai tukar petani (terms of trade) hanyalah pada masa transisi. mengilustrasikan bagaimana harga pertanian relatif berubah seiring dengan waktu. Sebagai respon harga pertanian yang tinggi, sumber daya akan ditarik ke pertanian, lalu meningkatkan hasil. Ini kemudian berlanjut sebagai awal peningkatan permintaan pangan. Lambatnya permintaan akan pangan dan bahan baku, dan produktivitas pertanian dan penawaran meningkat. Nilai tukar petani (terms of trade) berbalik dan akan mendorong industri. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, pertanian harus menjadi prioritas. Supaya pertanian tetap menarik dibutuhkan kenaikan atau stabilitas nilai tukar petani (terms of trade) yang merefleksikan kelangkaan (Lynn, 2003).

Tabel 4.3.

## Sektor Usaha Penghasil PAD yang Terkait Dengan Sektor Pertanian

Sub Sektor Usaha	Sektor Usaha	Dampak	Kegunaan bagi Pertanian
Makanan, Minuman dan Tembakau	Industri Pengolahan	Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	Industri Pengolahan	Sebagian Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	Industri Pengolahan	Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Kertas dan Barang Cetakan	Industri Pengolahan	Sebagian Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	Industri Pengolahan	Langsung	Proses pertanian
Perdagangan Besar & Eceran	Perdagang, Hotel & Restoran	Sebagian Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Hotel	Perdagang, Hotel & Restoran	Tidak Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Restoran	Perdagang, Hotel & Restoran	Sebagian Langsung	Pengolahan hasil pertanian
Angkutan Jalan Rel	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian
Angkutan Jalan Raya	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian
Angkutan Laut	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian
Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian
Angkutan Udara	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian
Jasa Penunjang Angkutan	Pengangkutan & Komunikasi	Sebagian Langsung	Distribusi hasil pertanian

Walaupun secara peraturan pertanian tidak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD namun pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan di Guinea Bissau yang menunjukkan pentingnya pertanian di dalam pertumbuhan sebuah ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, pertumbuhan pertanian akan meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan daerah bruto (PDB). Guinea-Bissau, sebuah negara Afrika Barat, pada tahun 1999 memperoleh 60 persen pendapatan daerah bruto (PDB) dari sektor pertanian, 15 persen dari sektor industri, dan sisanya dari sektor jasa. Apabila sektor industri tumbuh sebesar 6 persen pertahun, dan sektor jasa tumbuh 10 persen pertahun, pertumbuhan sektor pertanian dua kali lipat dari 3 persen menjadi 6 persen, akan meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan daerah bruto dari 4,2 persen menjadi 7 persen. Karena pertumbuhan populasi adalah 2,4 persen pada tahun 1998, menggandakan pertumbuhan pertanian akan meningkatkan pendapatan per kapita dari 1,8 persen menjadi 4,6 persen (Lynn, 2003). Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa ada efek multiplier dari pembangunan dan pertumbuhan di sektor pertanian yang mendorong perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Jika dilakukan telaahan secara mendalam, sebagaimana pula dikemukakan oleh Lynn, 2003, Pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan. Kontribusi pertanian tersebut adalah:

- a. Meningkatkan persediaan makanan.
- b. Pendapatan dari ekspor.
- c. Pertukaran tenaga kerja ke sektor industri.
- d. Pembentukan modal.
- e. Kebutuhan akan barang-barang pabrikan.

Sehingga karena merupakan evolusi alamiah seiring dengan proses industrialisasi dimana PDB dari pertanian relatif menurun, sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor skunder lainnya, dan sektor tersier meningkat. Perubahan struktur ekonomi seperti ini juga terjadi di Indonesia. Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan berarti bahwa volume produksi berkurang (pertumbuhan negatif). Tetapi laju pertumbuhan outputnya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lain.

## 2. Karakteristik Tenaga Kerja di Sektor Pertanian

Struktur tenaga kerja di Indonesia sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009) hal ini terjadi karena Sektor Pertanian walaupun tidak memiliki kontribusi yang besar dalam share PDRB secara keseluruhan namun efektif dalam menghimpun tenaga kerja karena dapat mengakomodir 2 karakteristik penting tenaga kerja pada pertanian yaitu orang yang menanam harus memiliki keahlian yang banyak dan perempuan dan anak-anak memiliki bagian yang signifikan dalam tenaga kerja pertanian.

Pengguna tenaga kerja berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0,29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen. Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen.

Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi. Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

Struktur tenaga kerja ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di dunia. Tenaga kerja di bidang pertanian juga semakin menurun antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1990 dari 83% menjadi 63% di Afrika, 82% menjadi 62% di Asia, dan dari 54% menjadi 25% di Amerika Latin. Tren ini sesuai dengan Engel's Law yang menyatakan bahwa kecenderungan orang dalam mengkonsumsi barang yang berbeda dalam proporsi yang berbeda ketika pendapatan meningkat. Saat pendapatan meningkat orang akan mengurangi persentase konsumsi pada makanan. Hal ini menggambarkan akan tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Negara berkembang harus bekerja keras untuk percepatan pembangunan industri, tanpa diimbangi dengan pembangunan di sektor pertanian yang cepat (Lynn, 2003).

Karena dalam siklus usaha pertanian yang terjadi adalah pada beberapa tanaman ditanam dan dipanen tidak dalam waktu bersamaan, hal ini sering dilakukan lebih dari sekali setahun. Pertanian melibatkan juga peternakan, baik skala besar, skala kecil, untuk diperdagangkan maupun konsumsi sendiri. Kegiatan ini memerlukan penjadwalan yang tepat. Anak mungkin diperlukan untuk bekerja di sawah, opportunity cost dari pendidikan mereka akan menjadi lebih tinggi saat puncak musim, contohnya saat panen. Kondisi ini memungkinkan pekerja di sektor pertanian melakukan kegiatan lainnya (tidak seperti pada pekerja di sektor usaha lainnya) seperti merawat rumah, berdagang, merawat anak dan orang tua, mencari pinjaman, berurusan dengan pemerintah, berpartisipasi pada politik desa dan organisasi sosial.

## 4.2. PENGUKURAN UPAYA PAD KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT

Sebagaimana disebutkan pada Bab 2 mengenai Arti dan Pengukuran Upaya PAD: Tinjauan Literatur, Pengukuran upaya pajak diukur berdasarkan adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapan tersebut berikut ini disajikan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1.

### Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Kab Bandung	99.76%	98.39%	100.16%	100.59%	101.17%	101.41%	100.31%	99.13%	100.41%
2	Kab Bekasi	96.93%	96.70%	102.00%	99.50%	106.40%	101.51%	102.08%	99.73%	101.52%
3	Kab Bogor	105.98%	102.71%	103.49%	104.69%	103.68%	105.01%	104.25%	104.08%	104.46%
4	Kab Ciamis	97.74%	95.98%	97.26%	100.14%	101.91%	101.75%	99.87%	101.36%	100.14%
5	Kab Cianjur	103.17%	100.15%	102.90%	103.31%	104.49%	105.76%	103.93%	103.62%	103.86%
6	Kab Cirebon	97.03%	97.43%	100.09%	101.85%	102.63%	103.99%	104.11%	104.27%	103.42%
7	Kab Garut	97.97%	98.50%	101.54%	101.20%	102.31%	102.82%	101.46%	101.87%	101.65%
8	Kab Indramayu	95.43%	95.52%	100.64%	98.79%	95.26%	97.76%	95.79%	94.14%	95.12%
9	Kab Karawang	104.68%	103.05%	102.87%	101.35%	101.44%	101.57%	101.42%	100.93%	100.68%
10	Kab Kuningan	97.97%	98.44%	99.58%	99.51%	101.31%	102.98%	100.40%	100.60%	99.79%
11	Kab Majalengka	96.98%	96.82%	102.44%	100.19%	99.99%	101.28%	101.82%	99.94%	99.06%
12	Kab Purwakarta	104.61%	102.88%	103.71%	98.45%	101.93%	101.85%	100.56%	98.90%	99.44%
13	Kab Subang	101.68%	102.91%	103.92%	103.39%	103.59%	104.77%	103.45%	101.20%	94.43%
14	Kab Sukabumi	101.87%	101.62%	103.64%	100.82%	100.19%	102.27%	101.24%	101.45%	103.42%
15	Kab Sumedang	106.47%	104.26%	105.26%	104.35%	105.59%	106.32%	103.13%	102.98%	103.53%
16	Kab Tasikmalaya	101.19%	100.63%	101.59%	101.40%	102.59%	103.76%	101.38%	101.97%	102.82%
17	Kota Bandung	106.69%	103.81%	106.22%	106.00%	104.06%	109.88%	104.32%	102.01%	102.63%
18	Kota Bekasi	105.55%	99.62%	101.62%	100.20%	100.28%	101.41%	100.81%	100.55%	101.94%
19	Kota Bogor	102.35%	99.89%	99.91%	100.08%	102.20%	103.98%	101.67%	101.42%	101.98%
20	Kota Cirebon	99.98%	97.78%	97.47%	94.27%	97.42%	100.15%	97.61%	97.21%	97.63%
21	Kota Sukabumi	102.21%	100.85%	103.64%	103.45%	103.12%	105.23%	102.80%	102.99%	104.06%
22	Kota Depok	105.95%	101.52%	100.26%	98.62%	101.02%	102.17%	100.30%	99.45%	102.03%

Berdasarkan data Upaya PAD di atas diketahui bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2008, Upaya Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%. Hanya Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon saja yang secara rata-rata kurang dari 100% yaitu masing-masing sebesar 99,57%, 96,49%, 99,84%, dan 97,72%.

Hal ini berarti bahwa PAD, pada sebagian daerah, telah dipungut sesuai dengan kapasitas PAD nya. Namun demikian mengingat kontribusi PAD yang kecil dibandingkan dengan Dana Transfer dalam menyokong kemandirian keuangan daerah tetap diperlukannya adanya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek dari PAD, hal ini cukup sulit untuk dilakukan karena memiliki konsekwensi untuk terlebih dahulu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah secara limitatif menetapkan objek PAD. Sedangkan intensifikasi PAD dapat dilakukan dengan diantaranya dengan memperbanyak kantor dinas pendatan daerah (sebagaimana diketahui biasanya di setiap kabupaten/kota hanya ada dua kantor dinas pendapatan daerah yaitu yang berada di kantor dinas dan yang berlokasi kantor samsat) dan memberdayakan aparatur yang memungut PAD.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.2. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

#### 1. Terkait dengan Kapasitas PAD:

- a. Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan menunjukkan bahwa hasil pengujian ini dengan tingkat keyakinan 95%, Semua variable berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PAD. Yang tidak signifikan adalah kontribusi sektor dagang dan perubahan dari pertumbuhan pendapatan per kapita, dengan perincian sebagai berikut:
  - i. pertanian memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector pertanian sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,004 % pada PAD
  - ii. Industri memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector industri sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,009 % pada PAD
  - iii. Kepadatan memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap pertumbuhan kepadatan 1% akan menyebabkan pertumbuhan 0,1 % pada PAD
  - iv. TRB memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN TRB sebesar 1persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,25 % pada PAD
  - v. pertumbuhan PAD sebelumnya turut memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN PAD sebelumnya sebesar 1 persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,6 % pada PAD saat ini, hal ini dilakukan untuk menanggulangi autokorelasi yang terjadi antar periode.

- vi. Adjusted R-squared = 0,94 menunjukkan seberapa besar variable independent kita memberikan kontribusi untuk menjelaskan variasi dari nilai pertumbuhan PAD adalah 94%.

## 2. Terkait dengan Upaya PAD:

Berdasarkan data Upaya PAD di atas diketahui bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2008, Upaya Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%. Hanya Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon saja yang secara rata-rata kurang dari 100% yaitu masing-masing sebesar 99,57%, 96,49%, 99,84%, dan 97,72%.

## 4.3.SARAN

1. Agar tercapai kemandirian keuangan daerah, Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat harus melakukan intensifikasi dengan cara diantaranya sebagai berikut:
  - a. Memperbaiki aspek kelembagaan pengelola PAD berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
  - b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
  - c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
  - d. Peningkatan SDM pengelola PAD.
  - e. Peningkatan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.
2. Agar tercapai kemandirian keuangan daerah, Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat harus melakukan ekstensifikasi PAD dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

3. Dalam hal pengumpulan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- a. Dari sisi cara pengumpulannya, dilakukan dengan melakukan analisis atas sistem pemungutan yang ditetapkan dan dilakukan, sistem insentif bagi aparat pemungut pajak, Apakah sistem mudah dipahami masyarakat, sehingga tidak membuka peluang manipulasi oleh aparat pemungut?, Bagaimana penegakan hak-hak pembayar pajak dan retribusi daerah?, serta berapa besar persentase pungutan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah.
  - b. Dari sisi dampak pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan analisis atas dampak pengumpulan PAD bagi kelompok masyarakat dengan cara diantaranya melakukan pengukuran siapakah yang lebih diuntungkan dari kebijakan pungutan pajak dan retribusi daerah – yang kaya (sistem regresif) atautkah yang miskin (sistem progresif), Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap anggaran, Apakah pendapatan dari pajak dan retribusi daerah cukup untuk membiayai program penting untuk masyarakat, dan Bagaimana keterkaitan antara tingkat pungutan dengan pelayanan publik yang diperoleh masyarakat

Hal ini harus dilakukan untuk menghindari tingginya beban pajak dan retribusi daerah yang harus ditanggung oleh masyarakat ternyata tidak diimbangi dengan pelayanan dan pemenuhan hak warga yang memadai dan menjadi disinsentif dalam pembangunan ekonomi.

Terkait dengan banyak Perda atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, agar kabupaten/kota

melakukan perubahan dan pembaruan dalam rangka penyusunan peraturan daerah (melibatkan *stakeholder* yang lain) dan melakukan peningkatan kemampuan para penyelenggara pemerintahan di daerah di bidang *legislative drafting*

4. Dalam hal pengumpulan PAD dari hasil pengelolaan milik daerah dari BUMD. Posisi BUMD di era otonomi sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD namun dalam kenyataannya banyak perusahaan daerah yang merugi sehingga dibutuhkan adanya pembinaan, pengembangan dan pengawasan dari kepala daerah kabupaten/kota dan yang terpenting adanya kontrol dari masyarakat. Strategi yang mungkin dapat dilakukan oleh BUMD adalah dengan melakukan *Joint operation* untuk bertujuan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi (operasi) perusahaan ataupun *Joint venture* dengan melakukan kerjasama dalam bentuk usaha patungan sehingga keuntungan atau kerugian ditanggung bersama.
5. Dalam hal pengumpulan PAD berupa hasil penjualan aset tetap daerah, Jasa giro, dan Bunga deposito. Dari hasil penjualan aset tetap daerah harus memperhatikan penilaian atas aset, khususnya dalam menentukan nilai wajar atas aset, sehingga dapat dilakukan manajemen aset agar didapat optimalisasi aset tetap daerah. Sedangkan dari pendapatan dari Jasa Giro dan Bunga Deposito ditempatkan secara proporsional sehingga tidak mengganggu kinerja ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2000). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit RajawaliPers.
- Guritno Mangkoesobroto. (2000). *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: Penerbit BPF-UGM
- Hestu Cipto Handoyo. (1998). *Otonomi Daerah: Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Hirawan, Susiati B. (1993). "Pengembangan Pola Bantuan Daerah dalam Repelita VI (Pembangunan Jangka Panjang Tahap II)" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol. XLI, No.3, hal. 295-317.
- Iman Rozani. (2000). "Reformasi Sistem Perpajakan Daerah Ditinjau dari Sudut Pandang Kepentingan Daerah". Paper dipresentasikan dalam Seminar Membedah APBD Menyongsong Desentralisasi Fiskal, Jakarta: 21-22 Nopember.
- Kaho, Josep Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Edisi Pertama, Cetakan Keempat. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Kunarjo. (1996). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Ketiga. Jakarta: UI Press.
- MacAndrews, Colin dan Ichlasul Amal. (2000). *Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubyarto. (2001). *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPF-UGM.
- Nick Devas, dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press.
- Pide, Andi Mustari. (1999). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Me masuki Abad XXI*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Riant Nugroho D. (2000). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Shah, Anwar and Zia Qureshi. (1994). *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia: Issues and Reform Options* [Discussion Paper No.239]. Washington D.C.: World Bank.

Suparmoko. (1991). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Penerbit PBF-E-UGM.

Weiss, John. (1995). *Economic Policy in Developing Countries: The Reform Agenda*. London: Prentice Hall.

Widjaja, H.A.W.(1998). *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.



**LAMPIRAN**



**MODEL 1** =  $\ln T/Y = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2\ln(\text{trb}) + a_3d(\ln(\text{kapita}))$

## 1. METODE OLS

Dependent Variable: LNA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/11 Time: 11:43

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.421563	1.190354	-2.874408	0.0045
GABINDAG?	0.506644	0.300492	1.686049	0.0934
LNTRB?	0.078668	0.090892	0.865505	0.3878
LNKAPITA?	0.069157	0.098857	0.699565	0.4850
R-squared	0.023563	Mean dependent var		-2.001896
Adjusted R-squared	0.008464	S.D. dependent var		0.924840
S.E. of regression	0.920918	Akaike info criterion		2.693103
Sum squared resid	164.5294	Schwarz criterion		2.759533
Log likelihood	-262.6172	F-statistic		1.560533
Durbin-Watson stat	0.192377	Prob(F-statistic)		0.200317

Estimation Command:

LS(COV=STACKEDWHITE) LNA? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

LNA\_BANDUNG = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)\*LNTRB\_BANDUNG + C(4)\*LNKAPITA\_BANDUNG

LNA\_BEKASI = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BEKASI + C(3)\*LNTRB\_BEKASI + C(4)\*LNKAPITA\_BEKASI

LNA\_BOGOR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BOGOR + C(3)\*LNTRB\_BOGOR + C(4)\*LNKAPITA\_BOGOR

LNA\_CIAMIS = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_CIAMIS + C(3)\*LNTRB\_CIAMIS + C(4)\*LNKAPITA\_CIAMIS

LNA\_CIANJUR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_CIANJUR + C(3)\*LNTRB\_CIANJUR + C(4)\*LNKAPITA\_CIANJUR

$$\text{LNA\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNA\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNA\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNA\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNA\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNA\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNA\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNA\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNA\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNA\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNA\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNA\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNA\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNA\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNA\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNA\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNA\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{LNA\_BANDUNG} = -3.421562808 + 0.506643794*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.07866759416*\text{LNTRB\_BANDUNG} + 0.06915706947*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNA\_BEKASI} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_BEKASI} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNA\_BOGOR} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_BOGOR} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNA\_CIAMIS} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_CIAMIS} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNA\_CIANJUR} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_CIANJUR} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNA\_CIREBON} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_CIREBON} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNA\_GARUT} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_GARUT} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNA\_INDRAMAYU} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNA\_KARAWANG} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KARAWANG} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNA\_KUNINGAN} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNA\_MAJALENGKA} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNA\_PURWAKARTA} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNA\_SUBANG} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_SUBANG} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNA\_SUKABUMI} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNA\_SUMEDANG} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNA\_TASIKMALAYA} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNA\_KOTABANDUNG} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNA\_KOTABEKASI} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNA\_KOTABOGOR} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNA\_KOTACIREBON} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNA\_KOTADEPOK} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNA\_KOTASUKABUMI} = -3.421562808 + 0.506643794 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.07866759416 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + 0.06915706947 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

## 2. METODE EFEK RANDOM (MER)

Dependent Variable: LNA?

Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)

Date: 01/04/11 Time: 11:44

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

Swamy and Arora estimator of component variances

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.037965	1.177086	-5.129588	0.0000
GABINDAG?	0.074900	0.655234	0.114311	0.9091
LNTRB?	0.344609	0.104820	3.287637	0.0012
LNKAPITA?	-0.234360	0.174209	-1.345284	0.1801
Random Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	-0.307692			
_BEKASI--C	-0.068145			
_BOGOR--C	0.401437			
_CIAMIS--C	-0.989363			
_CIANJUR--C	-0.337936			
_CIREBON--C	0.176699			
_GARUT--C	-1.416784			
_INDRAMAYU--C	-1.203473			
_KARAWANG--C	0.105594			
_KUNINGAN--C	-0.200961			
_MAJALENGKA--C	-0.939836			
_PURWAKARTA--C	0.752703			
_SUBANG--C	-0.093105			
_SUKABUMI--C	-0.416300			
_SUMEDANG--C	0.638615			
_TASIKMALAYA--C	-1.068976			
_KOTABANDUNG--C	1.046329			
_KOTABEKASI--C	0.609217			
_KOTABOGOR--C	1.208432			
_KOTACIREBON--C	0.609149			

_KOTADEPOK--C	2.263655		
_KOTASUKABUMI--C	-0.769259		
Random Effects (Period)			
2000--C	-0.179578		
2001--C	-0.047132		
2002--C	0.055977		
2003--C	0.244920		
2004--C	0.083477		
2005--C	0.075303		
2006--C	-0.078878		
2007--C	-0.089845		
2008--C	-0.064244		
Effects Specification			
Cross-section random S.D. / Rho	0.918351	0.8981	
Period random S.D. / Rho	0.109371	0.0127	
Idiosyncratic random S.D. / Rho	0.289396	0.0892	
Weighted Statistics			
R-squared	0.070475	Mean dependent var	-0.205637
Adjusted R-squared	0.056101	S.D. dependent var	0.303906
S.E. of regression	0.295258	Sum squared resid	16.91238
F-statistic	4.902895	Durbin-Watson stat	1.430617
Prob(F-statistic)	0.002628		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.045268	Mean dependent var	-2.001896
Sum squared resid	176.1275	Durbin-Watson stat	0.158473

Estimation Command:

LS(CX=R,PER=R,COV=STACKEDWHITE) LNA? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

LNA\_BANDUNG = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)\*LNTRB\_BANDUNG + C(4)\*LNKAPITA\_BANDUNG

LNA\_BEKASI = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BEKASI + C(3)\*LNTRB\_BEKASI + C(4)\*LNKAPITA\_BEKASI

LNA\_BOGOR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BOGOR + C(3)\*LNTRB\_BOGOR + C(4)\*LNKAPITA\_BOGOR

LNA\_CIAMIS = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_CIAMIS + C(3)\*LNTRB\_CIAMIS + C(4)\*LNKAPITA\_CIAMIS

$$\text{LNA\_CIANJUR} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_CIANJUR} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNA\_CIREBON} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_CIREBON} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_CIREBON} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNA\_GARUT} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_GARUT} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_GARUT} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNA\_INDRAMAYU} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNA\_KARAWANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KARAWANG} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNA\_KUNINGAN} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KUNINGAN} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNA\_MAJALENGKA} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNA\_PURWAKARTA} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNA\_SUBANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_SUBANG} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_SUBANG} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNA\_SUKABUMI} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_SUKABUMI} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNA\_SUMEDANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_SUMEDANG} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNA\_TASIKMALAYA} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNA\_KOTABANDUNG} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNA\_KOTABEKASI} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNA\_KOTABOGOR} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNA\_KOTACIREBON} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNA\_KOTADEPOK} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNA\_KOTASUKABUMI} = \text{C}(1) + \text{C}(2) * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + \text{C}(3) * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + \text{C}(4) * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

=====

$$\text{LNA\_BANDUNG} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_BANDUNG} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNA\_BEKASI} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_BEKASI} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNA\_BOGOR} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_BOGOR} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNA\_CIAMIS} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_CIAMIS} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNA\_CIANJUR} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_CIANJUR} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNA\_CIREBON} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_CIREBON} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNA\_GARUT} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_GARUT} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNA\_INDRAMAYU} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNA\_KARAWANG} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KARAWANG} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNA\_KUNINGAN} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNA\_MAJALENGKA} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNA\_PURWAKARTA} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNA\_SUBANG} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_SUBANG} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNA\_SUKABUMI} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNA\_SUMEDANG} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNA\_TASIKMALAYA} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNA\_KOTABANDUNG} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNA\_KOTABEKASI} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNA\_KOTABOGOR} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNA\_KOTACIREBON} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNA\_KOTADEPOK} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNA\_KOTASUKABUMI} = -6.037965271 + 0.07490044143 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.3446091496 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} - 0.2343600926 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

**uji multikolinearitas (nilai VIF)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.422	1.172		-2.920	.004		
	gabindag	.507	.336	.109	1.506	.134	.955	1.047
	lntrb	.079	.095	.063	.831	.407	.883	1.132
	lnkapital	.069	.115	.046	.601	.549	.856	1.168

a. Dependent Variable: lnA

**MODEL 2 = ln T = ao + a1(gabindag) + a2ln(trb) + a3d(ln(kapita))**

### 1. METODE OLS

Dependent Variable: LNT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/11 Time: 11:49

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.928204	1.055444	-0.879444	0.3802
GABINDAG?	1.194241	0.322974	3.697642	0.0003
LNTRB?	0.653227	0.082494	7.918492	0.0000
LNKAPITA?	0.717326	0.101305	7.080831	0.0000
R-squared	0.503163	Mean dependent var		9.570568
Adjusted R-squared	0.495480	S.D. dependent var		1.177406
S.E. of regression	0.836307	Akaike info criterion		2.500353
Sum squared resid	135.6854	Schwarz criterion		2.566783
Log likelihood	-243.5350	F-statistic		65.48999
Durbin-Watson stat	0.207552	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimation Command:

LS(COV=STACKEDWHITE) LNT? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

LNT\_BANDUNG = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)\*LNTRB\_BANDUNG + C(4)\*LNKAPITA\_BANDUNG

LNT\_BEKASI = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BEKASI + C(3)\*LNTRB\_BEKASI + C(4)\*LNKAPITA\_BEKASI

LNT\_BOGOR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BOGOR + C(3)\*LNTRB\_BOGOR + C(4)\*LNKAPITA\_BOGOR

LNT\_CIAMIS = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_CIAMIS + C(3)\*LNTRB\_CIAMIS + C(4)\*LNKAPITA\_CIAMIS

LNT\_CIANJUR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_CIANJUR + C(3)\*LNTRB\_CIANJUR + C(4)\*LNKAPITA\_CIANJUR

$$\text{LNT\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNT\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNT\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNT\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNT\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNT\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNT\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNT\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNT\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNT\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNT\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNT\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNT\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNT\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNT\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNT\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNT\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{LNT\_BANDUNG} = -0.9282039562 + 1.194240588*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.6532265417*\text{LNTRB\_BANDUNG} + 0.7173263956*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNT\_BEKASI} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_BEKASI} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNT\_BOGOR} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_BOGOR} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNT\_CIAMIS} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_CIAMIS} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNT\_CIANJUR} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_CIANJUR} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNT\_CIREBON} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_CIREBON} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNT\_GARUT} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_GARUT} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNT\_INDRAMAYU} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNT\_KARAWANG} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KARAWANG} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNT\_KUNINGAN} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNT\_MAJALENGKA} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNT\_PURWAKARTA} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNT\_SUBANG} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_SUBANG} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNT\_SUKABUMI} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNT\_SUMEDANG} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNT\_TASIKMALAYA} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNT\_KOTABANDUNG} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNT\_KOTABEKASI} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNT\_KOTABOGOR} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNT\_KOTACIREBON} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNT\_KOTADEPOK} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNT\_KOTASUKABUMI} = -0.9282039562 + 1.194240588 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.6532265417 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + 0.7173263956 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

## 2. METODE EFEK RANDOM (MER)

Dependent Variable: LNT?

Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)

Date: 01/04/11 Time: 11:52

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

Swamy and Arora estimator of component variances

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.771500	1.119926	1.581801	0.1153
GABINDAG?	0.466573	0.618424	0.754454	0.4515
LNTRB?	0.479640	0.099933	4.799640	0.0000
LNKAPITA?	0.680517	0.171497	3.968094	0.0001
Random Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	0.623531			
_BEKASI--C	0.130473			
_BOGOR--C	1.210622			
_CIAMIS--C	-0.832342			
_CIANJUR--C	0.044937			
_CIREBON--C	0.514804			
_GARUT--C	-0.978457			
_INDRAMAYU--C	-0.962745			
_KARAWANG--C	0.325901			
_KUNINGAN--C	-0.592510			
_MAJALENGKA--C	-1.272864			
_PURWAKARTA--C	0.152104			
_SUBANG--C	-0.209527			
_SUKABUMI--C	-0.148110			
_SUMEDANG--C	0.328483			
_TASIKMALAYA--C	-0.611177			

_KOTABANDUNG--C	1.530236		
_KOTABEKASI--C	0.800311		
_KOTABOGOR--C	0.767112		
_KOTACIREBON--C	-0.778397		
_KOTADEPOK--C	1.001353		
_KOTASUKABUMI--C	-1.043738		
Random Effects (Period)			
2000--C	-0.144722		
2001--C	-0.080153		
2002--C	0.033123		
2003--C	0.235162		
2004--C	0.087647		
2005--C	0.097256		
2006--C	-0.081872		
2007--C	-0.093704		
2008--C	-0.052736		
Effects Specification			
Cross-section random S.D. / Rho	0.814694	0.8719	
Period random S.D. / Rho	0.117762	0.0182	
Idiosyncratic random S.D. / Rho	0.289275	0.1099	
Weighted Statistics			
R-squared	0.403302	Mean dependent var	1.097595
Adjusted R-squared	0.394075	S.D. dependent var	0.379042
S.E. of regression	0.295051	Sum squared resid	16.88866
F-statistic	43.70750	Durbin-Watson stat	1.415132
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.470389	Mean dependent var	9.570568
Sum squared resid	144.6359	Durbin-Watson stat	0.189867

Estimation Command:

LS(CX=R,PER=R,COV=STACKEDWHITE) LNT? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

LNT\_BANDUNG = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)\*LNTRB\_BANDUNG + C(4)\*LNKAPITA\_BANDUNG

LNT\_BEKASI = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BEKASI + C(3)\*LNTRB\_BEKASI + C(4)\*LNKAPITA\_BEKASI

$$\text{LNT\_BOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_BOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_BOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNT\_CIAMIS} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIAMIS} + C(3)*\text{LNTRB\_CIAMIS} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNT\_CIANJUR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIANJUR} + C(3)*\text{LNTRB\_CIANJUR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNT\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNT\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNT\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNT\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNT\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNT\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNT\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNT\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNT\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNT\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNT\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNT\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNT\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNT\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNT\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNT\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNT\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{LNT\_BANDUNG} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_BANDUNG} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNT\_BEKASI} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_BEKASI} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNT\_BOGOR} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_BOGOR} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNT\_CIAMIS} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_CIAMIS} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNT\_CIANJUR} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_CIANJUR} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNT\_CIREBON} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_CIREBON} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNT\_GARUT} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_GARUT} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_GARUT} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNT\_INDRAMAYU} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNT\_KARAWANG} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_KARAWANG} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNT\_KUNINGAN} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNT\_MAJALENGKA} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNT\_PURWAKARTA} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNT\_SUBANG} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_SUBANG} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNT\_SUKABUMI} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNT\_SUMEDANG} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNT\_TASIKMALAYA} = 1.771500119 + 0.4665726213*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.4796402447*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + 0.6805171511*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNT\_KOTABANDUNG} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNT\_KOTABEKASI} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNT\_KOTABOGOR} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNT\_KOTACIREBON} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNT\_KOTADEPOK} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNT\_KOTASUKABUMI} = 1.771500119 + 0.4665726213 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.4796402447 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + 0.6805171511 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.928	1.064		-.872	.384		
	gabindag	1.194	.306	.202	3.909	.000	.955	1.047
	lntrb	.653	.086	.409	7.599	.000	.883	1.132
	lnkapital	.717	.105	.375	6.861	.000	.856	1.168

a. Dependent Variable: lnT

**MODEL 3** =  $\ln \text{PAD}/Y = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2 \ln(\text{trb}) + a_3 \ln(\text{kapita})$

### 1. METODE OLS

Dependent Variable: LNB?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/11 Time: 11:55

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.323005	0.801310	-2.899012	0.0042
GABINDAG?	-0.299071	0.180667	-1.655374	0.0995
LNTRB?	0.153505	0.060949	2.518557	0.0126
LNKAPITA?	-0.132727	0.071966	-1.844314	0.0667
R-squared	0.045358	Mean dependent var		-0.754772
Adjusted R-squared	0.030596	S.D. dependent var		0.617581
S.E. of regression	0.608060	Akaike info criterion		1.862909
Sum squared resid	71.72901	Schwarz criterion		1.929339
Log likelihood	-180.4280	F-statistic		3.072524
Durbin-Watson stat	0.142342	Prob(F-statistic)		0.028916

Estimation Command:

LS(COV=STACKEDWHITE) LNB? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

$LNB\_BANDUNG = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)*LNTRB\_BANDUNG + C(4)*LNKAPITA\_BANDUNG$

$LNB\_BEKASI = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BEKASI + C(3)*LNTRB\_BEKASI + C(4)*LNKAPITA\_BEKASI$

$LNB\_BOGOR = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BOGOR + C(3)*LNTRB\_BOGOR + C(4)*LNKAPITA\_BOGOR$

$LNB\_CIAMIS = C(1) + C(2)*GABINDAG\_CIAMIS + C(3)*LNTRB\_CIAMIS + C(4)*LNKAPITA\_CIAMIS$

$LNB\_CIANJUR = C(1) + C(2)*GABINDAG\_CIANJUR + C(3)*LNTRB\_CIANJUR + C(4)*LNKAPITA\_CIANJUR$

$LNB\_CIREBON = C(1) + C(2)*GABINDAG\_CIREBON + C(3)*LNTRB\_CIREBON + C(4)*LNKAPITA\_CIREBON$

Universitas Indonesia

$$\text{LNB\_GARUT} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNB\_INDRAMAYU} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNB\_KARAWANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNB\_KUNINGAN} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNB\_MAJALENGKA} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNB\_PURWAKARTA} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNB\_SUBANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNB\_SUKABUMI} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNB\_SUMEDANG} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNB\_TASIKMALAYA} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNB\_KOTABANDUNG} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNB\_KOTABEKASI} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNB\_KOTABOGOR} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNB\_KOTACIREBON} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNB\_KOTADEPOK} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNB\_KOTASUKABUMI} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + \text{C}(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + \text{C}(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{LNB\_BANDUNG} = -2.323005476 - 0.2990714104*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.1535046786*\text{LNTRB\_BANDUNG} - 0.1327273359*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

LNB\_BEKASI = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_BEKASI +  
0.1535046786\*LNTRB\_BEKASI - 0.1327273359\*LNKAPITA\_BEKASI

LNB\_BOGOR = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_BOGOR +  
0.1535046786\*LNTRB\_BOGOR - 0.1327273359\*LNKAPITA\_BOGOR

LNB\_CIAMIS = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_CIAMIS +  
0.1535046786\*LNTRB\_CIAMIS - 0.1327273359\*LNKAPITA\_CIAMIS

LNB\_CIANJUR = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_CIANJUR +  
0.1535046786\*LNTRB\_CIANJUR - 0.1327273359\*LNKAPITA\_CIANJUR

LNB\_CIREBON = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_CIREBON +  
0.1535046786\*LNTRB\_CIREBON - 0.1327273359\*LNKAPITA\_CIREBON

LNB\_GARUT = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_GARUT +  
0.1535046786\*LNTRB\_GARUT - 0.1327273359\*LNKAPITA\_GARUT

LNB\_INDRAMAYU = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_INDRAMAYU +  
0.1535046786\*LNTRB\_INDRAMAYU - 0.1327273359\*LNKAPITA\_INDRAMAYU

LNB\_KARAWANG = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KARAWANG +  
0.1535046786\*LNTRB\_KARAWANG - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KARAWANG

LNB\_KUNINGAN = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KUNINGAN +  
0.1535046786\*LNTRB\_KUNINGAN - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KUNINGAN

LNB\_MAJALENGKA = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_MAJALENGKA +  
0.1535046786\*LNTRB\_MAJALENGKA - 0.1327273359\*LNKAPITA\_MAJALENGKA

LNB\_PURWAKARTA = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_PURWAKARTA +  
0.1535046786\*LNTRB\_PURWAKARTA - 0.1327273359\*LNKAPITA\_PURWAKARTA

LNB\_SUBANG = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_SUBANG +  
0.1535046786\*LNTRB\_SUBANG - 0.1327273359\*LNKAPITA\_SUBANG

LNB\_SUKABUMI = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_SUKABUMI +  
0.1535046786\*LNTRB\_SUKABUMI - 0.1327273359\*LNKAPITA\_SUKABUMI

LNB\_SUMEDANG = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_SUMEDANG +  
0.1535046786\*LNTRB\_SUMEDANG - 0.1327273359\*LNKAPITA\_SUMEDANG

LNB\_TASIKMALAYA = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_TASIKMALAYA +  
0.1535046786\*LNTRB\_TASIKMALAYA - 0.1327273359\*LNKAPITA\_TASIKMALAYA

LNB\_KOTABANDUNG = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KOTABANDUNG +  
0.1535046786\*LNTRB\_KOTABANDUNG - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KOTABANDUNG

LNB\_KOTABEKASI = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KOTABEKASI +  
0.1535046786\*LNTRB\_KOTABEKASI - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KOTABEKASI

LNB\_KOTABOGOR = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KOTABOGOR +  
0.1535046786\*LNTRB\_KOTABOGOR - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KOTABOGOR

LNB\_KOTACIREBON = -2.323005476 - 0.2990714104\*GABINDAG\_KOTACIREBON +  
0.1535046786\*LNTRB\_KOTACIREBON - 0.1327273359\*LNKAPITA\_KOTACIREBON

$LNB\_KOTADEPOK = -2.323005476 - 0.2990714104 * GABINDAG\_KOTADEPOK + 0.1535046786 * LNTRB\_KOTADEPOK - 0.1327273359 * LNKAPITA\_KOTADEPOK$

$LNB\_KOTASUKABUMI = -2.323005476 - 0.2990714104 * GABINDAG\_KOTASUKABUMI + 0.1535046786 * LNTRB\_KOTASUKABUMI - 0.1327273359 * LNKAPITA\_KOTASUKABUMI$

## 2. METODE EFEK RANDOM (MER)

Dependent Variable: LNB?

Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)

Date: 01/04/11 Time: 11:56

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

Swamy and Arora estimator of component variances

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.482500	1.053663	-6.152347	0.0000
GABINDAG?	-0.384394	0.479124	-0.802285	0.4234
LNTRB?	0.526550	0.089474	5.884920	0.0000
LNKAPITA?	-0.448449	0.133747	-3.352954	0.0010
Random Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	-0.665401			
_BEKASI--C	-0.053367			
_BOGOR--C	-0.073539			
_CIAMIS--C	-0.686342			
_CIANJUR--C	-0.582701			
_CIREBON--C	-0.256995			
_GARUT--C	-0.759268			
_INDRAMAYU--C	-1.021463			
_KARAWANG--C	-0.105193			
_KUNINGAN--C	6.86E-05			
_MAJALENGKA--C	0.018636			
_PURWAKARTA--C	0.464825			
_SUBANG--C	-0.147272			
_SUKABUMI--C	-0.454738			
_SUMEDANG--C	0.438304			
_TASIKMALAYA--C	-0.579738			
_KOTABANDUNG--C	0.343101			
_KOTABEKASI--C	0.348987			
_KOTABOGOR--C	0.745844			

_KOTACIREBON--C	1.012109		
_KOTADEPOK--C	1.690025		
_KOTASUKABUMI--C	0.324117		
Random Effects (Period)			
2000--C	-0.120885		
2001--C	-0.077505		
2002--C	0.072460		
2003--C	0.021385		
2004--C	0.057966		
2005--C	0.108660		
2006--C	0.017690		
2007--C	-0.032962		
2008--C	-0.046808		
Effects Specification			
Cross-section random S.D. / Rho	0.532809	0.8905	
Period random S.D. / Rho	0.071769	0.0162	
Idiosyncratic random S.D. / Rho	0.172476	0.0933	
Weighted Statistics			
R-squared	0.271359	Mean dependent var	-0.079254
Adjusted R-squared	0.260091	S.D. dependent var	0.212494
S.E. of regression	0.182783	Sum squared resid	6.481451
F-statistic	24.08298	Durbin-Watson stat	0.951368
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.158743	Mean dependent var	-0.754772
Sum squared resid	87.06459	Durbin-Watson stat	0.085784

Estimation Command:

LS(CX=R,PER=R,COV=STACKEDWHITE) LNB? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

LNB\_BANDUNG = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)\*LNTRB\_BANDUNG + C(4)\*LNKAPITA\_BANDUNG

LNB\_BEKASI = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BEKASI + C(3)\*LNTRB\_BEKASI + C(4)\*LNKAPITA\_BEKASI

LNB\_BOGOR = C(1) + C(2)\*GABINDAG\_BOGOR + C(3)\*LNTRB\_BOGOR + C(4)\*LNKAPITA\_BOGOR

$$\text{LNB\_CIAMIS} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIAMIS} + C(3)*\text{LNTRB\_CIAMIS} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNB\_CIANJUR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIANJUR} + C(3)*\text{LNTRB\_CIANJUR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNB\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNB\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNB\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNB\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNB\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNB\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNB\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNB\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNB\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNB\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNB\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNB\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNB\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNB\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNB\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNB\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNB\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

## Substituted Coefficients:

$$\text{LNB\_BANDUNG} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_BANDUNG} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNB\_BEKASI} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_BEKASI} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNB\_BOGOR} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_BOGOR} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNB\_CIAMIS} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_CIAMIS} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNB\_CIANJUR} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_CIANJUR} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNB\_CIREBON} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_CIREBON} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNB\_GARUT} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_GARUT} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNB\_INDRAMAYU} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNB\_KARAWANG} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KARAWANG} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNB\_KUNINGAN} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNB\_MAJALENGKA} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNB\_PURWAKARTA} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNB\_SUBANG} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_SUBANG} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNB\_SUKABUMI} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNB\_SUMEDANG} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNB\_TASIKMALAYA} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNB\_KOTABANDUNG} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNB\_KOTABEKASI} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNB\_KOTABOGOR} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNB\_KOTACIREBON} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNB\_KOTADEPOK} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNB\_KOTASUKABUMI} = -6.48250023 - 0.3843938085 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.5265498462 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} - 0.4484488931 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.323	.774		-3.002	.003		
	gabindag	-.299	.222	-.097	-1.346	.180	.955	1.047
	lntrb	.154	.062	.183	2.456	.015	.883	1.132
	lnkapital	-.133	.076	-.132	-1.746	.082	.856	1.168

a. Dependent Variable: lnB

MODEL 4 =  $\ln \text{PAD} = a_0 + a_1(\text{gabindag}) + a_2 \ln(\text{trb}) + a_3 \ln(\text{kapita})$

### 1. METODE OLS

Dependent Variable: LNPAD?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/11 Time: 11:59

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.215320	0.636525	-0.338275	0.7355
GABINDAG?	0.707136	0.191606	3.690582	0.0003
LNTRB?	0.811191	0.049976	16.23176	0.0000
LNKAPITA?	1.534652	0.602319	2.547903	0.0116
R-squared	0.628672	Mean dependent var		10.81769
Adjusted R-squared	0.622929	S.D. dependent var		0.847264
S.E. of regression	0.520271	Akaike info criterion		1.551063
Sum squared resid	52.51237	Schwarz criterion		1.617492
Log likelihood	-149.5552	F-statistic		109.4829
Durbin-Watson stat	0.235310	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimation Command:

LS(COV=STACKEDWHITE) LNPAD? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?

Estimation Equations:

$LNPAD\_BANDUNG = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BANDUNG + C(3)*LNTRB\_BANDUNG + C(4)*LNKAPITA\_BANDUNG$

$LNPAD\_BEKASI = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BEKASI + C(3)*LNTRB\_BEKASI + C(4)*LNKAPITA\_BEKASI$

$LNPAD\_BOGOR = C(1) + C(2)*GABINDAG\_BOGOR + C(3)*LNTRB\_BOGOR + C(4)*LNKAPITA\_BOGOR$

$LNPAD\_CIAMIS = C(1) + C(2)*GABINDAG\_CIAMIS + C(3)*LNTRB\_CIAMIS + C(4)*LNKAPITA\_CIAMIS$

$LNPAD\_CIANJUR = C(1) + C(2)*GABINDAG\_CIANJUR + C(3)*LNTRB\_CIANJUR + C(4)*LNKAPITA\_CIANJUR$

$$\text{LNPAD\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNPAD\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNPAD\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNPAD\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNPAD\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNPAD\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNPAD\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNPAD\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNPAD\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNPAD\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNPAD\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNPAD\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

$$\text{LNPAD\_BANDUNG} = -0.2153200895 + 0.7071358436*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.8111912109*\text{LNTRB\_BANDUNG} + 1.534651714*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_BEKASI} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_BEKASI} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_BOGOR} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_BOGOR} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNPAD\_CIAMIS} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_CIAMIS} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNPAD\_CIANJUR} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_CIANJUR} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNPAD\_CIREBON} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_CIREBON} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_GARUT} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_GARUT} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNPAD\_INDRAMAYU} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNPAD\_KARAWANG} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KARAWANG} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNPAD\_KUNINGAN} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNPAD\_MAJALENGKA} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNPAD\_PURWAKARTA} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNPAD\_SUBANG} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_SUBANG} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNPAD\_SUKABUMI} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNPAD\_SUMEDANG} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNPAD\_TASIKMALAYA} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABANDUNG} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABEKASI} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABOGOR} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LN PAD\_KOTACIREBON} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LN PAD\_KOTADEPOK} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LN PAD\_KOTASUKABUMI} = -0.2153200895 + 0.7071358436 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.8111912109 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + 1.534651714 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

## 2. METODE EFEK RANDOM (MER)

Dependent Variable: LN PAD?

Method: Pooled EGLS (Two-way random effects)

Date: 01/04/11 Time: 12:00

Sample: 2000 2008

Included observations: 9

Cross-sections included: 22

Total pool (balanced) observations: 198

Swamy and Arora estimator of component variances

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.681898	1.107927	0.615472	0.5390
GABINDAG?	0.026882	0.404930	0.066386	0.9471
LNTRB?	0.780261	0.084129	9.274537	0.0000
LNKAPITA?	0.203640	0.237438	0.857655	0.3921
Random Effects (Cross)				
_BANDUNG--C	0.193405			
_BEKASI--C	0.732046			
_BOGOR--C	0.741330			
_CIAMIS--C	-0.696310			
_CIANJUR--C	-0.418460			
_CIREBON--C	-0.175798			
_GARUT--C	-0.492351			
_INDRAMAYU--C	-0.524050			
_KARAWANG--C	0.275955			
_KUNINGAN--C	-0.651968			
_MAJALENGKA--C	-0.559425			
_PURWAKARTA--C	0.091735			
_SUBANG--C	-0.384306			
_SUKABUMI--C	-0.425627			
_SUMEDANG--C	0.062752			
_TASIKMALAYA--C	-0.385372			
_KOTABANDUNG--C	1.043237			
_KOTABEKASI--C	0.607711			
_KOTABOGOR--C	0.282216			
_KOTACIREBON--C	0.224634			

_KOTADEPOK--C	0.300746		
_KOTASUKABUMI--C	0.157902		
Random Effects (Period)			
2000--C	-0.122978		
2001--C	-0.226073		
2002--C	-0.017916		
2003--C	-0.062261		
2004--C	0.039961		
2005--C	0.175512		
2006--C	0.073614		
2007--C	0.046880		
2008--C	0.093261		
Effects Specification			
Cross-section random S.D. / Rho	0.495940	0.8535	
Period random S.D. / Rho	0.114463	0.0455	
Idiosyncratic random S.D. / Rho	0.170660	0.1011	
Weighted Statistics			
R-squared	0.466568	Mean dependent var	1.160437
Adjusted R-squared	0.458319	S.D. dependent var	0.243530
S.E. of regression	0.179236	Sum squared resid	6.232344
F-statistic	56.56093	Durbin-Watson stat	1.067645
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.591348	Mean dependent var	10.81769
Sum squared resid	57.79063	Durbin-Watson stat	0.161087

Estimation Command:

```
LS(CX=R,PER=R,COV=STACKEDWHITE) LNPAD? C GABINDAG? LNTRB? LNKAPITA?
```

Estimation Equations:

$$\text{LNPAD\_BANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_BANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_BANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_BEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_BEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_BEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_BOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_BOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_BOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNPAD\_CIAMIS} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIAMIS} + C(3)*\text{LNTRB\_CIAMIS} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNPAD\_CIANJUR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIANJUR} + C(3)*\text{LNTRB\_CIANJUR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNPAD\_CIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_CIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_CIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_GARUT} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_GARUT} + C(3)*\text{LNTRB\_GARUT} + C(4)*\text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNPAD\_INDRAMAYU} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + C(3)*\text{LNTRB\_INDRAMAYU} + C(4)*\text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNPAD\_KARAWANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KARAWANG} + C(3)*\text{LNTRB\_KARAWANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNPAD\_KUNINGAN} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KUNINGAN} + C(3)*\text{LNTRB\_KUNINGAN} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNPAD\_MAJALENGKA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + C(3)*\text{LNTRB\_MAJALENGKA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNPAD\_PURWAKARTA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + C(3)*\text{LNTRB\_PURWAKARTA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNPAD\_SUBANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUBANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUBANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNPAD\_SUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_SUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNPAD\_SUMEDANG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_SUMEDANG} + C(3)*\text{LNTRB\_SUMEDANG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNPAD\_TASIKMALAYA} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + C(3)*\text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + C(4)*\text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABANDUNG} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABEKASI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABEKASI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABOGOR} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTABOGOR} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LNPAD\_KOTACIREBON} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTACIREBON} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_KOTADEPOK} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTADEPOK} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LNPAD\_KOTASUKABUMI} = C(1) + C(2)*\text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + C(3)*\text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + C(4)*\text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Substituted Coefficients:

=====

$$\text{LNPAD\_BANDUNG} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_BANDUNG} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_BANDUNG} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_BANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_BEKASI} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_BEKASI} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_BEKASI} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_BEKASI}$$

$$\text{LNPAD\_BOGOR} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_BOGOR} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_BOGOR} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_BOGOR}$$

$$\text{LNPAD\_CIAMIS} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_CIAMIS} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_CIAMIS} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_CIAMIS}$$

$$\text{LNPAD\_CIANJUR} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_CIANJUR} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_CIANJUR} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_CIANJUR}$$

$$\text{LNPAD\_CIREBON} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_CIREBON} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_CIREBON} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_CIREBON}$$

$$\text{LNPAD\_GARUT} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_GARUT} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_GARUT} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_GARUT}$$

$$\text{LNPAD\_INDRAMAYU} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_INDRAMAYU} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_INDRAMAYU} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_INDRAMAYU}$$

$$\text{LNPAD\_KARAWANG} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KARAWANG} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KARAWANG} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KARAWANG}$$

$$\text{LNPAD\_KUNINGAN} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KUNINGAN} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KUNINGAN} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KUNINGAN}$$

$$\text{LNPAD\_MAJALENGKA} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_MAJALENGKA} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_MAJALENGKA} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_MAJALENGKA}$$

$$\text{LNPAD\_PURWAKARTA} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_PURWAKARTA} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_PURWAKARTA} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_PURWAKARTA}$$

$$\text{LNPAD\_SUBANG} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_SUBANG} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_SUBANG} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_SUBANG}$$

$$\text{LNPAD\_SUKABUMI} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_SUKABUMI} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_SUKABUMI} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_SUKABUMI}$$

$$\text{LNPAD\_SUMEDANG} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_SUMEDANG} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_SUMEDANG} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_SUMEDANG}$$

$$\text{LNPAD\_TASIKMALAYA} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_TASIKMALAYA} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_TASIKMALAYA} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_TASIKMALAYA}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABANDUNG} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTABANDUNG} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTABANDUNG} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTABANDUNG}$$

$$\text{LNPAD\_KOTABEKASI} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTABEKASI} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTABEKASI} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTABEKASI}$$

$$\text{LN PAD\_KOTABOGOR} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTABOGOR} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTABOGOR} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTABOGOR}$$

$$\text{LN PAD\_KOTACIREBON} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTACIREBON} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTACIREBON} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTACIREBON}$$

$$\text{LN PAD\_KOTADEPOK} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTADEPOK} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTADEPOK} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTADEPOK}$$

$$\text{LN PAD\_KOTASUKABUMI} = 0.6818980428 + 0.02688158377 * \text{GABINDAG\_KOTASUKABUMI} + 0.780261077 * \text{LNTRB\_KOTASUKABUMI} + 0.2036403091 * \text{LNKAPITA\_KOTASUKABUMI}$$

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.170	.555		.307	.759		
	gabindag	.389	.159	.091	2.437	.016	.955	1.047
	lntrb	.728	.045	.634	16.229	.000	.883	1.132
	lnkapital	.515	.055	.375	9.447	.000	.856	1.168

a. Dependent Variable: lnpad

1.  $\ln(\text{PAD}) = a_0 + a_1 \text{pertanian} + a_2 \text{industri} + a_3 \text{dagang} + a_4 \ln(\text{density}) + a_5 \ln(\text{trb}) + a_6 \ln(\text{kapita}) + a_7 \ln(\text{pad\_sebelumnya})$

Dependent Variable: LOG(PAD?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 01/01/11 Time: 09:30  
 Sample (adjusted): 2001 2008  
 Included observations: 8 after adjustments  
 Cross-sections included: 22  
 Total pool (balanced) observations: 176

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTANIAN?	0.004691	0.002223	2.110027	0.0363
INDUSTRI?	0.009074	0.001588	5.715285	0.0000
DAGANG?	0.005983	0.003167	1.888949	0.0606
LOG(KEPADATA N?)	0.101296	0.025878	3.914312	0.0001
LOG(TRB?)	0.245917	0.032429	7.583284	0.0000
D(LOG(KAPITA?))	0.508339	0.263001	1.932836	0.0549
LOG(PAD?(-1))	0.598607	0.034037	17.58700	0.0000
R-squared	0.946083	Mean dependent var	10.96611	
Adjusted R-squared	0.944169	S.D. dependent var	0.739571	
S.E. of regression	0.174750	Akaike info criterion	-0.611961	
Sum squared resid	5.160846	Schwarz criterion	-0.485862	
Log likelihood	60.85257	Hannan-Quinn criter.	-0.560816	
Durbin-Watson stat	1.754997			

Dengan tingkat keyakinan 95% :

- Semua variable berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PAD. Yang tidak signifikan adalah kontribusi sector dagang dan perubahan dari pertumbuhan pendapatan per kapita.
- pertanian memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector industri sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,004 % pada PAD
- Industri memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap perubahan kontribusi sector industri sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,009 % pada PAD

- Kepadatan memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap pertumbuhan kepadatan 1% akan menyebabkan pertumbuhan 0,1 % pada PAD
  - TRB memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN TRB sebesar 1persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,25 % pada PAD
  - pertumbuhan PAD sebelumnya turut memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Setiap PERTUMBUHAN PAD sebelumnya sebesar 1 persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,6 % pada PAD saat ini(kenapa dimasukkan??guna menanggulangi autokorelasi yang terjadi antar periode).
  - Adjusted R-squared = 0,94 menunjukkan seberapa besar variable independent kita memberikan kontribusi untuk menjelaskan variasi dari nilai pertumbuhan PAD adalah 94%.
2.  $PAD/y = a_0 + a_1 \text{pertanian} + a_2 \text{industri} + a_3 \text{dagang} + a_4 \ln(\text{density}) + a_5 \ln(\text{trb}) + a_6 \ln(\text{kapita}) + a_7 \text{Pad}/Y(-1)$

Dependent Variable: PADY?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 01/01/11 Time: 09:34  
 Sample (adjusted): 2001 2008  
 Included observations: 8 after adjustments  
 Cross-sections included: 22  
 Total pool (balanced) observations: 176

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTANIAN?	0.003861	0.001425	2.709903	0.0074
INDUSTRI?	0.001818	0.001021	1.780162	0.0768
DAGANG?	0.001061	0.002076	0.510895	0.6101
LOG(KEPADATA N?)	0.045528	0.017250	2.639277	0.0091
LOG(TRB?)	-0.032322	0.011444	-2.824368	0.0053
D(LOG(KAPITA?))	-0.182106	0.173243	-1.051159	0.2947
PADY?(-1)	0.973194	0.020761	46.87596	0.0000
R-squared	0.945088	Mean dependent var	0.608013	
Adjusted R-squared	0.943139	S.D. dependent var	0.483035	
S.E. of regression	0.115183	Akaike info criterion	-1.445638	

Sum squared resid	2.242125	Schwarz criterion	-1.319539
Log likelihood	134.2161	Hannan-Quinn criter.	-1.394493
Durbin-Watson stat	2.257586		

Dengan tingkat keyakinan 95% :

- Variabel yang tidak signifikan adalah kontribusi sector industry dan dagang dan perubahan pertambahan pendapatan per kapita penduduk. Selainnya signifikan.
- Pertanian memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap perubahan kontribusi dari PAD. Setiap perubahan kontribusi sector pertanian sebesar 1 % akan menyebabkan perubahan kontribusi dari PAD sebesar 0,003 %
- Kepadatan memberi pengaruh positive tapi signifikan terhadap perubahan kontribusi dari PAD. Setiap pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 1% akan menyebabkan perubahan kontribusi dari PAD 0,045 %
- TRB memberi pengaruh negative yang signifikan terhadap perubahan kontribusi dari PAD. Setiap PERTUMBUHAN TRB sebesar 1persen akan menyebabkan perubahan kontribusi dari PAD -0,03 %
- Kontribusi PAD sebelumnya juga turut mempengaruhi kontribusi dari PAD saat ini terhadap PDRB. Setiap perubahan kontribusi sebelumnya sebesar 1% akan menyebabkan perubahan kontribusi saat ini sebesar 0,9 %.
- Adjusted R-squared = 0,945 menunjukkan seberapa besar variable independent kita memberikan kontribusi untuk menjelaskan variasi dari nilai pertumbuhan PAD adalah 94,5%.

$$3. \ln(T) = a_0 + a_1 \text{pertanian} + a_2 \text{industri} + a_3 \text{dagang} + a_4 \ln(\text{density}) + a_5 \ln(\text{trb}) + a_6 \ln(\text{kapita}) + a_7 \ln T \text{ sebelumnya}$$

Dependent Variable: LOG(T?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 01/01/11 Time: 09:41  
 Sample (adjusted): 2001 2008  
 Included observations: 8 after adjustments  
 Cross-sections included: 22  
 Total pool (balanced) observations: 176

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTANIAN?	0.005740	0.004372	1.312804	0.1910
INDUSTRI?	0.012087	0.003360	3.597107	0.0004

DAGANG?	0.005082	0.006344	0.800972	0.4243
LOG(KEPADATA N?)	0.116709	0.052221	2.234896	0.0267
LOG(TRB?)	0.114598	0.041980	2.729852	0.0070
D(LOG(KAPITA?))	0.018041	0.533272	0.033830	0.9731
LOG(T?(-1))	0.711207	0.039835	17.85375	0.0000
R-squared	0.900403	Mean dependent var	9.711903	
Adjusted R-squared	0.896867	S.D. dependent var	1.099221	
S.E. of regression	0.353007	Akaike info criterion	0.794305	
Sum squared resid	21.05980	Schwarz criterion	0.920404	
Log likelihood	-62.89882	Hannan-Quinn criter.	0.845450	
Durbin-Watson stat	2.493577			

Dengan tingkat keyakinan 95% :

Semua variable berpengaruh positive namun yang signifikan hanya kontribusi industry, pertumbuhan kepadatan, pertumbuhan trb, dan pertumbuhan pajak sebelumnya.

- Industri memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan pajak. Setiap perubahan kontribusi sector industri sebesar 1 % akan menyebabkan pertumbuhan 0,012 % pada pertumbuhan pajak
- Kepadatan memberi pengaruh positive tapi signifikan terhadap pertumbuhan Pajak. Setiap pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 1% akan menyebabkan pertumbuhan 0,117 % pada Pajak
- TRB memberi pengaruh positive yang signifikan terhadap pertumbuhan Pajak. Setiap PERTUMBUHAN TRB sebesar 1persen akan menyebabkan pertumbuhan 0,115 % pada pajak.
- Pertumbuhan pajak tahun sebelumnya turut mempengaruhi pertumbuhan pajak. Setiap 1 % pertumbuhan pajak sebelumnya akan menyebabkan pertumbuhan pajak 0,7%.
- Adjusted R-squared = 0,9 menunjukkan seberapa besar variable independent kita memberikan kontribusi untuk menjelaskan variasi dari nilai pertumbuhan PAD adalah 90%.